

wonderful
indonesia



LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN PARIWISATA

TAHUN 2025





KATA PENGANTAR

Sektor pariwisata pada Tahun 2025 terus berperan strategis dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas yang dituangkan dalam 8 Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029. Pariwisata adalah salah satu sektor kunci bagi pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi tahun 2045 melalui Kontribusi PDB Pariwisata sebesar 8%, devisa pariwisata sebesar 100 Miliar USD, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk mendukung pencapaian Misi Asta Cita Nomor 3, yaitu Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Selain itu, sektor pariwisata juga turut berkontribusi pada Misi Asta Cita Nomor 2, 4, 6 dan 8.

Sebagai bagian dari upaya pencapaian target pembangunan nasional, Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan jumlah perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara ke berbagai destinasi di Indonesia, pengeluaran wisatawan mancanegara, peningkatan devisa pariwisata, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta perluasan kesempatan kerja di sektor pariwisata. Strategi yang dijalankan meliputi penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata, penerapan tata kelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pariwisata sesuai standar nasional dan internasional, penguatan penyelenggaraan *event* berkualitas, serta peningkatan daya saing dan daya dukung destinasi pariwisata Indonesia. Seluruh strategi tersebut menjadi kunci untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pada Tahun 2025, meskipun tren kunjungan wisatawan menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan yang positif, sektor pariwisata masih dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain ketidakpastian perekonomian global, dinamika geopolitik, perubahan preferensi wisatawan, serta percepatan adaptasi teknologi digital. Selain itu, daya saing destinasi,

kualitas layanan, dan keberlanjutan lingkungan menjadi faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan sektor pariwisata. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan ekosistem pariwisata yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing.

Tahun 2025 juga merupakan periode awal penguatan kelembagaan Kementerian Pariwisata pasca restrukturisasi pemerintahan, di mana urusan pariwisata dan ekonomi kreatif telah ditangani oleh kementerian yang terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan fokus tugas dan fungsi yang lebih spesifik, Kementerian Pariwisata diharapkan dapat semakin optimal dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional yang berorientasi pada kualitas, keberlanjutan, dan nilai tambah ekonomi.

Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dalam satu tahun anggaran. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja, penggunaan sumber daya, serta berbagai upaya perbaikan dan inovasi yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kementerian Pariwisata senantiasa berkomitmen untuk mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian target pembangunan kepariwisataan nasional.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2025 ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi sumber informasi yang komprehensif dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas publik. Semoga laporan ini dapat mendorong penguatan sinergi, inovasi kebijakan, dan strategi pembangunan pariwisata yang lebih baik demi terwujudnya pariwisata Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Jakarta, Februari 2026



Widiyanti Putri

Menteri Pariwisata Republik Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		v
Daftar Gambar		vii
Pernyataan Telah Direviu		xi
Ringkasan Eksekutif		xii
1		1
PENDAHULUAN		
1.1.	Latar Belakang	2
1.2.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
1.3.	Mandat, dan Peran Strategis, serta Permasalahan Utama	5
1.4.	Sistematika Laporan	12
2		13
PERENCANAAN KINERJA		
2.1.	Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029	14
2.2.	Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2025	19
2.3.	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025	29
2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	33
3		39
AKUNTABILITAS KINERJA		
3.1.	Capaian Kinerja Organisasi	40
	SS.1. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata	41
	IKSS.1.1: Rasio PDB Pariwisata	41
	IKSS.1.2: Devisa Pariwisata	57
	IKSS.1.3: Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	69
	IKSS.1.4: Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	75
	IKSS.1.5: Kunjungan Wisatawan Mancanegara	87

	IKSS.1.6: Perjalanan Wisatawan Nusantara	102
SS.2.	Meningkatnya Kualitas Governansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur	109
	IKSS.2.1: Indeks Reformasi Birokrasi	109
3.2.	Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025	132
3.3.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	133
3.4.	Kinerja Lain-lain	134
3.5.	Evaluasi Internal	148
4		150
PENUTUP		
4.1.	Kesimpulan	151
4.2.	Rekomendasi/Langkah-Langkah untuk Perbaikan yang akan Datang	153

DAFTAR Tabel

Tabel 1.1.	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025	7
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Keselarasannya dengan Indikator RPJMN Tahun 2025-2029	17
Tabel 2.2.	Sebaran Destinasi Pariwisata Regeneratif dan Prioritas	22
Tabel 2.3.	Target Kegiatan Prioritas PN 3 Kementerian Pariwisata Tahun 2025	25
Tabel 2.4.	Target Kegiatan Prioritas PN 2 Kementerian Pariwisata Tahun 2025	28
Tabel 2.5.	Pagu Anggaran Kemenpar Tahun Anggaran 2025 (Per Program)	32
Tabel 2.6.	Perubahan Anggaran Kemenpar Tahun 2025	32
Tabel 2.7.	Perbandingan antara PK Awal dan PK Perubahan Menteri Pariwisata Tahun 2025	33
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2025	40
Tabel 3.2.	Persandingan Realisasi Rasio PDB Pariwisata Tahun 2024-2025	42
Tabel 3.3.	Neraca Pembayaran Indonesia Transaksi Berjalan Jasa-Jasa Triwulan IV Tahun 2025 (Juta USD)	58
Tabel 3.4.	Persandingan Realisasi Devisa Pariwisata Tahun 2024-2025	58
Tabel 3.5.	Persandingan Realisasi Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Tahun 2024-2025	70
Tabel 3.6.	Persandingan Realisasi Tenaga Kerja Pariwisata Tahun 2024-2025	76
Tabel 3.7.	Jumlah Lulusan Poltekpar Tahun 2025	78
Tabel 3.8.	Persandingan Realisasi Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2024-2025	88
Tabel 3.9.	Persandingan Realisasi Perjalanan Wisatawan Nusantara Tahun 2024-2025	103
Tabel 3.10.	Persandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024-2025	110
Tabel 3.11.	Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata Tahun 2025	111
Tabel 3.12.	Capaian Kinerja Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau Tahun 2025	115
Tabel 3.13.	Capaian Kinerja Percepatan Pembangunan DPP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramenan, Labuan Bajo, dan Danau Toba Tahun 2025	116

Tabel 3.14.	Capaian Kinerja Pengembangan DPP Manado-Likupang, Bangka Belitung, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, dan Morotai Tahun 2025	117
Tabel 3.15.	Capaian Kinerja Penguatan DPR Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau Tahun 2025	119
Tabel 3.16.	Sebaran Lokasi, Tanggal Pelaksanaan dan Mitra Kolaborasi Kegiatan GWB	123
Tabel 3.17.	Realisasi Anggaran Kemenpar Tahun 2025 Berdasarkan Program	132
Tabel 3.18.	Realisasi Anggaran Kemenpar Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana	132
Tabel 3.19.	Realisasi Anggaran Kemenpar Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja	133
Tabel 3.20.	Realisasi Anggaran Kemenpar per Satuan Kerja Tahun 2025	133
Tabel 3.21.	Rincian Output Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2025	142
Tabel 3.22.	Daftar Program Strategis Kementerian Pariwisata dengan K/L lainnya Tahun 2025	147

DAFTAR Gambar

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata	5
Gambar 1.2.	Delapan Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2024-2029	6
Gambar 1.3.	Tema dan Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	7
Gambar 1.4.	Program Hasil Terbaik Cepat dalam RKP Tahun 2025	9
Gambar 2.1.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029	18
Gambar 2.2.	Prioritas Nasional Tahun 2025-2029	19
Gambar 2.3.	Kontribusi Kementerian Pariwisata dalam Mewujudkan Misi dan Arah (Tujuan) Pembangunan yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045	20
Gambar 2.4.	Destinasi Pariwisata Prioritas	22
Gambar 2.5.	Program Unggulan Kementerian Pariwisata Tahun 2025	30
Gambar 2.6.	Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025	36
Gambar 2.7.	Perjanjian Kinerja Perubahan I Tahun 2025	38
Gambar 3.1.	Grafik Target Tahun 2024-2025 dan Realisasi Tahun 2025 Rasio PDB Pariwisata	43
Gambar 3.2.	Permenpar 6 Tahun 2025	44
Gambar 3.3.	Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi PP 28 Tahun 2025 dan Permenpar 6 Tahun 2025	44
Gambar 3.4.	Dokumentasi Kegiatan Rapat Konsinyering Penyusunan RPerpres IQTF	45
Gambar 3.5.	Dokumentasi Kegiatan FGD Penyusunan RPerpres IQTF	45
Gambar 3.6.	Dokumentasi Kegiatan Konsultasi Publik dan Rapat PAK Penyusunan RPerpres IQTF	46
Gambar 3.7.	Audiensi Menteri Pariwisata dengan OTA	48
Gambar 3.8.	Dokumentasi Kegiatan Forum Komunikasi Pengawasan Standar Usaha Pariwisata	49
Gambar 3.9.	Dokumentasi Kegiatan <i>Coaching Clinic</i> Penerapan Standar Usaha Jasa Boga dan Bar	50
Gambar 3.10.	Dokumentasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50
Gambar 3.11.	Dokumentasi Literasi Penerapan Standar Usaha Pariwisata	51

Gambar 3.12.	Dokumentasi Kegiatan Literasi Keuangan bagi Pelaku Usaha Pariwisata di Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang	52
Gambar 3.13.	Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Perluasan Akses Permodalan	54
Gambar 3.14.	Dokumentasi Katalog Peserta Program WISH Paket <i>Tour Gastronomy</i> Tahun 2025	55
Gambar 3.15.	Dokumentasi Kegiatan Demoday Wonderful Indonesia <i>Scale-up Hub</i>	55
Gambar 3.16.	Grafik Target Tahun 2024-2025 dan Realisasi Tahun 2025 Devisa Pariwisata	59
Gambar 3.17.	Dokumentasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata di Banyuwangi, Bali, dan Kota Batam	62
Gambar 3.18.	Dokumentasi Pendampingan di Geopark Danau Toba dan Rinjani-Lombok	63
Gambar 3.19.	Forum Diskusi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat dan Konsep <i>High Quality Sustainable Tourism</i>	63
Gambar 3.20.	RIDPN 10 Destinasi Prioritas Sebagai Acuan Pengembangan	65
Gambar 3.21.	Dokumentasi Kegiatan Koordinasi dengan WEF dan Kementerian/Lembaga	67
Gambar 3.22.	Draf Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan IPKN dan Draf Keputusan Menteri Pariwisata tentang Kerangka Penilaian IPKN	68
Gambar 3.23.	Grafik Target Tahun 2024-2025 dan Realisasi Tahun 2025 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	71
Gambar 3.24.	Dokumentasi Kegiatan CAP-CSA 2025	72
Gambar 3.25.	Dokumentasi Kegiatan SEABEF 2025	72
Gambar 3.26.	Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 6 Kementerian	73
Gambar 3.27.	Dokumentasi Kegiatan BIMP-EAGA <i>Tourism Village Forum</i>	74
Gambar 3.28.	Grafik Target Tahun 2024-2025 dan Realisasi Tahun 2025 Tenaga Kerja Pariwisata	77
Gambar 3.29.	Dokumentasi Pembahasan Insentif PPh 21 DTP dan Program Magang	78
Gambar 3.30.	Dokumentasi Kegiatan Wisuda Politeknik Pariwisata	79
Gambar 3.31.	Dokumentasi Platform https://pintar.kemenpar.go.id/	86
Gambar 3.32.	Grafik Target Tahun 2024-2025 dan Realisasi Tahun 2025 Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	89
Gambar 3.33.	Dokumentasi ASEAN Tourism Forum (ATF)	90
Gambar 3.34.	Dokumentasi ATF TRAVEX 2025	90
Gambar 3.35.	Dokumentasi ITB Berlin 2025	91

Gambar 3.36.	Dokumentasi WTM London 2025	91
Gambar 3.37.	Dokumentasi SATTE 2025	91
Gambar 3.38.	Dokumentasi NATAS <i>Holiday</i> 2025	92
Gambar 3.39.	Dokumentasi MATTA <i>Fair</i> 2025	92
Gambar 3.40.	Dokumentasi ITB India 2025	92
Gambar 3.41.	Dokumentasi ITB Asia 2025	93
Gambar 3.42.	Dokumentasi <i>Business Matching</i> Amerika Serikat	93
Gambar 3.43.	Dokumentasi <i>Business Matching</i> Minangkabau <i>Travel Mart</i>	93
Gambar 3.44.	Dokumentasi WITF 2025	94
Gambar 3.45.	Dokumentasi <i>Sales Mission</i> MICE	94
Gambar 3.46.	Dokumentasi <i>Business Matching</i> Timur Tengah	94
Gambar 3.47.	Dokumentasi BMTX 2025	95
Gambar 3.48.	Dokumentasi Famtrip Pasar Malaysia	95
Gambar 3.49.	Dokumentasi KST dengan Klook	96
Gambar 3.50.	Dokumentasi Kegiatan Fasilitas Industri SWWICE 2025	97
Gambar 3.51.	Dokumentasi Kegiatan <i>International Halal Tourism Summit</i>	98
Gambar 3.52.	Dokumentasi Kegiatan AIME 2025	98
Gambar 3.53.	Dokumentasi <i>Borobudur Marathon</i> 2025	100
Gambar 3.54.	Grafik Target Tahun 2024-2025 dan Realisasi Tahun 2025 Perjalanan Wisatawan Nusantara	103
Gambar 3.55.	Dokumentasi Pameran Edutrip Desa Wisata	104
Gambar 3.56.	Dokumentasi Pameran BBWI 2025	104
Gambar 3.57.	Dokumentasi Kegiatan <i>Karisma Event Nusantara</i> 2025	106
Gambar 3.58.	Dokumentasi Kegiatan PENTAS Tahun 2025	106
Gambar 3.59.	Dokumentasi Kegiatan <i>Mandalika Racing Series</i> 2025	107
Gambar 3.60.	Grafik Target Tahun 2024-2025 dan Realisasi Tahun 2025 Indeks Reformasi Birokrasi	110
Gambar 3.61.	<i>Kick Off Meeting</i> Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	113
Gambar 3.62.	Pertemuan Rutin Tim RB	113
Gambar 3.63.	Program Unggulan Kementerian Pariwisata Tahun 2025	121
Gambar 3.64.	Gerakan Wisata Bersih Tahun 2025	124
Gambar 3.65.	<i>Revamping Website</i> indonesia.travel	125
Gambar 3.66.	Program <i>Wonderful Indonesia Gourmet</i> (WIG) 2025	126
Gambar 3.67.	Program <i>Wonderful Indonesia Wellness</i> (WIW) 2025	127
Gambar 3.68.	Program FoodStartup Indonesia (FSI) 2025	127
Gambar 3.69.	Peluncuran Buku "Wisata Rasa di Bumi Pasundan"	128

Gambar 3.70.	Peluncuran Buku " <i>Wellness Journey Across the Java Wonders</i> "	129
Gambar 3.71.	Peluncuran Buku " <i>Wonderful Indonesia Diving Directory</i> "	129
Gambar 3.72.	Program <i>Event by Indonesia</i> Tahun 2025	130
Gambar 3.73.	Sertifikasi Desa Wisata (Sertidewi) Berkelanjutan 2025	132
Gambar 3.74.	Penetapan Program Unggulan Kemenpar dalam Pelaksanaan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	134
Gambar 3.75.	Berbagai Penghargaan yang diraih oleh Kemenpar di Bidang Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan	135
Gambar 3.76.	Penghargaan yang diraih dalam Rangka Pengembangan Pariwisata	135
Gambar 3.77.	Penghargaan MICHELIN <i>Keys</i> dan <i>World's 50 Best</i> 2025	136
Gambar 3.78.	Desa Wisata Pemuteran dan Desa Wisata Osing Kemiren Peraih Penghargaan <i>Best Tourism Villages 2025 UN Tourism</i>	137
Gambar 3.79.	Destinasi Wisata Raja Ampat	137
Gambar 3.80.	Menteri Pariwisata Menerima Penghargaan La Liste	138
Gambar 3.81.	Desa Wisata Peraih Penghargaan ASEAN <i>Tourism Awards</i> 2025	138
Gambar 3.82.	Dokumentasi Penerima Penghargaan <i>Wonderful Indonesia Awards</i> pada tahun 2025	139
Gambar 3.83.	Dukungan dan Realisasi Kegiatan Pendukung SDGs	140
Gambar 3.84.	Dokumentasi Penganugerahan PIMTI AWARD 2025	144
Gambar 3.85.	Dukungan dan Realisasi Kegiatan Pendukung OPPKPKE	145
Gambar 3.86.	Kerjasama Strategis Kementerian Pariwisata dengan K/L lainnya Tahun 2025	147

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kementerian Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Pariwisata.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2026

Inspektur



(Nina Azhari)

NIP. 19690118 199403 2 011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kementerian Pariwisata dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 198 tentang Kementerian Pariwisata, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Pariwisata telah merumuskan Rencana Strategis untuk periode 2025-2029, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2025. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029, Visi Kementerian Pariwisata sebagai kondisi yang diharapkan terwujud pada tahun 2029 ini tidak dapat dilepaskan dari visi pembangunan nasional tahun 2025-2029. Pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Kementerian sebagai bagian dari mesin pembangunan nasional, dengan demikian, merumuskan visi perencanaan strategis tahun 2025-2029 yang berkontribusi pada visi pembangunan nasional, sebagai berikut: **"Pariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi ini mencerminkan arah strategis pembangunan sektor pariwisata sebagai pilar penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Misi Kementerian Pariwisata juga selaras dengan Misi Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2024-2029, yaitu 8 misi yang disebut sebagai Asta Cita. Sektor pariwisata pada Tahun 2025 terus berperan strategis dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Secara langsung, pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional Nomor 3 dan turut berkontribusi pada Prioritas Nasional Nomor 2, 4, 6, dan 8. Melalui sektor pariwisata, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing bangsa di tingkat global.

Misi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029, yang mendukung pencapaian misi pembangunan nasional sebagai berikut: (1) Mendorong pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata; dan (2) Memperkuat tata kelola kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pariwisata guna mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan misi Kementerian, ditetapkan tujuan strategis yang mencerminkan hasil jangka menengah yang ingin dicapai selama periode 2025-2029, yaitu: (1) Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata; dan (2) Meningkatkan Kualitas Governans Kelembagaan dan SDM Aparatur.

Sasaran strategis merupakan fungsi keberhasilan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 pada tingkat *ultimate outcome*, yaitu kondisi yang dicapai sebagai kontribusi nyata dari program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata. Sasaran strategis Kementerian Pariwisata disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan/atau faktor pendukung keberhasilan utama pencapaian

sasaran pembangunan pada RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata.

Dari kedua pendekatan tersebut, Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata disusun dengan menggunakan kerangka logis baik ke atas (sebagai dukungan atas ketercapaian tujuan strategis) maupun ke bawah (sebagai kondisi akhir dari sasaran program dan sasaran kegiatan). Dalam menjalankan rencana strategis, Kementerian Pariwisata menargetkan 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) yang diukur dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS).

Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja SS dan IKSS yang telah dicapai pada tahun 2025. Rencana kinerja dan penetapan kinerja merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029, yang telah ditetapkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		TARGET 2025	TARGET 2029
SS.1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata	IKSS.1.1	Rasio PDB Pariwisata (persen)	4,20 – 4,30*	4,90 – 5,00
		IKSS.1.2	Devisa Pariwisata (miliar USD)	17,1 – 18,3*	32,0 – 39,4
		IKSS.1.3	Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/kunjungan)	1.220*	1.600-1.672
		IKSS.1.4	Tenaga Kerja Pariwisata (juta orang)	25,75	29,00
		IKSS.1.5	Kunjungan Wisatawan Mancanegara (juta kunjungan)	14,0 – 15,0*	20,0 – 23,5
		IKSS.1.6	Perjalanan Wisatawan Nusantara (juta perjalanan)	1.084	1.500
SS.2	Meningkatnya Kualitas Governans Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur	IKSS.2.1	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	86,5	90,5

Keterangan:

**) Target sesuai Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025*

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pariwisata diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan dimaksud memuat berbagai capaian yang diperoleh Kementerian Pariwisata sesuai dengan Perjanjian Kinerja Menteri Pariwisata.

Tahun 2025 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029. Rangkuman realisasi pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Pariwisata menunjukkan capaian sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		SATUAN	TARGET RPJMN 2025*)	TARGET RKP 2025 **)	TARGET PERJANJIAN KINERJA	REALISASI 2025	CAPAIAN
SS.1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan	IKSS.1.1	Rasio PDB Pariwisata	Persen	4,5 – 4,6	4,2 – 4,3	4,2	3,97 ¹⁾	94,52%
		IKSS.1.2	Devisa Pariwisata	Miliar USD	19,0 – 22,1	17,1 – 18,3	17,1	18,28 ²⁾	106,87%
		IKSS.1.3	Pengeluaran wisatawan mancanegara	USD/kunjungan	1.300 – 1.381,3	1.220	1.220	1.267,07 ⁴⁾	103,20%
		IKSS.1.4	Tenaga Kerja Pariwisata	Juta orang	25,75	25,75	25,75	25,91 ³⁾	100,62%
		IKSS.1.5	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta kunjungan	14,6 – 16,0	14 – 15	14	15,39 ⁴⁾	109,93%
		IKSS.1.6	Perjalanan Wisatawan Nusantara	Juta Perjalanan	1.084	1.084	1.084	1.200,33 ⁴⁾	110,73%
SS.2	Meningkatnya Kualitas Governans Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur	IKSS.2.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	86,5	86,67 ⁵⁾	100,19%

Keterangan:

- 1) *Data sangat sementara hanya PDB penyediaan akmamin dan angkutan udara TW I-IV 2025*
- 2) *Data sementara NPI Bank Indonesia TW I-IV 2025, Februari 2026*
- 3) *Data sementara, Sakernas Agustus 2025 Badan Pusat Statistik*
- 4) *Data Bahan Tayang Berita Resmi Statistik No. 13/02/Th. XXIX, 2 Februari 2026 terkait Perkembangan Pariwisata Desember 2025*
- 5) *Data sementara berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN-RB prasangah*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tujuh IKSS, kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian yang positif dan berada pada jalur pencapaian target. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS maupun BI, beberapa indikator kinerja sasaran strategis dengan capaian diatas 100% antara lain Devisa Pariwisata (106,87%), Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (103,20%), Tenaga Kerja Pariwisata (100,62%), Kunjungan Wisatawan Mancanegara (109,93%), Perjalanan Wisatawan Nusantara (110,73) dan Indeks Reformasi Birokrasi (100,19%), dan indikator kinerja sasaran strategis dengan capaian antara 80%-100% yaitu Rasio PDB Pariwisata (94,52%). Perlu dicatat bahwa pada saat LAKIN ini disusun capaian Rasio PDB Pariwisata, Devisa Pariwisata, dan Tenaga Kerja Pariwisata serta Indeks Reformasi Birokrasi masih bersifat sementara, sedangkan khusus untuk Rasio PDB Pariwisata, data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang masih akan direviu melalui mekanisme *Tourism Satellite Account (TSA)* dalam kurun waktu hingga dua tahun ke depan.

Berdasarkan proyeksi Kementerian Pariwisata terhadap tren capaian hingga akhir Tahun 2025, seluruh indikator kinerja tersebut diperkirakan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, penetapan capaian akhir tetap menunggu hasil rilis resmi dan final yang diterbitkan oleh instansi terkait sebagai dasar evaluasi kinerja yang sah dan akuntabel.

Capaian kinerja IKSS Tahun 2025 dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung sekaligus tantangan struktural dan eksternal. Faktor pendukung utama berasal dari penguatan kebijakan dan program strategis Kementerian Pariwisata, khususnya melalui implementasi program unggulan seperti Gerakan Wisata Bersih, *Event by Indonesia*, Pariwisata Berkualitas, *Tourism 5.0*, dan pengembangan Desa Wisata yang mampu mendorong peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, serta pengeluaran wisatawan mancanegara. Pemulihan pariwisata global sebagaimana dilaporkan *UN Tourism* yang mencatat peningkatan perjalanan internasional sebesar 5 persen turut menciptakan momentum positif bagi pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Selain itu, penguatan kolaborasi lintas sektor, perbaikan tata kelola destinasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata memberikan kontribusi terhadap tercapainya sebagian besar indikator kinerja utama.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang mempengaruhi capaian kinerja beberapa indikator strategis, khususnya Rasio PDB Pariwisata dan Devisa Pariwisata yang berdasarkan data sementara belum sepenuhnya mencapai target. Tantangan tersebut tidak hanya bersumber dari faktor jangka pendek, seperti ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, tekanan inflasi internasional, serta perubahan preferensi wisatawan yang semakin selektif dan sensitif terhadap harga, tetapi juga dipengaruhi oleh tantangan struktural jangka panjang. Tantangan jangka panjang tersebut meliputi pembangunan destinasi dan infrastruktur pariwisata yang belum merata, keterbatasan konektivitas transportasi menuju dan antar destinasi, serta kebijakan nasional lintas sektor yang belum sepenuhnya selaras dan mendukung daya saing sektor pariwisata.

Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Pariwisata untuk terus memperkuat kebijakan berbasis data, meningkatkan kualitas dan diferensiasi produk wisata bernilai tambah tinggi, serta mempercepat pemerataan pengembangan destinasi melalui penguatan infrastruktur dan konektivitas, sekaligus mendorong sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional secara inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.



1

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- Mandat, dan Peran Strategis, serta Permasalahan Utama
- Sistematika Laporan



1.1. LATAR BELAKANG

Pada Tahun 2025, sektor pariwisata global menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang semakin kuat, sebagaimana dilaporkan UN Tourism yang mencatat lebih dari 1,1 miliar perjalanan internasional pada sembilan bulan pertama 2025 atau meningkat sekitar 5% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Kawasan Asia-Pasifik menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 8% meskipun masih sekitar 10% di bawah level pra-pandemi 2019, sementara Eropa tetap menjadi destinasi terbesar dunia dengan 625 juta kedatangan dan pertumbuhan 4%, Afrika mencatat lonjakan signifikan (Afrika Utara 11% dan Sub-Sahara 10%), serta Amerika Selatan dan Amerika Tengah tumbuh masing-masing 9% dan 3%, menunjukkan semakin kuatnya permintaan perjalanan global pascapandemi.

Momentum pemulihan global tersebut turut mempengaruhi kinerja sektor pariwisata Indonesia pada Tahun 2025, yang menunjukkan penguatan aktivitas dan perluasan dampak ekonomi dibandingkan Tahun 2024. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional relatif stabil, data sementara BPS yang mencatat kontribusi pariwisata sebesar 3,97% terhadap PDB Triwulan I-IV Tahun 2025. Dari sisi nilai ekonomi, devisa pariwisata meningkat dari US\$16,71 miliar Triwulan I-IV tahun 2024 menjadi US\$18,28 miliar Triwulan I-IV 2025, diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja pariwisata dari 25,01 juta orang tahun 2024 menjadi 25,91 juta orang berdasarkan SAKERNAS BPS 2025.

Dari sisi permintaan, kinerja sektor pariwisata menunjukkan tren pertumbuhan yang positif pada tahun 2025. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dari 13,89 juta kunjungan (Januari–Desember 2024) menjadi 15,39 juta kunjungan (Januari–Desember 2025) atau tumbuh sekitar 10,8%, sementara perjalanan wisatawan nusantara melonjak dari 1.021,08 juta perjalanan (Januari–Desember 2024) menjadi 1.200,33 juta perjalanan (Januari–Desember 2025) atau tumbuh sekitar 17,6%. Sejalan dengan peningkatan tersebut, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara Triwulan I-IV tahun 2025 tercatat mencapai US\$1.267,07 per kunjungan, yang semakin memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional.

Capaian tersebut diperkuat melalui implementasi lima program unggulan Kementerian Pariwisata yaitu Gerakan Wisata Bersih, Tourism 5.0, Pariwisata Berkualitas, Event by Indonesia, dan Desa Wisata di mana penyelenggaraan Karisma Event Nusantara dan berbagai event nasional berhasil mendorong perputaran ekonomi lebih dari Rp23,76 triliun serta pengembangan 6.153 Desa Wisata memperkuat pemerataan ekonomi dan kualitas destinasi berbasis komunitas, ditopang pula oleh raihan 154 penghargaan internasional, penguatan regulasi melalui tujuh produk hukum strategis termasuk Perubahan Ketiga Undang-Undang Kepariwisata dan Peraturan Menteri tentang Satu Data Pariwisata, serta peningkatan sinergi lintas sektor dan kerja sama internasional strategis dengan Uni Emirat Arab, Tiongkok, dan Prancis guna memperluas pasar dan peluang investasi pariwisata Indonesia.

Penyusunan LAKIN Kementerian Pariwisata Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIN ini disusun sebagai instrumen akuntabilitas atas pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi

Kementerian Pariwisata sepanjang Tahun 2025, sekaligus sebagai sarana evaluasi kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan kepariwisataan nasional.

Seluruh capaian kinerja yang disajikan dalam LAKIN ini mengacu pada Perjanjian Kinerja Menteri Pariwisata Tahun 2025, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil.

1.2. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sejalan dengan prinsip *structure follows strategy*, struktur kelembagaan Kementerian Pariwisata didesain dengan dasar untuk memastikan ketercapaian visi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Pariwisata periode 2025-2029 secara optimal. Hal serupa juga berlaku pada elemen-elemen kelembagaan lainnya seperti proses bisnis, sumber daya manusia, dan mekanisme kerja. Tidak hanya berkaitan dengan kinerja pembangunan di sektor pariwisata, kelembagaan juga merupakan elemen penting dalam tema pembangunan nasional 2025-2029 yaitu Penguatan Fondasi Transformasi, khususnya agenda transformasi tata kelola.

Berpijak pada sasaran strategis yang telah dirumuskan, amanat undang-undang terkait pembangunan di bidang pariwisata, serta hakikat kelembagaan Kementerian, maka pada tahun 2025, Menteri Pariwisata mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata tersebut, Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

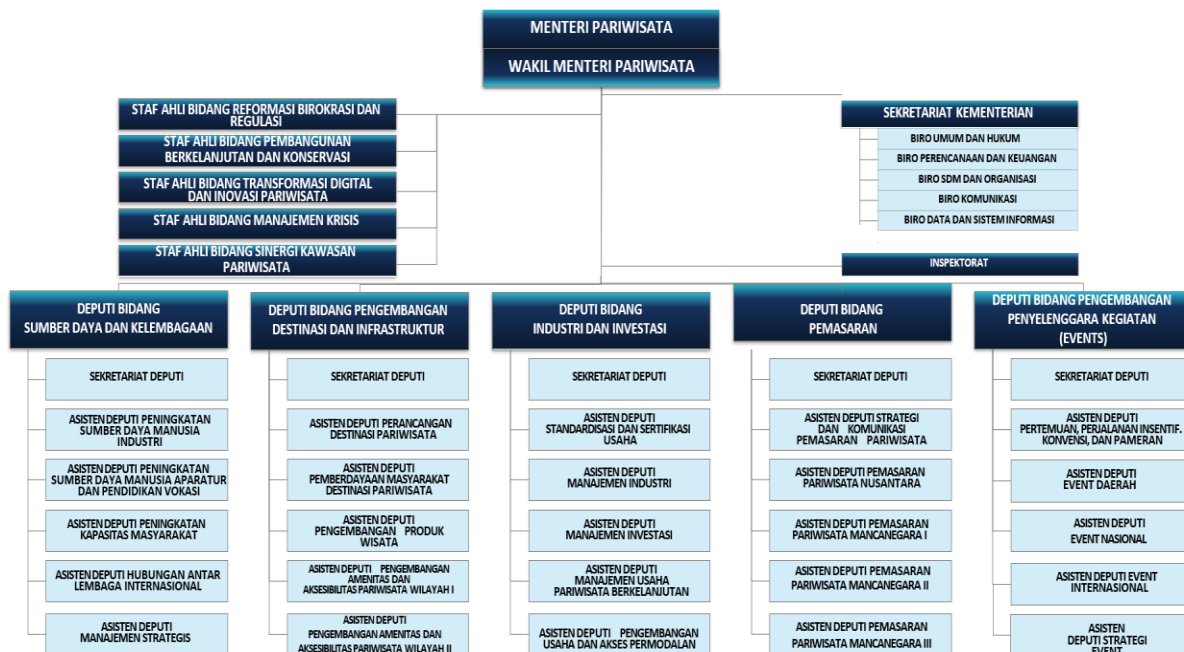
Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan tujuh fungsi, antara lain:

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang sumber daya dan kelembagaan, pengembangan destinasi dan infrastruktur, industri dan investasi, pemasaran, serta pengembangan penyelenggara kegiatan (*events*);
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan kelembagaan, pengembangan destinasi dan infrastruktur, industri dan investasi, pemasaran, serta pengembangan penyelenggara kegiatan (*events*);
- 3) penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;
- 4) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- 5) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- 6) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian;
- b. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya dan kelembagaan pariwisata;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata;
- d. Deputi Bidang Industri dan Investasi, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri dan investasi pariwisata;
- e. Deputi Bidang Pemasaran, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemasaran di bidang pariwisata;
- f. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (*Events*), yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan penyelenggara kegiatan (*events*) pariwisata;
- g. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang reformasi birokrasi dan regulasi;
- h. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pembangunan berkelanjutan dan konservasi;
- i. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang transformasi digital dan inovasi pariwisata;
- j. Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang manajemen krisis;
- k. Staf Ahli Bidang Sinergi Kawasan Pariwisata, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sinergi kawasan pariwisata; dan
- l. Inspektorat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Berikut struktur organisasi Kementerian Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025:



Sumber: Permenpar Nomor 1/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata

Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025

1.3. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

A. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Sebagai bagian dari pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan nasional, Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2024-2029 telah menetapkan **delapan misi yang disebut sebagai Asta Cita**, yaitu:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- 4) Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

- 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



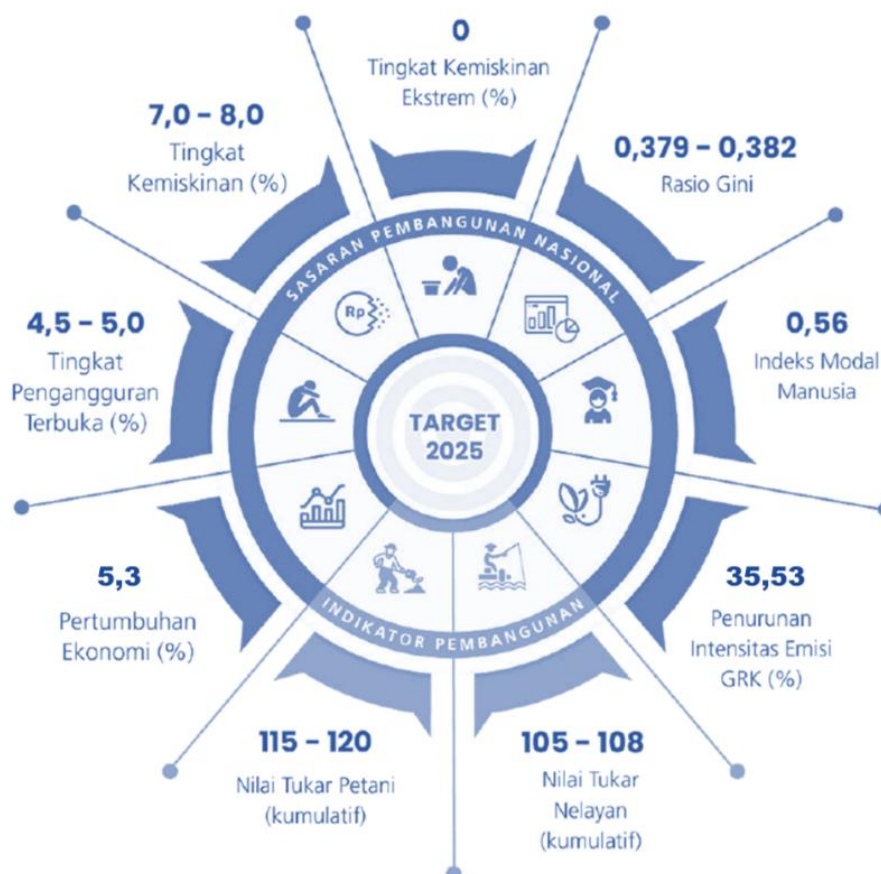
Gambar 1.2. Delapan Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2024-2029

Pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas yang dituangkan dalam 8 Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029. Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk mendukung pencapaian Misi Asta Cita Nomor 3, yaitu "Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur". Selain itu, sektor pariwisata juga turut berkontribusi pada Misi Asta Cita Nomor 2, 4, 6 dan 8.

Delapan Asta Cita diturunkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Merujuk pada RPJMN Tahun 2025-2029 sektor pariwisata difokuskan mendukung pencapaian PN 3 yaitu, "Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi". Untuk mencapai PN 3 maka ditetapkan Program Prioritas (PP) sektor pariwisata sekaligus mandat dan peran strategis Kementerian Pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan yaitu, "Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan".

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan tema adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

**Tema RKP Tahun 2025:
"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**



Gambar 1.3. Tema dan Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro RKP Tahun 2025, tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan *Gross National Income* per kapita (*Atlas Method*) menjadi US\$5.410 atau bertahan pada kategori *upper-middle income countries* di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Tabel 1.1. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2025
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% , yoy): Akhir Periode	2,5 ± 1,0 ^{a)}
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	16.000 – 16.900 ^{b)}

No	Indikator	Sasaran 2025
3	Cadangan Devisa (miliar USD)	162,40
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,4
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,78) ^d
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	20,8
7	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,2 – 4,3
8	Devisa Pariwisata (miliar USD)	17,10 – 18,30
9	Pendapatan Negara (% PDB)	12,36
10	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,24
11	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,26) ^{c) d)}
12	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,53) ^{c) d)}
13	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,15 ^{c)}
14	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	5,61
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.905,60
16	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	855,9

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2025

Keterangan:

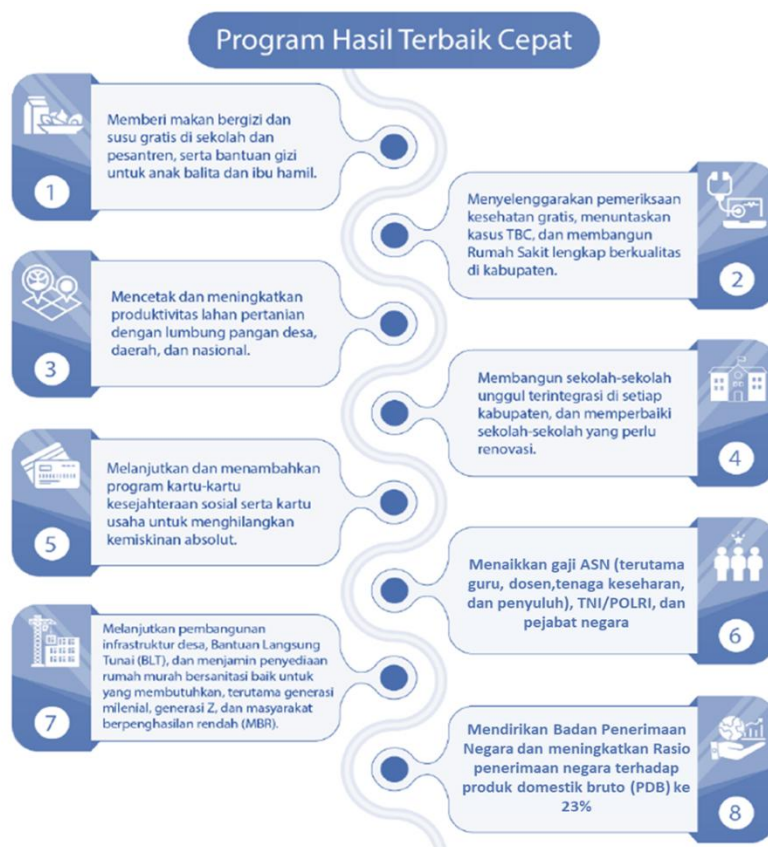
- a. Kesepakatan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 7 Februari 2025;
- b. Mempertimbangkan perkembangan dan Nilai Tukar Rupiah hingga April 2025;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
- d. Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.

Berdasarkan Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025 di atas, rasio produk domestik bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60 persen serta diiringi oleh peningkatan devisa pariwisata mencapai US\$22,10 miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025.

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/ *Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Sebagai tahapan pertama dalam RPJPN 2025–2045 dan penjabaran tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, estafet pembangunan perlu dilakukan secara akseleratif untuk menjaga kesinambungan

kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada RKP Tahun 2025 disusun 83 Kegiatan Prioritas Utama yang menjadi penekanan, termasuk di dalamnya 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan *output* signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.



Gambar 1.4. Program Hasil Terbaik Cepat dalam RKP Tahun 2025

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

Tahun 2025 terdapat 13 program prioritas Presiden antara lain (a) Makan Bergizi Gratis; (b) Sekolah Rakyat; (c) Sekolah Unggulan Garuda; (d) Pemeriksaan Kesehatan Gratis; (e) Penuntasan Tuberkulosis; (f) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; (g) Kartu Kesejahteraan; (h) Perumahan; (i) Lumbung Pangan dan Cadangan Pangan; (j) Transisi Energi; (k) Hilirisasi; (l) Pariwisata; serta (m) Pengelolaan Persampahan. Dari 13 program prioritas Presiden yang dilakukan pengendalian berbasis manajemen risiko tersebut salah satunya yaitu Pariwisata dimana memfokuskan pada Percepatan pembangunan DPP Lombok-Gili Tramena dan Labuan Bajo.

B. PERMASALAHAN UTAMA

Terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan utama pariwisata Indonesia, antara lain:

1. Kebijakan yang belum mendukung daya saing pariwisata

- Kebijakan Bebas Visa kunjungan (BVK) untuk 160+ negara (sebelum COVID) menjadi 13 negara (saat ini); padahal devisa pariwisata jauh melebihi nilai PNBPN dari aplikasi visa.
- Kebijakan yang belum sinkron lintas Kementerian/Lembaga.
- Perencanaan yang kurang matang dan tata kelola yang kurang baik memicu terjadinya *over tourism*.

2. Konektivitas sebagai kendala dalam akses wisata

- **Udara:** Rute penerbangan terbatas dan jumlah pesawat lebih sedikit dibandingkan sebelum pandemi.
- **Laut:** Kapasitas dan operasional pelabuhan belum optimal untuk wisata.
- **Darat:** Masih banyak daerah yang belum terhubung ke *hub* dengan baik.

3. Pengembangan infrastruktur yang belum optimal dan minim kesadaran wisata berkelanjutan

- Berbagai destinasi, termasuk KEK, masih kekurangan infrastruktur dasar.
- Kesadaran masyarakat akan wisata berkelanjutan masih rendah, sehingga kelestarian lingkungan pada destinasi wisata belum terjaga secara optimal.

4. Tenaga kerja pariwisata yang belum sesuai kebutuhan

- Tenaga kerja yang belum memenuhi kebutuhan industri dengan *adaptability* tinggi.

5. Tata kelola destinasi yang lemah

- Rendahnya kapasitas dan kualitas karena terdapat perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan.
- Keterbatasan daya dukung khususnya di Indonesia Timur dan rendahnya pelibatan komunitas lokal yang berisiko menyebabkan degradasi budaya.

6. Iklim investasi yang kurang mendukung

- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) belum dapat menarik investasi yang mencukupi.
- Skema investasi kurang kompetitif dibandingkan dengan negara pesaing, bahkan lintas daerah (contoh: Badan Pelaksana Otorita Kementerian Pariwisata vs IKN).

7. Persaingan yang semakin ketat

- Negara di Asia Tenggara semakin agresif dalam pemasaran wisata.
- Strategi pemasaran yang lebih canggih dan adaptif dibutuhkan agar tetap kompetitif.

8. Daya beli masyarakat yang menurun

- Perlambatan ekonomi, penurunan pendapatan, dan ketidakpastian keuangan mengurangi minat wisata domestik.

9. Bencana alam dan perubahan iklim

- Kurangnya sistem mitigasi dan penanganan krisis yang efektif terhadap bencana alam dapat menurunkan kepercayaan wisatawan.

10. Ketidakstabilan politik

- **Internal:** Ketidakpastian politik dalam negeri, seperti perubahan kebijakan, potensi demonstrasi dapat menurunkan kepercayaan wisatawan domestik maupun mancanegara
- **Eksternal:** Ketegangan geopolitik dan konflik antarnegara berpotensi menurunkan persepsi keamanan dan mengurangi kunjungan wisatawan mancanegara dan minat investor asing

11. Sampah

- Infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah di destinasi wisata masih terbatas.
- Perilaku masyarakat dan wisatawan yang cenderung membuang sampah sembarangan dapat mempengaruhi kenyamanan wisatawan.

12. Efisiensi Anggaran

- Pemangkasan anggaran yang terjadi di berbagai sektor publik membatasi ruang gerak program, termasuk dukungan lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk pengembangan hal-hal yang mendorong pariwisata.

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan pariwisata Indonesia tersebut, Kementerian Pariwisata terus mengupayakan sinergi lintas K/L dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, guna melakukan mitigasi isu, permasalahan dan tantangan dalam mengembangkan sektor pariwisata secara optimal.

1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan umum tentang latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kementerian Pariwisata, mandat dan peran strategis serta permasalahan utama.

B. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi uraian tentang rencana strategis, prioritas nasional, rencana kerja dan anggaran Tahun 2025, serta perjanjian kinerja Menteri Pariwisata.

C. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi uraian tentang capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran 2025, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain, dan evaluasi internal.

D. Bab IV Penutup

Bab ini berisi uraian tentang hasil kinerja Kementerian Pariwisata pada Tahun 2025 dan rekomendasi serta masukan untuk perbaikan rencana kerja Kementerian Pariwisata di Tahun 2026.

2

PERENCANAAN KINERJA

- Rencana Strategis Tahun 2025-2029
- Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2025
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025
- Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025



2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025, merupakan perencanaan Kementerian Pariwisata untuk periode 5 tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMN 2025-2029.

Berdasarkan Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 visi dan misi Kementerian Pariwisata dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 serta Presiden, sedangkan tujuan ditetapkan untuk mewujudkan misi Kementerian Pariwisata dimana mencerminkan hasil jangka menengah yang ingin dicapai mewujudkan misi Kementerian Pariwisata. Tujuan tersebut menjadi landasan perumusan sasaran strategis, indikator kinerja, serta arah kebijakan Kementerian Pariwisata dalam mendukung pembangunan pariwisata nasional yang berkualitas dan berkelanjutan.

A. VISI KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2025-2029

Pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi besar ini terbagi ke dalam 4 (empat) tahap, dengan tahap 1 (satu) periode tahun 2025-2029 memiliki tema "Penguatan Transformasi". Adapun pembangunan tahun 2025-2029 sesuai dengan visi Presiden terpilih yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Kementerian sebagai bagian dari mesin pembangunan nasional, dengan demikian, merumuskan visi perencanaan strategis tahun 2025-2029 yang berkontribusi pada visi pembangunan nasional, sebagai berikut:

**Visi Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029:
"Pariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan dalam Mendukung
Percepatan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045"**

Visi ini mencerminkan arah strategis pembangunan sektor pariwisata sebagai pilar penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Frasa "pariwisata yang berkualitas" merujuk pada pengembangan pariwisata yang tidak semata mengandalkan jumlah kunjungan, tetapi lebih menekankan pada peningkatan nilai tambah ekonomi, termasuk kontribusi terhadap PDB, pendapatan dari wisnus dan wisman (devisa), investasi, tenaga kerja, serta daya saing kepariwisataan. Wisatawan yang disasar adalah mereka yang mendorong produktivitas ekonomi, pelestarian budaya, serta keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, "pariwisata berkelanjutan" menggambarkan pendekatan pembangunan yang berpijak pada prinsip keberlanjutan secara ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Ini berarti setiap aktivitas pariwisata harus mampu menjaga kelestarian alam dan budaya, menjamin partisipasi aktif masyarakat lokal, memperkuat identitas nasional, serta menjamin distribusi manfaat secara adil di antara pelaku pariwisata.

Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip SDGs dan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029.

Lebih jauh, frasa “mendukung percepatan transformasi ekonomi” menunjukkan bahwa pariwisata tidak hanya menjadi sektor andalan, tetapi juga sebagai pengungkit transformasi struktural menuju ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, dan keberlanjutan. Melalui penciptaan lapangan kerja, investasi, dan nilai tambah yang tinggi, sektor ini menjadi pendorong utama pertumbuhan inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, visi ini menempatkan sektor pariwisata sebagai katalisator dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045 yaitu negara maju yang berdaulat, adil, makmur, serta memiliki daya saing tinggi di tingkat global.

B. MISI KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2025-2029

Berdasarkan misi pembangunan nasional tersebut, rumusan misi Kementerian tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1:

Mendorong pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata

Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian untuk menjadikan pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui pendekatan yang menekankan pada kualitas, keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat. Pengembangan destinasi, promosi pariwisata, penyelenggaraan event, serta penguatan industri dan investasi diarahkan untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDB sektor pariwisata, perolehan devisa, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing kepariwisataan Indonesia di pasar global.

Misi 2:

Memperkuat tata kelola kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pariwisata guna mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Misi ini berfokus pada penguatan struktur kelembagaan kementerian dan peningkatan kualitas aparatur melalui reformasi birokrasi, transformasi digital, serta sistem pengelolaan berbasis kinerja dan data. Tata kelola yang baik dan SDM aparatur yang kompeten menjadi prasyarat utama bagi pelaksanaan program dan kebijakan yang efektif.

C. TUJUAN KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan misi Kementerian Pariwisata, ditetapkan tujuan strategis yang mencerminkan hasil jangka menengah yang ingin dicapai selama periode 2025–2029, yaitu:

Tujuan 1: Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata

Tujuan ini mencerminkan peran strategis pariwisata sebagai salah satu motor penggerak transformasi ekonomi nasional. Peningkatan kontribusi sektor ini diukur melalui pencapaian indikator ekonomi utama yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan devisa dari wisatawan. Diharapkan dengan nilai tambah yang didapatkan, maka akan menumbuhkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan dan pemajuan kebudayaan sebagai sumber daya pariwisata.

Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Governans Kelembagaan dan SDM Aparatur

Tujuan ini mencakup reformasi birokrasi internal, optimalisasi struktur organisasi, penerapan manajemen kinerja dan digitalisasi sistem yang mendukung pelayanan publik serta pengambilan keputusan berbasis data. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Tujuan tersebut menjadi landasan perumusan sasaran strategis, indikator kinerja, serta arah kebijakan Kementerian dalam mendukung pembangunan pariwisata nasional yang berkualitas dan berkelanjutan.

D. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2025-2029

Sasaran strategis merupakan fungsi keberhasilan Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 pada tingkat *ultimate outcome*, yaitu kondisi yang dicapai sebagai kontribusi nyata dari program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian. Sasaran strategis Kementerian disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan/atau faktor pendukung keberhasilan utama pencapaian sasaran pembangunan pada RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian.

Dari kedua pendekatan tersebut, sasaran strategis Kementerian disusun dengan menggunakan kerangka logis baik ke atas (sebagai dukungan atas ketercapaian tujuan strategis) maupun ke bawah (sebagai kondisi akhir dari sasaran program dan sasaran kegiatan). Sasaran Strategis Kementerian tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 (SS.1): Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan

Sasaran ini mencakup beberapa indikator kinerja utama sektor pariwisata yaitu rasio PDB pariwisata, devisa pariwisata, pengeluaran wisman, tenaga kerja pariwisata, kunjungan wisman dan perjalanan wisnus.

Sasaran Strategis (SS.2): Meningkatnya kualitas governans kelembagaan dan SDM aparatur

Sasaran ini diukur melalui peningkatan nilai indeks reformasi birokrasi, penerapan sistem manajemen kinerja secara menyeluruh, serta peningkatan integrasi dan efisiensi sistem kelembagaan berbasis data dan digitalisasi layanan.

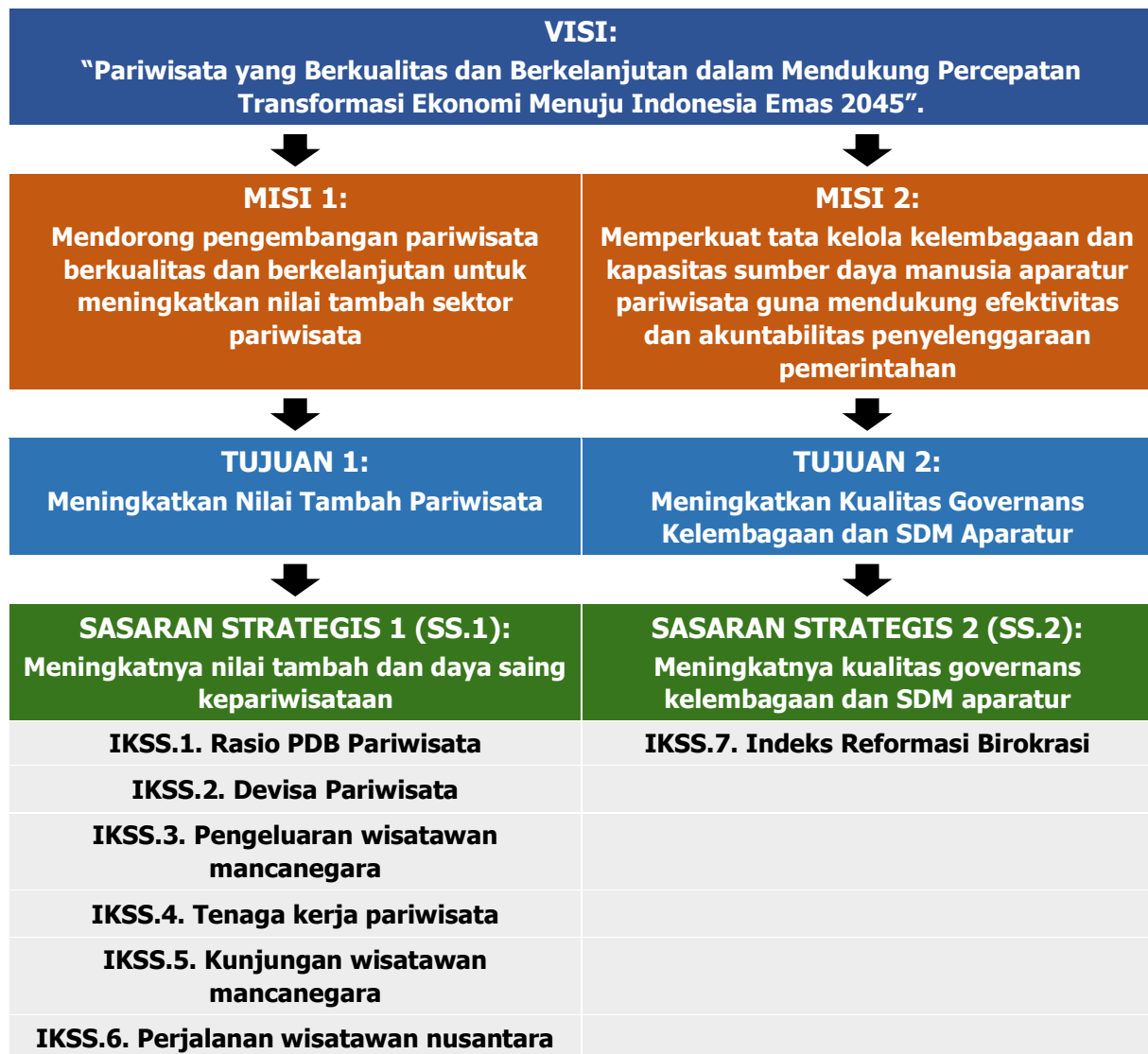
Dengan demikian, ukuran keberhasilan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenpar tahun 2025-2029 dapat dirumuskan seperti yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Keselarasannya dengan Indikator RPJMN Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	KESESUAIAN RPJMN
1. Meningkatkan nilai tambah pariwisata	SS.1. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata	IKSS.1. Rasio PDB Pariwisata	Indikator Program Prioritas RPJMN 2025-2029
		IKSS.2. Devisa Pariwisata	
		IKSS.3. Pengeluaran wisatawan mancanegara	
		IKSS.4. Tenaga kerja pariwisata	
		IKSS.5. Kunjungan wisatawan mancanegara	
		IKSS.6. Perjalanan wisatawan nusantara	
2. Meningkatkan kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur	SS.2. Meningkatkan kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur	IKSS.7. Indeks Reformasi Birokrasi	

Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenpar Tahun 2025-2029

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029, selanjutnya dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029

Sumber: Diolah dari Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenpar Tahun 2025-2029

2.2. PRIORITAS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bertujuan mencapai visi dan misi bernegara yaitu “Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Visi dan misi bernegara tersebut diterjemahkan menjadi visi RPJPN 2025-2045 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Dari visi tersebut, Kementerian memiliki peran dalam mencapai semua visi tersebut dan paling berkaitan dengan upaya mencapai Indonesia yang Bersatu, Maju, dan Berkelanjutan. Peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 mengusung paradigma transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang, berlandaskan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Langkah konkret operasionalisasi agenda transformasi mengawal Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui delapan prioritas nasional sebagai berikut:



Gambar 2.2. Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

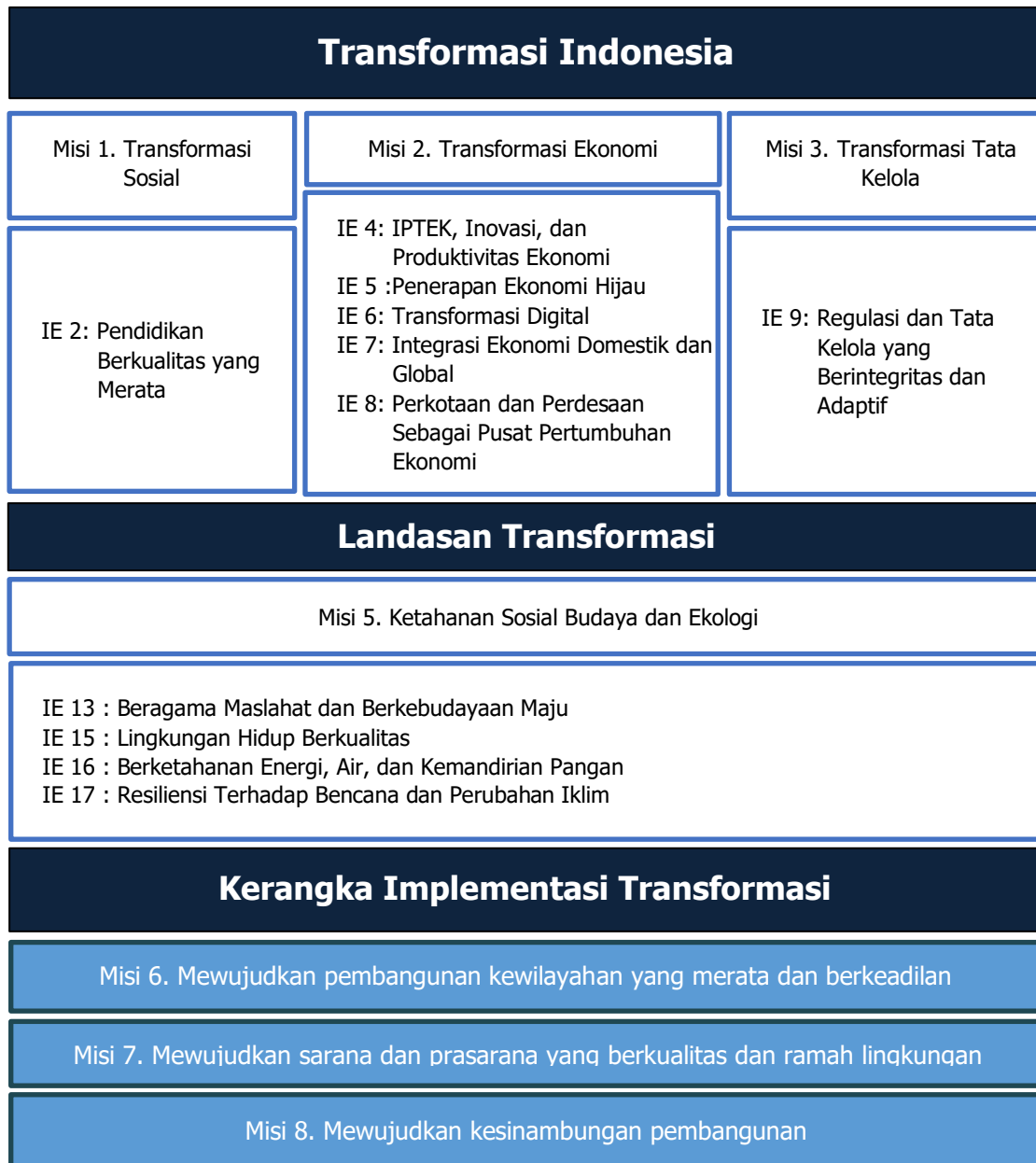
Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025 - 2029

Sejalan dengan visi RPJPN 2025-2045 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, Kementerian Pariwisata dalam Rencana Staregis Tahun 2025-2029 fokus pada mengembangkan pariwisata untuk menjaga persatuan dan mewedahi keberagaman budaya, bahasa dan adat istiadat Indonesia.

Program Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 mengarah pada penguatan kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata untuk mewujudkan Indonesia yang maju, dan mendorong penguatan sektor pariwisata yang tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang seimbang

dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup dan kelestarian budaya serta tata kelola pemerintahan yang baik.

RPJPN menyusun 8 misi agenda pembangunan transformasi menyeluruh dan 17 arah (tujuan) pembangunan Indonesia Emas (IE) dan Kementerian Pariwisata bertujuan untuk mendukung pencapaian 7 misi RPJPN tersebut.



Keterangan : IE = Indonesia Emas

Gambar 2.3. Kontribusi Kementerian Pariwisata dalam Mewujudkan Misi dan Arah (Tujuan) Pembangunan yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045

Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029

Pembangunan pariwisata dalam RPJPN 2025-2045 diarahkan melalui transformasi multi-sektoral, yaitu:

- 1) transformasi sosial, pariwisata yang didukung oleh SDM yang unggul, berdaya saing, dan berbasis keahlian;
- 2) transformasi ekonomi, pariwisata yang didukung produktivitas ekonomi dan pusat ekonomi dengan memperhatikan integrasi rantai pasok domestik serta transformasi digital;
- 3) transformasi tata kelola, pariwisata yang diperkuat oleh ekosistem, regulasi, dan partisipasi masyarakat; dan
- 4) ketahanan sosial budaya dan ekologi, pariwisata yang memperhatikan kemajuan kebudayaan dan kelestarian lingkungan serta ketahanan terhadap bencana.

Target capaian Kementerian Pariwisata dalam Renstra Kemenpar Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung pencapaian Agenda Pembangunan yang tercantum pada RPJPN yaitu rasio PDB Pariwisata dari 4,9%-5% di tahun 2029 menjadi 8% di tahun 2045 serta devisa pariwisata dari US\$32 miliar-US\$39,4 miliar pada tahun 2029 menjadi US\$100 miliar pada tahun 2045.

Selain selaras dengan RPJPN, dan merujuk pada RPJMN Tahun 2025-2029, rencana strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 bertujuan untuk mencapai PN 3 yaitu, "Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi". Indikator pencapaian prioritas nasional tersebut yaitu Rasio PDB Pariwisata 4,9%-5% dan devisa pariwisata US\$32 miliar-US\$39,4 miliar.

Untuk mencapai PN 3 maka ditetapkan Prioritas Pembangunan (PP) sektor pariwisata yaitu, "**Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan**", dengan sasaran yaitu, "Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan", dan indikator PP serta target capaian pada tahun 2029 sebagai berikut:

PN 3:	
"Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi"	
Prioritas Pembangunan (PP) Sektor Pariwisata:	
"Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan"	
1.	Pengeluaran wisman yaitu rata-rata belanja sebesar US\$ 1.600-1.672 per kunjungan
2.	Tenaga Kerja Pariwisata sejumlah 29 juta orang
3.	Indeks Pembangunan Pariwisata (<i>Travel and Tourism Development Index/TTDI</i>) pada peringkat 20 (<i>dua puluh</i>) besar dunia
4.	Kunjungan wisman sejumlah 20-23,59 juta kunjungan
5.	Perjalanan wisnus sejumlah 1,5 miliar perjalanan

Kementerian Pariwisata juga berkontribusi pada beberapa Kegiatan Prioritas (KP) yang difokuskan di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR), yaitu:

- 1) Percepatan pembangunan DPP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramen, Labuan Bajo, dan Danau Toba.
- 2) Pengembangan DPP Manado-Likupang, Bangka Belitung, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, dan Morotai.
- 3) Penguatan DPR Bali, *Greater* Jakarta, dan Kepulauan Riau.



Gambar 2.4. Destinasi Pariwisata Prioritas

Dengan sejumlah indikator KP, seperti: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor penyediaan akomodasi, dan makan minum untuk DPP dan DPR; Pendapatan dari wisatawan nusantara untuk DPP dan DPR; Devisa pariwisata untuk DPP dan DPR; Tenaga kerja pariwisata untuk DPP dan DPR; serta Investasi sektor pariwisata untuk DPP dan DPR.

Arah kebijakan percepatan pengembangan DPP dan penguatan DPR sesuai dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. Sebaran Destinasi Pariwisata Regeneratif dan Prioritas

Kegiatan Prioritas	Destinasi Prioritas	Visi Pembangunan	Key Tourism Area (KTA)	Tematik	Delineasi
Percepatan Pembangunan 4 Destinasi Pariwisata Prioritas	1 Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan Berkelas Dunia Berbasis Pelestarian Kearifan Budaya Jawa	Borobudur (Kab. Magelang), Yogyakarta (Kota Yogyakarta), Prambanan (Kab. Sleman dan Kab. Klaten) sesuai Perpres No. 88 Tahun 2024	Budaya, Urban <i>Heritage</i> , MICE	Kab. Magelang, Kab. Klaten, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta

Kegiatan Prioritas	Destinasi Prioritas	Visi Pembangunan	Key Tourism Area (KTA)	Tematik	Delineasi	
	2	Lombok-Gili Tramena	Sebagai Destinasi yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Inklusif serta Memberikan Pengalaman Budaya dan Alam yang Berkualitas	Gili-Senggigi, Pantai Selatan Mandalika, Mataram dskt, dan Rinjani sesuai Perpres No. 84 Tahun 2021	Alam, Geologi, Urban Heritage, <i>Adventure</i> dan Olahraga	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kota Mataram
	3	Danau Toba	Membangun dan Memajukan Tanah Leluhur, Oleh dan Bagi Seluruh Masyarakat	Parapat (Kab. Simalungun), Simanindo dan Pangururan (Kab. Samosir), Balige (Kab. Toba), Muara (Kab. Tapanuli Utara), Merek (Kab. Karo) sesuai Perpres No. 89 Tahun 2024	Alam, Geologi, Budaya, Urban <i>Heritage</i>	Kab. Toba, Kab. Simalungun, Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat
	4	Labuan Bajo	Sebagai Destinasi Wisata Berbasis Ekowisata yang Premium dan Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan yang Mendorong Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo (Kab. Manggarai Barat)	Alam, <i>Adventure</i> dan Olahraga, MICE	Kab. Manggarai Barat
Pengembangan 6 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	Manado-Likupang	Sebagai Simpul Pariwisata Bahari Asia Pasifik yang Berkelanjutan dan Bertumpu Pada Masyarakat	Manado-Bunaken, Likupang, Bitung-Lembeh, Tomohon, Tondano, Minahasa Pantai, Airmadidi	Alam, <i>Adventure</i> dan Olahraga	Kab. Minahasa Utara, Kab. Manado, Kab. Minahasa, Kab. Tomohon, Kota Bitung
	2	Bangka Belitung	Menjadi Destinasi Wisata Kelas Dunia Berbasis Bahari dan Geopark yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat	Mentok-Teritip, Belinyu, Sungailiat, Pangkalpinang, Semujur Kurau, Koba-Berikat, Toboali Lepar, Batu Betumpang, Tanjung Pandan-Tanjung Kelayang, Seliu-Tanjung Rusa, Kelumpang-Sekunyit, Manggar, Bukulimau sesuai Perpres No. 17 Tahun 2024	Alam, Geologi	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Kota Pangkal Pinang
	3	Raja Ampat	Destinasi Pariwisata Geopark Kepulauan yang Berkualitas, serta Berbasis Konservasi dan Masyarakat secara Berkelanjutan	Selat Dampier, Wayag, Misool (Kab. Raja Ampat) sesuai Perpres No. 87 Tahun 2024	Alam, Geologi	Kab. Raja Ampat
	4	Bromo-Tengger-Semeru	Pariwisata Alam dan Budaya yang Berkelanjutan, Mempunyai Kualitas	Kab Malang, Kab. Lumajang, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, dan Kota Malang	Alam, Budaya, <i>Adventure</i>	Kab. malang, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab.

Kegiatan Prioritas	Destinasi Prioritas	Visi Pembangunan	Key Tourism Area (KTA)	Tematik	Delineasi
		Kelas Dunia dengan Memberdayakan Masyarakat dan Kekayaan Lokal untuk Mencapai Kesejahteraan		dan Olahraga	Pasuruan, Kota Malang
	5 Wakatobi	Destinasi Pariwisata Bahari Berkelas Dunia dalam Kesatuan dengan Kelestarian Taman Nasional Laut dan Cagar Biosfer	Wangi wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko (Kab. Wakatobi)	Alam	Kab. Wakatobi
	6 Morotai	Terwujudnya Morotai Sebagai Destinasi Pariwisata Dunia Berbasis Bahari dan Sejarah yang Berdaya Saing Global, Berwawasan Lingkungan untuk Kesejahteraan Masyarakat	KTA Moro Point, KTA Rao, KTA Pasifik	Alam, Budaya, Adventure dan Olahraga	Kab. Morotai
Penguatan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif	1 Bali	Destinasi Pariwisata Unggulan yang Berdaya Saing Internasional, Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal, Berkelanjutan, dan Inklusif	KEK Sanur, KEK Kura Kura Bali, Desa Serangan, Nusa Dua (Kab. Badung), Uluwatu, Kintamani, Bali Barat	Alam, Geologi, Budaya, Urban Heritage, MICE	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Bali
	2 Greater Jakarta	Kota Global Berkelanjutan	Jabodetabek- Punjur sesuai Perpres No. 60 Tahun 2020	Budaya, Urban Heritage, MICE	Provinsi DKI Jakarta (seluruh kota), Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Cianjur
	3 Kepulauan Riau	Merajut Permata Biru Ekonomi Gerbang Utara Indonesia	Kota Batam, Kab. Bintan, Kab. Natuna, Kab. Anambas	Alam, Geologi, Budaya, MICE	Seluruh Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenpar Tahun 2025-2029

Adapun sasaran, indikator, beserta dengan target percepatan dan pengembangan DPP serta penguatan DPR pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.3. Target Kegiatan Prioritas PN 3 Kementerian Pariwisata Tahun 2025

	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
				2025
A.	Percepatan Pembangunan 4 Destinasi Pariwisata Prioritas (Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Lombok-Gili Tramena)			
1.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Juta Rupiah	22.023.561,06
		Pendapatan dari wisatawan nusantara Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Miliar Rupiah	23.672,34
		Devisa Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Juta USD	718,37
		Tenaga kerja pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (Jawa Tengah)	Orang	3.280.514
		Investasi sektor pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Juta Rupiah	1.191.228,32
		Tenaga kerja pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (DIY)	Orang	454.432
2.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Labuan Bajo	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Labuan Bajo	Juta Rupiah	42.889,25
		Pendapatan dari wisatawan nusantara Labuan Bajo	Miliar Rupiah	1.175,23
		Devisa Pariwisata Labuan Bajo	Juta USD	283,52
		Tenaga kerja pariwisata Labuan Bajo	Orang	304.910
		Investasi sektor pariwisata Labuan Bajo	Juta Rupiah	663.817,72
3.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Danau Toba	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Danau Toba	Juta Rupiah	2.417.786,51
		Pendapatan dari wisatawan nusantara Danau Toba	Miliar Rupiah	2.048,41
		Devisa Pariwisata Danau Toba	Juta USD	163,91
		Tenaga Kerja Pariwisata Danau Toba	Orang	1.199.556
		Investasi sektor pariwisata Danau Toba	Juta Rupiah	513.030,98
4.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Lombok-Gili Tramena	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Lombok-Gili Tramena	Juta Rupiah	2.432.513,02
		Pendapatan dari wisatawan nusantara Lombok-Gili Tramena	Miliar Rupiah	14.850,43
		Devisa Pariwisata Lombok-Gili Tramena	Juta USD	800,60
		Tenaga kerja pariwisata Lombok-Gili Tramena	Orang	544.460

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	
			2025	
	Investasi sektor pariwisata Lombok-Gili Tramena	Juta Rupiah	5.598.319,34	
B.	Pengembangan 6 Destinasi Pariwisata Prioritas (Manado-Likupang, Bangka-Belitung, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, dan Morotai)			
1.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Manado-Likupang	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Manado-Likupang	Juta Rupiah	2.837.523,71
		Pendapatan dari wisatawan nusantara Manado-Likupang	Miliar Rupiah	8.982,47
		Devisa Pariwisata Manado-Likupang	Juta USD	267,09
		Tenaga kerja pariwisata Manado-Likupang	Orang	219.919
		Investasi sektor pariwisata Manado-Likupang	Juta Rupiah	965.762,85
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Bangka-Belitung	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bangka Belitung	Juta Rupiah	3.614.153,73
		Pendapatan dari wisatawan nusantara Bangka Belitung	Miliar Rupiah	13.161,89
		Devisa Pariwisata Bangka Belitung	Juta USD	41,54
		Tenaga Kerja Pariwisata Bangka Belitung	Orang	109.216
		Investasi sektor pariwisata Bangka Belitung	Juta Rupiah	657.861,88
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Raja Ampat	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Raja Ampat	Juta Rupiah	18.196,50
		Pendapatan dari wisatawan nusantara Raja Ampat	Miliar Rupiah	290,40
		Devisa Pariwisata dari Raja Ampat	Juta USD	42,44
		Tenaga kerja pariwisata Raja Ampat	Orang	9.054
		Investasi sektor pariwisata Raja Ampat	Juta Rupiah	15.683,97
4.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bromo-Tengger-Semeru	Juta Rupiah	19.273.275,88
		Pendapatan dari wisatawan nusantara di Bromo-Tengger-Semeru	Miliar Rupiah	1.112,12
		Devisa Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	Juta USD	7,21
		Tenaga kerja pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	Orang	3.954.841
		Investasi sektor pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	Juta Rupiah	971.309,16
5.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Wakatobi	Juta Rupiah	39.122,37
		Pendapatan dari wisatawan nusantara Wakatobi	Miliar Rupiah	132,95
		Devisa Pariwisata Wakatobi	Juta USD	9,38

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
			2025
Destinasi Pariwisata Wakatobi	Tenaga kerja pariwisata Wakatobi	Orang	243.687
	Investasi sektor pariwisata Wakatobi	Juta Rupiah	45.520,70
6. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas terkait Aksesibilitas, Amenitas, dan Tata Kelola di Destinasi Pariwisata Morotai	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Morotai	Juta Rupiah	2.849,87
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Morotai	Miliar Rupiah	159,98
	Devisa Pariwisata Morotai	Juta USD	0,78
	Tenaga kerja pariwisata Morotai	Orang	82.835
	Investasi sektor pariwisata Morotai	Juta Rupiah	49.626,20
C.	Penguatan 3 Destinasi Regeneratif (Bali, <i>Greater Jakarta</i>, dan Kepulauan Riau)		
1. Meningkatnya Kesesuaian Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Pariwisata, serta Kualitas Rantai Pasok Pariwisata Bali	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bali	Juta Rupiah	60.288.199,30
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Bali	Miliar Rupiah	123.500,99
	Devisa pariwisata Bali	Juta USD	12.665,99
	Tenaga kerja pariwisata Bali	Orang	644.270
	Investasi sektor pariwisata Bali	Juta Rupiah	9.413.987,20
2. Meningkatnya Kesesuaian Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Pariwisata, serta Kualitas Rantai Pasok Pariwisata <i>Greater Jakarta</i>	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum <i>Greater Jakarta</i>	Juta Rupiah	211.658.892,86
	Pendapatan dari wisatawan nusantara <i>Greater Jakarta</i>	Miliar Rupiah	421.993,70
	Devisa Pariwisata Jakarta	Juta USD	3.439,37
	Tenaga kerja pariwisata <i>Greater Jakarta</i> (DKI)	Orang	1.537.529
	Tenaga kerja pariwisata <i>Greater Jakarta</i> (Jawa Barat)	Orang	5.591.063
	Tenaga kerja pariwisata <i>Greater Jakarta</i> (Banten)	Orang	1.523.452
3. Meningkatnya Kesesuaian Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Pariwisata, serta Kualitas Rantai Pasok Pariwisata Kepulauan Riau	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kepulauan Riau	Juta Rupiah	6.947.814,54
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Kepulauan Riau	Miliar Rupiah	5.819,81
	Devisa Pariwisata Kepulauan Riau	Juta USD	2.870,43
	Tenaga kerja pariwisata Kepulauan Riau	Orang	294.642
	Investasi sektor pariwisata Kepulauan Riau	Juta Rupiah	2.937.364,16

Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029

Selain KP pada PN 3 di atas, Kemenpar juga mendukung PN 2 yaitu **“Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara, dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”**, dengan Kegiatan Prioritas pembangunan pariwisata berbasis bahari dan danau dan sasaran Kegiatan Prioritas yaitu meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan. Adapun indikator dan target capaian Kegiatan Prioritas tersebut pada tahun 2029 sebagai berikut:

- 1) Prioritasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau sejumlah 10 lokasi, yaitu Bali, Kepulauan Riau, Lombok-Gili Tramen, Manado-Likupang, Bangka Belitung, Danau Toba, Raja Ampat, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.
- 2) Jumlah wisnus di destinasi bahari dan danau prioritas sebanyak 16.985.120 perjalanan.
- 3) Jumlah wisman di destinasi bahari dan danau prioritas sebanyak 16.275.780 kunjungan.

Tabel 2.4. Target Kegiatan Prioritas PN 2 Kementerian Pariwisata Tahun 2025

	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
				2025
A.	Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau			
1.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Bahari dan Danau Serta Pemanfaatan Jasa Kelautan Berkelanjutan	Prioritiasi Destinasi Pariwisata Prioritas berbasis bahari dan danau	Lokasi Destinasi Pariwisata Bahari	10
		Jumlah wisatawan nusantara di destinasi bahari dan danau prioritas	Ribu Perjalanan	13.686,56
		Jumlah wisatawan mancanegara di destinasi bahari dan danau prioritas	Ribu Kunjungan	12.204,23

Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan pariwisata nasional periode tahun 2025–2029 diarahkan untuk mempercepat penyelesaian 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan memperkuat 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif sebagai bagian dari transformasi sektor pariwisata menuju sistem yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan arahan RPJMN Tahun 2025–2029, yang menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu pengungkit utama pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan penguatan daya saing global. Secara khusus, strategi ini menekankan pengembangan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pelestarian budaya dan alam, sebagai kekuatan khas Indonesia dalam kerangka pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

2.3. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

A. PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Renja K/L dan RKP 2025. Dimulai pada bulan Januari-Maret 2024 melalui penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) yang memuat indikasi perencanaan dan dibahas dalam pertemuan dua pihak (*Bilateral Meeting*) bersama Kementerian PPN/Bappenas, selanjutnya pada bulan Maret-Juni 2024 dilakukan penyusunan Rancangan Renja berdasarkan mengacu pada rancangan RPJMN 2025-2029, rancangan Awal RKP dan Surat Bersama (SB) Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas kemudian ditelaah bersama dalam pertemuan tiga pihak (*Trilateral Meeting*) bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Pada bulan Juni-Juli 2024 dilakukan pemutakhiran Rancangan Renja yang dimutakhirkan melalui pertemuan tiga pihak (*Trilateral Meeting*) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang RKP 2025 dan SB Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 dan menjadi dasar untuk penyusunan RKA-K/L. Selanjutnya pada bulan Juli-November 2024 adalah waktu perubahan Renja dan Penyusunan RKA-K/L sesuai dengan SB Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Pada tanggal 21 Oktober 2024 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dengan ditetapkannya pembentukan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tersebut, maka terjadi pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa Kementerian/Lembaga diantaranya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengalami restrukturisasi menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Dampak dari restrukturisasi tersebut, informasi kinerja yang semula Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif sehingga terdapat penyesuaian kembali dalam rangka implementasi kegiatan dan anggaran di Renja dan RKA-K/L T.A 2025 dan penyusunan Renstra K/L 2025-2029.

B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Renja Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam upaya mendorong kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung transformasi menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian mengembangkan program unggulan yang sejalan dengan RPJMN Tahun 2025–2029 dan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kelima program ini dirancang untuk menjawab tantangan global, memperkuat daya saing nasional, dan memperluas pemerataan manfaat pariwisata secara inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Program-program tersebut tidak berdiri sendiri sebagai inisiatif sektoral, tetapi akan disematkan

secara lintas-deputi dan diinternalisasikan ke dalam rencana kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian di tahun 2025.

Adapun program unggulan Kementerian Pariwisata untuk pariwisata berkualitas meliputi:



Sumber: Kementerian Pariwisata

Pemetaan ke Asta Cita

Gambar 2.5. Program Unggulan Kementerian Pariwisata Tahun 2025

1. Gerakan Wisata Bersih

Gerakan Wisata Bersih merupakan bagian dari penanganan sampah nasional di destinasi pariwisata. Program ini bertujuan untuk mengamplifikasi pesan dan mengedukasi publik bahwa sampah adalah masalah bersama yang melibatkan stakeholders pariwisata, sehingga penanganannya harus dilakukan secara sistemik dan terintegrasi, bukan hanya oleh satu unit tertentu. Program ini adalah salah satu langkah Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan aspek skor *Travel and Tourism Development Index* (TTDI) pada kategori *Health & Hygiene* (3,78) yang masih di bawah rata-rata Asia Pasifik (4,53).

2. Tourism 5.0: AI dan Digitalisasi

Transformasi digital di sektor pariwisata bukan sekedar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam menjawab perubahan perilaku wisatawan global. *Tourism 5.0* mendorong pemanfaatan teknologi terkini seperti *Artificial Intelligence (AI)*, *machine learning*, dan *user journey personalization* dalam digitalisasi pemasaran pariwisata. Melalui platform indonesia.travel yang dilakukan pembaharuan (*revamping*), sehingga calon wisatawan dapat menikmati pengalaman yang telah dipilih dan disesuaikan berdasarkan preferensi, mudah diakses, dan relevan dengan minat pribadi mereka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan promosi, mempercepat konversi kunjungan, serta menciptakan pengalaman wisata digital yang imersif dan berbasis data strategis.

Kementerian Pariwisata meyakini bahwa digitalisasi jika dimanfaatkan dengan baik, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program kerja; terutama untuk pemasaran.

3. Pariwisata Berkualitas

Program ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata berkualitas tinggi. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan selama di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menarik wisatawan dengan pengeluaran tinggi, memperpanjang lama tinggal, serta meningkatkan pendapatan devisa secara signifikan. Upaya yang dilakukan menyeluruh, mulai dari penyusunan produk wisata dan pemberdayaan industri, hingga promosi dan pemanfaatan *event* untuk mengkomunikasikan pariwisata Indonesia, termasuk ke pangsa pasar yang belum tergarap secara optimal. Kementerian Pariwisata memulai dengan berfokus pada beberapa segmen utama, yakni *gastronomy*, *marine*, dan *wellness tourism*.

4. *Event by Indonesia*

Indonesia memiliki kekayaan budaya dan seni yang dapat dikurasi menjadi event berbasis kekayaan intelektual yang unik dan otentik. Program ini mendorong penyelenggaraan *event* pariwisata kelas dunia yang tidak hanya mengangkat citra Indonesia secara global, tetapi juga memperkuat ekosistem industri pariwisata lokal dan membuka peluang ekspor budaya. Dengan menjadikan *event* sebagai *signature tourism product*, Indonesia diharapkan tampil sebagai pusat penyelenggaraan event internasional yang kreatif, otentik, dan berdampak ekonomi tinggi. Pelaksanaan sebelumnya telah membuktikan keberhasilan event dalam menghasilkan dampak ekonomi besar dalam waktu singkat. Memanfaatkan potensi yang masih dapat dioptimalkan, Kementerian Pariwisata mengusahakan hadirnya *event by Indonesia*.

5. Desa Wisata

Guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat desa sekaligus meningkatkan jumlah Desa Wisata berprestasi di kancah internasional, Kementerian Pariwisata terus mengembangkan Desa Wisata, yang per 3 November 2025 berjumlah 6.171 desa wisata.

Program ini tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas infrastruktur, amenitas, *storytelling* lokal, dan kapasitas SDM masyarakat desa wisata agar mampu menjadi pelaku utama dalam industri pariwisata. Target ke depan adalah menjadikan lebih banyak desa wisata Indonesia sebagai juara internasional, berdaya saing global, dan mampu mengangkat nama Indonesia di forum pariwisata dunia.

Setelah melalui proses perencanaan dan persetujuan oleh DPR maka pada bulan November Tahun 2024 ditetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Kemenpar Tahun Anggaran 2025 (Nomor SP DIPA-147.01-0/2025) Tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp 1.488.741.453.000, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5. Pagu Anggaran Kemenpar Tahun Anggaran 2025 (Per Program)

Kode	Program	Pagu Anggaran (Rp)
WA	Dukungan Manajemen	787.410.383.000
EA	Pariwisata	396.753.489.000
DL	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	304.577.581.000
	Jumlah Pagu Anggaran	1.488.741.453.000

C. PERJALANAN PAGU ANGGARAN KEMENPAR TAHUN ANGGARAN 2025

Selama tahun 2025 Kemenpar mengalami beberapa kali perubahan anggaran yang disebabkan oleh dinamika ruang fiskal yang mendorong adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam instruksi tersebut disampaikan bahwa Kementerian pariwisata perlu melakukan efisiensi dalam rangka memenuhi kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka prioritas nasional.

Adapun perjalanan perubahan pagu anggaran Kementerian Pariwisata sebagai berikut:

Tabel 2.6. Perubahan Anggaran Kemenpar Tahun 2025

No	Uraian	DIPA Awal (Rp.)	Perubahan I (Rp.)	Perubahan II (Rp.)	Perubahan III (Rp.)	Perubahan IV (Rp.)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	304.577.581.000	282.571.888.000	275.602.909.000	275.602.909.000	276.461.909.000
2	Program Pariwisata	396.753.489.000	422.870.074.000	427.234.260.000	432.139.135.000	432.139.135.000
3	Program Dukungan Manajemen	787.410.383.000	783.299.491.000	785.904.284.000	780.999.409.000	780.999.409.000
	KEMENTERIAN PARIWISATA	1.488.741.453.000	1.488.741.453.000	1.488.741.453.000	1.488.741.453.000	1.489.600.453.000

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Perjanjian kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Menteri Pariwisata menyusun PK sebagai dasar penetapan target yang akan diukur keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja pada akhir tahun sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pariwisata serta mewujudkan kinerja yang sudah diperjanjikan. PK Kementerian Pariwisata tahun 2025 mengalami 2 (dua) kali perubahan. Adapun perubahannya disajikan pada table 2.7.

Tabel 2.7. Perbandingan antara PK Awal dan PK Perubahan Menteri Pariwisata Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		TARGET 2025	SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		TARGET 2025
SS.1	Meningkatnya kapabilitas sistem kepariwisataan	IKSS.1	Indeks Pembangunan Pariwisata/Travel and Tourism Development Index (Peringkat)	22	SS.1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata	IKSS.1	Rasio PDB Pariwisata (persen)	4,2
		IKSS.2	Kontribusi Sektor Pariwisata ke PDB (%)	4,6			IKSS.2	Devisa Pariwisata (miliar USD)	17,1
		IKSS.3	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata (Juta orang)	25,8			IKSS.3	Tenaga Kerja Pariwisata (juta orang)	25,75
SS.2	Meningkatnya kualitas pariwisata	IKSS.4	Kunjungan wisatawan mancanegara (Juta kunjungan)	14,6			IKSS.4	Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/kunjungan)	1.220
		IKSS.5	Perjalanan wisatawan nusantara (miliar)	1,08			IKSS.5	Kunjungan Wisatawan Mancanegara (juta kunjungan)	14
		IKSS.6	Devisa pariwisata (Miliar USD)	19			IKSS.6	Perjalanan Wisatawan Nusantara (juta perjalanan)	1.084
SS.3	Meningkatnya Kualitas Governansi, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpar	IKSS.7	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata (nilai)	87	SS.2	Meningkatnya Kualitas Governans Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur	IKSS.7	Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)	86,5

Pada dokumen PK Awal, terdapat 3 SS Kementerian yaitu, (1) Meningkatnya kapabilitas sistem kepariwisataan, (2) Meningkatnya kualitas pariwisata dan (3) Meningkatnya Kualitas Governansi, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpar. Sedangkan dalam PK Perubahan terdapat 2 SS yaitu, (1) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata, dan (2) Meningkatnya Kualitas Governans Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Detail perbedaan antara PK Awal dan PK Perubahan, terdapat perubahan indikator dan target indikator sebagai berikut:

- 1) Indeks Pembangunan Pariwisata/*Travel and Tourism Development Index*, pada PK Perubahan tidak menjadi sasaran strategis kementerian. Indikator ini di ukur oleh *World Economic Forum* (WEF) setiap 2 tahun sekali, dan dalam rangka pencapaiannya memerlukan koordinasi yang melibatkan lintas sektor, indikator Indeks Pembangunan Pariwisata/*Travel and Tourism Development Index* menjadi sasaran program Kemenpar.
- 2) Kontribusi Sektor Pariwisata ke PDB, dilakukan penyesuaian nomenklatur dan target. Pada PK Awal, Kontribusi Sektor Pariwisata ke PDB dengan target sebesar 4,6% dan diubah dalam PK Perubahan menjadi Rasio PDB Pariwisata dengan target 4,2%.

Penyesuaian target ini mengikuti arah kebijakan RPJMN 2025-2029 dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan tantangan dalam sektor pariwisata.

- 3) Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dilakukan penyesuaian target yang semula dalam PK Awal sebesar 25,8 Juta orang menjadi 25,75 Juta orang dalam PK Perubahan. Penyesuaian target ini mengikuti arah kebijakan RPJMN 2025-2029 dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan tantangan dalam sektor pariwisata.
- 4) Kunjungan wisman dilakukan penyesuaian target yang semula dalam PK Awal sebesar 14,6 Juta kunjungan menjadi 14 Juta kunjungan dalam PK Perubahan. Penyesuaian target ini mengikuti arah kebijakan RPJMN 2025-2029 dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan tantangan dalam sektor pariwisata.
- 5) Perjalanan Wisnus dilakukan penyesuaian target yang semula dalam PK Awal sebesar 1,08 miliar perjalanan menjadi 1.084 Juta perjalanan dalam PK Perubahan. Penyesuaian target ini mengikuti arah kebijakan RPJMN 2025-2029 dengan memperhatikan bahwa pergerakan wisatawan nusantara diharapkan menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional dari sektor pariwisata.
- 6) Devisa pariwisata dilakukan penyesuaian target yang semula dalam PK Awal sebesar 19 Miliar USD menjadi 17,1 Miliar USD dalam PK Perubahan. Penyesuaian target ini mengikuti arah kebijakan RPJMN 2025-2029 dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan tantangan dalam sektor pariwisata.
- 7) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dilakukan penyesuaian target yang semula dalam PK Awal sebesar 87 menjadi 86,5 dalam PK Perubahan. Penyesuaian ini dengan mempertimbangkan perubahan organisasi dan keterbatasan sumber daya manusia karena adanya reorganisasi pemisahan lembaga dari Kemenparekraf/Baparekraf menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.
- 8) Dalam rangka mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, ditambahkan 1 indikator baru yaitu Pengeluaran Wisman.



**MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Widiyanti Putri**
Jabatan : **Menteri Pariwisata**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2025

Menteri Pariwisata


Widiyanti Putri

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3838000, Pesawat 8051; Pos-el: persuratan@kemenparekraf.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN PARIWISATA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapabilitas sistem kepariwisataan	1. Indeks Pembangunan Pariwisata/Travel and Tourism Development Index (Peringkat)	22
		2. Kontribusi Sektor Pariwisata ke PDB (%)	4,6
		3. Jumlah tenaga kerja pariwisata (Juta orang)	25,8
2.	Meningkatnya kualitas pariwisata	4. Kunjungan wisatawan mancanegara (Juta kunjungan)	14,6
		5. Perjalanan wisatawan nusantara (miliar)	1,08
		6. Devisa pariwisata (Miliar USD)	19
3.	Meningkatnya kualitas governansi, kelembagaan, dan sumber daya manusia aparatur Kemenpar	7. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata (Nilai)	87

Program	Anggaran
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp 396.753.489.000
2. Program Kepariwisataan	Rp 304.577.581.000
3. Program Dukungan Manajemen	Rp 787.410.383.000
Total	Rp 1.488.741.453.000

Jakarta, Januari 2025

Menteri Pariwisata


 Widiyanti Putri

Gambar 2.6. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025



**MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
(PERUBAHAN I)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Widiyanti Putri**
Jabatan : **Menteri Pariwisata**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2025
Menteri Pariwisata


Widiyanti Putri

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3838000, Pesawat 8051; Pos-el: persuratan@kemenparekraf.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MENTERI PARIWISATA
(PERUBAHAN I)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata	1. Rasio PDB Pariwisata (%)	4,2
		2. Devisa Pariwisata (miliar USD)	17,1
		3. Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (USD/kunjungan)	1.220
		4. Tenaga Kerja Pariwisata (juta orang)	25,75
		5. Kunjungan Wisatawan Mancanegara (juta kunjungan)	14,0
		6. Perjalanan Wisatawan Nusantara (juta perjalanan)	1.084
2.	Meningkatnya Kualitas Governans Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur	7. Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	86,5

Program	Anggaran
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp 276.461.909.000
2. Program Pariwisata	Rp 432.139.135.000
3. Program Dukungan Manajemen	Rp 780.999.409.000
Total	Rp 1.489.600.453.000

Jakarta, Desember 2025

Menteri Pariwisata



Widiyanti Putri

Gambar 2.7. Perjanjian Kinerja Perubahan I Tahun 2025

3

AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja Organisasi
- Realisasi Anggaran Tahun 2025
- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Kinerja Lain-lain
- Evaluasi Internal



3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2025 merujuk pada sejauh mana Kementerian Pariwisata mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-programnya. Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja di akhir Tahun 2025. Realisasi capaian kinerja Tahun 2025 kemudian dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja pada Tahun 2024. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi adanya perbedaan kinerja (*performance gap*) antara Tahun 2024 dan Tahun 2025, guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai adanya gap, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk masa depan.

Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		SATUAN	TARGET RPJMN 2025*)	TARGET RKP 2025 **)	TARGET PERJANJIAN KINERJA	REALISASI 2025	CAPAIAN
SS.1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan	IKSS.1.1	Rasio PDB Pariwisata	Persen	4,5 – 4,6	4,2 – 4,3	4,2	3,97 ¹⁾	94,52%
		IKSS.1.2	Devisa Pariwisata	Miliar USD	19,0 – 22,1	17,1 – 18,3	17,1	18,28 ²⁾	106,87%
		IKSS.1.3	Pengeluaran wisatawan mancanegara	USD/kunjungan	1.300 – 1.381,3	1.220	1.220	1.267,07 ⁴⁾	103,20%
		IKSS.1.4	Tenaga Kerja Pariwisata	Juta orang	25,75	25,75	25,75	25,91 ³⁾	100,62%
		IKSS.1.5	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta kunjungan	14,6 – 16,0	14 – 15	14	15,39 ⁴⁾	109,93%
		IKSS.1.6	Perjalanan Wisatawan Nusantara	Juta Perjalanan	1.084	1.084	1.084	1.200,33 ⁴⁾	110,73%
SS.2	Meningkatnya Kualitas Governans Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur	IKSS.2.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	86,5	86,67 ⁵⁾	100,19%

Keterangan:

- 1) Data sangat sementara hanya PDB penyediaan akomomodasi dan angkutan udara TW I-IV 2025
- 2) Data sementara NPI Bank Indonesia TW I-IV 2025, Februari 2026
- 3) Data sementara, Sakernas Agustus 2025 Badan Pusat Statistik
- 4) Data Bahan Tayang Berita Resmi Statistik No. 13/02/Th. XXIX, 2 Februari 2026 terkait Perkembangan Pariwisata Desember 2025
- 5) Data sementara berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN-RB prasanggah

Data realisasi capaian kinerja Kementerian Pariwisata dari 2 (dua) SS dan 7 (tujuh) IKSS dirangkum pada tabel 3.1. di atas. Dari realisasi capaian menunjukkan bahwa pada Tahun 2025, 6 (enam) IKSS yang capaiannya sudah melampaui target, dan 1 (satu) IKSS, yaitu Rasio PDB Pariwisata masih menggunakan data sementara (hanya PDB penyediaan akomodasi dan makan minum, serta angkutan udara TW I-IV 2025). Terkait dengan data yang masih bersifat sementara, dikarenakan belum adanya data resmi yang dipublikasikan oleh instansi/lembaga yang berwenang, untuk selanjutnya, data capaian IKSS yang masih menggunakan data data sementara akan dilakukan *update* secara berkala setelah instansi/lembaga terkait tersebut mempublikasikan data capaian secara resmi.

RINCIAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Realisasi Pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pariwisata Tahun 2025, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang ditetapkan, selanjutnya diuraikan secara rinci sebagai berikut:

SS.1 Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata

Sasaran Strategis 1, Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata, Kementerian Pariwisata memiliki 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai targetnya pada Tahun 2025, yaitu:

- 1) **IKSS.1.1.: Rasio PDB Pariwisata**
- 2) **IKSS.1.2.: Devisa Pariwisata**
- 3) **IKSS.1.3.: Pengeluaran Wisatawan Mancanegara**
- 4) **IKSS.1.4.: Tenaga Kerja Pariwisata**
- 5) **IKSS.1.5.: Kunjungan Wisatawan Mancanegara**
- 6) **IKSS.1.6.: Perjalanan Wisatawan Nusantara**

dengan penjelasan sebagaimana Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

IKSS.1.1 Rasio PDB Pariwisata

Kontribusi pariwisata terhadap PDB didefinisikan sebagai: (a). Dari sisi produksi merupakan persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku); (b). Dari sisi pengeluaran merupakan persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku). Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB merupakan pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB dari periode t-1 ke periode t (sumber: www.bps.go.id). Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), rata-rata lama tinggal (*length of stay*) wisman selama di Indonesia, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus), investasi pariwisata, dan alokasi anggaran pemerintah untuk pariwisata.

Nilai kontribusi PDB Pariwisata bersumber dari Publikasi *Tourism Satellite Account (TSA)* Indonesia yang dirilis oleh BPS. Perhitungan kontribusi pariwisata menggunakan kerangka kerja *Supply and Use Table (SUT)* berdasarkan ukuran Produk Domestik Bruto Langsung Pariwisata/ *Tourism Direct Gross Domestic Product (TDGDP)*.

Metode perhitungan IKSS.1.1. Rasio PDB Pariwisata, diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$\text{TDGDP} = \text{TDGVA} + \text{pajak netto atas produk dan impor yang tercakup pada pengeluaran wisatawan}$$

$$\text{Kontribusi TDGDP} = \text{TDGDP} / \text{PDB}$$

Kontribusi pariwisata ke PDB berdasarkan *Tourism Satellite Account (TSA)* dipublikasikan BPS dua tahun setelah tahun pengukuran. Sementara TSA belum dipublikasikan, data kontribusi PDB merupakan data sementara.

Berdasarkan data sementara PDB penyediaan akomodasi, makan minum, dan angkutan udara TW I-IV 2025 sebesar Rp 946,45 Triliun sedangkan PDB Nasional sebesar Rp 23.811,10 Triliun, sehingga realisasi kontribusi PDB Pariwisata untuk Tahun 2025 menunjukkan sebesar 3,97%. Pencapaian IKSS.1.1 rasio PDB pariwisata sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Persandingan Realisasi Rasio PDB Pariwisata Tahun 2024-2025

IKSS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	SATUAN	2024	2025			GROWTH
			REALISASI	TARGET PERJANJIAN KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	
IKSS.1.1	Rasio PDB Pariwisata	Persen	4,04	4,2	3,97*	94,52%	(1,73%)

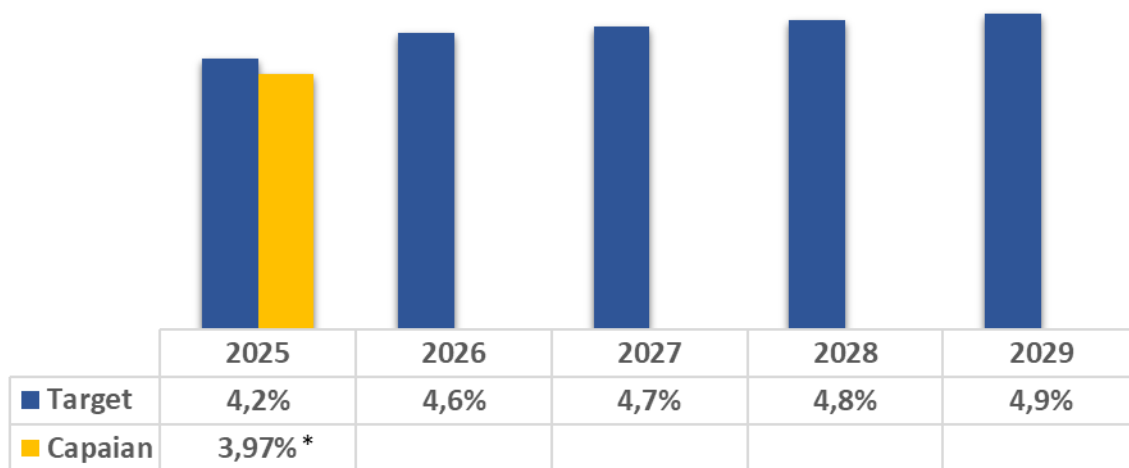
Catatan:

*) Data sangat sementara hanya PDB akomodasi, makan minum, dan angkutan udara TW I-IV Tahun 2025

Berdasarkan hasil persandingan realisasi Rasio PDB Pariwisata Tahun 2024–2025, kinerja indikator IKSS.1.1 menunjukkan adanya penurunan tipis kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional. Pada Tahun 2025, data sementara Rasio PDB Pariwisata realisasinya sebesar 3,97 persen, atau mengalami penurunan tipis sebesar 1,73 persen dari tahun 2024. Dibandingkan dengan target Tahun 2025 yang berada pada kisaran 4,2 persen, capaian 2025 baru mencapai 94,52 persen dari target.

Capaian Rasio PDB sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh jumlah perjalanan wisatawan nusantara, karena aktivitas wisata di dalam negeri mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor terkait, antara lain transportasi, akomodasi, makan minum, dan jasa perjalanan. Oleh karena itu, belum tercapainya target Rasio PDB Pariwisata Tahun 2025 tidak terlepas dari realisasi sementara jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada tahun berjalan yang juga masih berada di bawah target yang ditetapkan (dijelaskan lebih lanjut pada rincian pencapaian pada IKSS.6 perjalanan wisatawan nusantara).

IKSS.1.1. Rasio PDB Pariwisata



Gambar 3.1. Grafik Target Tahun 2024-2025 dan Realisasi Tahun 2025 Rasio PDB Pariwisata

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan berdasarkan data sementara capaian angka realisasi rasio PDB pariwisata di Tahun 2025, sebesar 3,97%, belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 4,2%. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, kinerja ini tetap menunjukkan ketahanan sektor pariwisata di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Kementerian Pariwisata telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target Rasio PDB Pariwisata melalui penguatan dan tata kelola usaha pariwisata, kemudahan berusaha industri dan pelaku usaha pariwisata, serta penguatan rantai pasok dan jejaring usaha pariwisata. Beberapa kegiatan unggulan Kementerian Pariwisata yang dilakukan untuk meningkatkan PDB Pariwisata adalah sebagai berikut:

A. Penguatan Kebijakan Industri Pariwisata

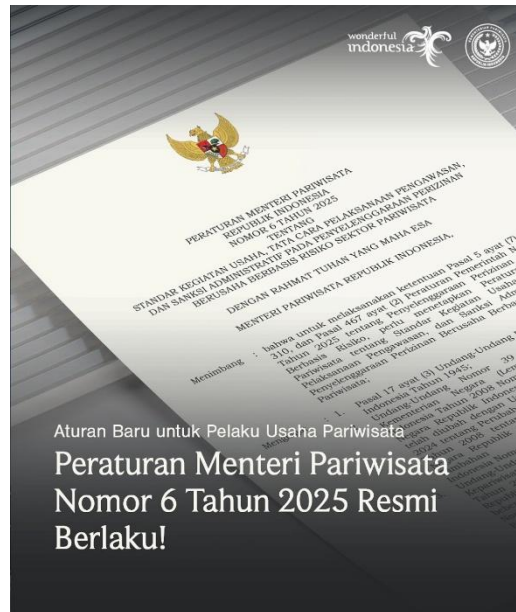
Program penguatan kebijakan industri pariwisata menjadi sangat penting sebagai fondasi, arah, dan peningkatan daya saing sektor pariwisata Indonesia. Program ini diimplementasikan melalui beberapa kegiatan utama yaitu:

1) Penyusunan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 6 Tahun 2025 disusun sebagai bentuk turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang perlu dioperasionalkan di sektor Pariwisata. Diperlukan adanya pengaturan standar kegiatan usaha, tata cara pelaksanaan pengawasan dan sanksi administratif di sektor pariwisata sebagai bagian dari penerapan perizinan berusaha berbasis risiko.

Dengan terbitnya Permenpar 6 Tahun 2025 ini diharapkan terwujudnya peningkatan standar usaha pariwisata terutama dari sisi pelayanan,

kenyamanan, kebersihan dan keselamatan, yang ujungnya adalah peningkatan *spending* wisatawan dan tercapainya pariwisata berkualitas.



Pokok Pengaturan

Materi Muatan Peraturan Menteri ini:

- ✿ Standar kegiatan usaha sektor pariwisata berdasarkan tingkat risiko (menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi)
- ✿ Tata cara pelaksanaan pengawasan (pengawasan rutin dan pengawasan insidental)

Seluruh rincian teknis tercantum dalam lampiran peraturan, termasuk standar untuk setiap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Gambar 3.2. Permenpar 6 Tahun 2025

2) Sosialisasi Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025

Setelah penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 sebagai regulasi baru yang mengatur perizinan berusaha berbasis risiko, Kementerian Pariwisata melalui kolaborasi dengan Pemerintah Daerah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi di sejumlah daerah dalam rangka memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan Pemerintah Daerah, baik melalui *offline* maupun *online*. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Wonosono, Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.3. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi PP 28 Tahun 2025 dan Permenpar 6 Tahun 2025

B. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang *Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF)*

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang *Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF)* dilaksanakan secara bertahap melalui rangkaian konsinyering, *Focus Group Discussion (FGD)*, Rapat Panitia Antarkementerian/Non-Kementerian (PAK), serta konsultasi publik guna memastikan kematangan substansi, kelembagaan, dan tata kelola pendanaan. Proses ini merupakan tindak lanjut arahan pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mempercepat pembentukan instrumen pendanaan pariwisata yang mampu mendorong transformasi menuju pariwisata berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Tahap awal konsinyering pada Mei 2025 difokuskan pada penyusunan naskah urgensi, penajaman ruang lingkup, serta perumusan kerangka pendanaan dan tata kelola IQTF sebagai dana strategis pendukung pertumbuhan ekonomi nasional.



Gambar 3.4. Dokumentasi Kegiatan Rapat Konsinyering Penyusunan RPerpres IQTF

FGD Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Pariwisata Berkualitas/ IQTF dilaksanakan pada Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mematangkan substansi kebijakan, aspek kelembagaan, pendanaan, serta tata kelola IQTF sebagai instrumen pendanaan pariwisata berkelanjutan.



Gambar 3.5. Dokumentasi Kegiatan FGD Penyusunan RPerpres IQTF

Dalam pembahasan substansi, disepakati bahwa IQTF dirancang dengan empat pilar pendanaan, yaitu penguatan destinasi (infrastruktur, aksesibilitas, fasilitas dasar, dan MICE), pengembangan produk dan atraksi wisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan penyelenggaraan event termasuk komponen *hosting* dan lisensi. Skema pendanaan bersifat fleksibel dalam bentuk hibah, investasi, maupun pinjaman, termasuk pendanaan awal *non-bankable* sebagai *catalytic fund*. IQTF juga dirancang sebagai Dana Abadi Pariwisata Berkualitas yang dikelola oleh BPD LH, dengan prinsip pemanfaatan dari hasil

pengelolaan dana, serta kemungkinan penggunaan dana pokok secara terbatas dalam kondisi tertentu melalui mekanisme persetujuan yang ketat.

Aspek kelembagaan menempatkan Kementerian Pariwisata sebagai *leading sector* secara *ex-officio* dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan koordinatif dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Peran mitra strategis seperti Dewan Ekonomi Nasional dan Kementerian Ekonomi Kreatif ditempatkan sebagai mitra kebijakan, bukan bagian dari Dewan Pengarah. Pembahasan juga mencakup mekanisme pengelolaan dana, pengecualian pengadaan barang/jasa melalui skema BLU BPD LH, pengaturan revolving fund, blended finance, pooling fund, serta pembagian skema hibah murni dan hibah dengan mekanisme pengembalian untuk mencegah moral hazard. Pendanaan diarahkan tidak hanya pada dampak ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan lingkungan dengan pendekatan ESG, serta keberpihakan pada UMKM dan kelompok masyarakat berbadan hukum.

Melalui konsultasi publik dan Rapat PAK pada September 2025, pembahasan pasal demi pasal secara umum mencapai kesepakatan dengan beberapa penyempurnaan terkait kontribusi penerima dana, kelembagaan, serta harmonisasi dengan regulasi lain termasuk RUU Kepariwisata dan dokumen perencanaan nasional. Sumber pendanaan IQTF tidak terbatas pada APBN, namun juga terbuka terhadap kerja sama internasional dan partisipasi donor. Tahap akhir proses diarahkan pada harmonisasi antar kementerian, penyempurnaan redaksional, penyusunan aturan turunan, serta penetapan prioritas pendanaan tahunan oleh Dewan Pengarah, guna memastikan implementasi IQTF berjalan efektif, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat serta penguatan ekosistem pariwisata nasional.



Gambar 3.6. Dokumentasi Kegiatan Konsultasi Publik dan Rapat PAK Penyusunan RPerpres IQTF

C. Tata Kelola Usaha Pariwisata

Program Tata kelola usaha pariwisata penting karena menjadi fondasi terciptanya usaha pariwisata yang legal, berkualitas, berdaya saing, berkelanjutan, serta berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Program ini diimplementasikan melalui beberapa kegiatan utama yaitu:

1) Pendampingan dan Pembinaan Langsung Akomodasi Non-Resmi

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut konkret dari upaya penataan industri pariwisata, khususnya di sektor akomodasi. Sasaran utama kegiatan ini adalah mengintegrasikan usaha akomodasi non resmi ke dalam kerangka regulasi yang sah. Upaya ini bertujuan untuk memberikan edukasi, memfasilitasi proses perizinan berusaha, serta mendorong peningkatan standar layanan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan kepatuhan regulasi, tetapi juga memperluas basis usaha pariwisata yang berkualitas, legal, dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah.

Akomodasi Airbnb yang telah diawasi berada pada 5 Provinsi, yaitu Bali, Jawa Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan NTB. Berdasarkan total Akomodasi Airbnb yang ada di aplikasi I-Par sebanyak 7.458 unit akomodasi dan sebesar 15% atau 1.133 unit sudah dilakukan Pendataan & Pengawasan. Dari total data 1.133 akomodasi yang sudah dilakukan pendataan pengawasan, terdapat 299 unit memiliki NIB, dan 834 unit teridentifikasi belum memiliki NIB.

Kegiatan pendampingan dan pembinaan akomodasi non-resmi merupakan kegiatan yang sangat diperlukan, kegiatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi yang selama ini belum tercatat, sehingga aktivitas ekonomi tercatat dalam statistik PDB nasional dan menjadikan aktivitas ekonomi yang sebelumnya *invisible* menjadi kontributor nyata terhadap PDRB masing-masing daerah.

2) Tata Kelola *Online Travel Agent* (OTA)

Perkembangan digitalisasi di sektor pariwisata membuka peluang munculnya model bisnis baru, termasuk *platform Online Travel Agent* (OTA) asing yang menyediakan layanan pemesanan akomodasi, tiket transportasi, dan paket wisata di Indonesia. Namun, sebagian besar OTA asing tersebut belum memenuhi persyaratan legalitas sesuai regulasi nasional. Kondisi ini menimbulkan sejumlah tantangan, antara lain:

- a. Kesenjangan persaingan usaha antara OTA asing yang belum memiliki izin dengan OTA domestik yang telah memenuhi ketentuan perizinan, perpajakan, dan kewajiban hukum.

- b. Potensi kehilangan penerimaan negara, karena OTA asing tidak memiliki kewajiban membayar pajak secara proporsional.
- c. Minimnya pengawasan dan integrasi data, mengingat OTA asing belum terhubung dengan sistem pelaporan industri pariwisata nasional, termasuk kontribusi terhadap data statistik sektor.

Oleh karena itu, seluruh mitra usaha yang terdaftar di *platform* OTA diwajibkan memiliki izin usaha yang lengkap. Ketentuan ini penting untuk memastikan keadilan dalam persaingan usaha, menjaga potensi penerimaan negara, serta melindungi konsumen dari risiko layanan akomodasi yang tidak resmi.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pariwisata telah berkoordinasi dengan seluruh OTA dan menyiapkan formulir registrasi ulang untuk pendataan pelaku usaha yang sudah tercatat pada masing-masing *platform*. Pendataan ini bertujuan mengidentifikasi pelaku usaha yang telah memiliki izin maupun yang belum berizin. Setelah data terkumpul, Kementerian Pariwisata akan menyiapkan *dashboard* khusus yang digunakan oleh OTA untuk memberikan label "Terdaftar dan Berizin" bagi pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan. Sementara itu, pelaku usaha yang belum berizin akan diberikan batas waktu tertentu untuk mengurus perizinan. Apabila melewati batas waktu tersebut, maka pelaku usaha yang tidak berizin akan dikeluarkan (*takeout*) dari *platform* OTA.

Melalui Tata Kelola *Online Travel Agent* (OTA) akan semakin banyak pencantuman usaha akomodasi pariwisata yang legal dan berstandar. Sehingga dapat menghasilkan transaksi ekonomi pariwisata yang tercatat dan terkelola dengan baik.



Gambar 3.7. Audiensi Menteri Pariwisata dengan OTA

C. Penguatan Penerapan Standar Usaha Pariwisata

Program penguatan penerapan standar usaha pariwisata adalah upaya terintegrasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan standar usaha, tidak hanya sebagai bagian dari perizinan berusaha, tetapi juga sebagai upaya dalam peningkatan kualitas usaha pariwisata. Program ini diimplementasikan dalam beberapa kegiatan utama yaitu:

1) Forum Komunikasi Pengawasan Standar Usaha Pariwisata

Kegiatan ini merupakan wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, asosiasi dan mitra strategis lainnya untuk berbagi pengalaman dan ide, serta memberikan solusi konkret dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Diselenggarakan pada Mei 2025, kegiatan ini bertujuan untuk:

- a. Menyatukan pemahaman antar *stakeholder* (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, serta asosiasi mengenai pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. Mendorong harmonisasi kebijakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko lintas sektor;
- c. Menyerap aspirasi *stakeholder* dalam pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko lintas sektor;
- d. Mengidentifikasi dan memetakan *stakeholder* dalam pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- e. Merumuskan rencana tindak lanjut dalam implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang efektif, adaptif dan berkelanjutan sesuai dinamika yang berkembang.

Kegiatan ini dihadiri oleh 150 peserta luring dan 476 peserta daring yang mewakili 51 Badan Usaha dan 34 Dinas Pariwisata.



Gambar 3.8. Dokumentasi Kegiatan Forum Komunikasi Pengawasan Standar Usaha Pariwisata

2) *Coaching Clinic* Penerapan Standar Usaha Jasa Boga dan Bar

Kegiatan ini dilaksanakan pada Juli 2025, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha jasa boga dan bar, meningkatkan praktik pelaku pariwisata menjadi berdaya saing dan berkelanjutan serta meningkatkan kesiapan pelaku usaha untuk melakukan proses sertifikasi usaha. Kegiatan ini dihadiri oleh 75 peserta yang mewakili 38 Badan Usaha (Asosiasi, Usaha Perseorangan, dan Lembaga Sertifikasi Usaha).



Gambar 3.9. Dokumentasi Kegiatan Coaching Clinic Penerapan Standar Usaha Jasa Boga dan Bar

3) Pengawasan Penerapan Standar Usaha

Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, melaksanakan pengawasan rutin dan insidental untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan penerapan standar usaha pariwisata. Pelaksanaan pengawasan dilakukan sebanyak 4 kali terhadap 6 badan usaha, selama periode tahun 2025: Kabupaten Bogor (PTPN 1 Gunung Mas, Bobocabin Gunung Mas, *Eiger Adventure Land*); DI Yogyakarta (ViaVia Resto); dan DKI Jakarta (Shangri-La Jakarta, Hotel Mulia).

Dalam kegiatan ini, Kementerian Pariwisata melakukan inspeksi lapangan dan verifikasi dokumen untuk memverifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha, mengacu pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (sebelum terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.



Gambar 3.10. Dokumentasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

4) Literasi Penerapan Standar Usaha

Kegiatan ini dilaksanakan di dua daerah, yaitu di Kota Bogor dan Kota Medan. Kegiatan ini merupakan manifestasi nyata dari upaya Kementerian Pariwisata bersama Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan kualitas usaha pariwisata.



Gambar 3.11. Dokumentasi Literasi Penerapan Standar Usaha Pariwisata

D. Penguatan Rantai Pasok dan Jejaring Usaha Pariwisata

Program penguatan rantai pasok dan jejaring usaha pariwisata merupakan upaya membangun sistem distribusi barang dan jasa yang terintegrasi, efisien dan berbasis kelokalan untuk mendukung operasional sektor pariwisata agar meningkatkan dampak ekonomi lokal, meningkatkan kualitas layanan wisata dan memperkuat ketahanan industri. Program ini diimplementasikan oleh Kementerian Pariwisata melalui kegiatan:

Forum Sinergi Mitra Industri Pariwisata Tematik Indonesia (SIMPATI).

Forum Sinergi Mitra Industri Pariwisata Tematik Indonesia (SIMPATI) diselenggarakan sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola dan ekosistem nasional *wellness tourism*, serta menjadi wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mengembangkan industri *wellness* yang berdaya saing dan berkelanjutan. Melalui forum ini, Kementerian Pariwisata berdiskusi dengan industri, kunjungan lapangan, perumusan rencana kolaborasi strategis industri *wellness tourism* Indonesia, memperkenalkan delapan pilar industri *wellness* sebagai kerangka pengembangan dan arah kebijakan pariwisata berbasis kebugaran, dan menghimpun profil industri *wellness* sebagai dasar penyusunan Profiling Nasional *Wellness Tourism* Indonesia untuk menjadi referensi dalam perencanaan program, kebijakan, dan promosi sektor *wellness tourism*.

E. Peningkatan Skala Usaha UMKM

Program yang dirancang sebagai inkubator komprehensif bagi pelaku usaha pariwisata untuk naik kelas, dari skala lokal menuju standar global. Melalui fasilitasi pengembangan bisnis, perluasan akses pasar dan pendanaan hijau sehingga

terbangun ketangguhan bisnis yang berkelanjutan. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan:

1) Literasi Keuangan bagi Pelaku Usaha Pariwisata

Sektor pariwisata di Indonesia tidak hanya menjadi tulang punggung dalam peningkatan devisa negara, tetapi juga menjadi motor penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan pelaku usaha skala kecil dan menengah. Dalam ekosistem tersebut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai fondasi ekonomi nasional. UMKM mengambil peran vital mulai dari jasa akomodasi, kuliner, transportasi lokal, hingga penyediaan cinderamata dan atraksi budaya. Namun UMKM mendapat tantangan utama, salah satunya adalah minimnya literasi keuangan dan lemahnya manajemen keuangan usaha.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Pariwisata, mengambil peran strategis dalam mendorong kapasitas pelaku usaha pariwisata di daerah. Kegiatan literasi keuangan bagi Pelaku Usaha Pariwisata di Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang merupakan salah satu bentuk konkret intervensi pemerintah dalam upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Tujuan atau sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan literasi keuangan bagi pelaku usaha pariwisata ini adalah: memberikan informasi dan wawasan kepada pelaku usaha pariwisata terkait pengelolaan keuangan agar layak memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan; dan memberikan *sharing session* terkait perkembangan bisnis usaha pariwisata.

Kegiatan peningkatan literasi keuangan bagi pelaku usaha pariwisata akan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan secara efisien, tertib, dan berkelanjutan, termasuk dalam perencanaan usaha dan akses pembiayaan. Sehingga dapat meningkatkan kinerja dan nilai tambah usaha tersebut serta mendorong naiknya omzet dan produktivitas usaha yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan PDRB sektor Akmamin.



Gambar 3.12. Dokumentasi Kegiatan Literasi Keuangan bagi Pelaku Usaha Pariwisata di Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang

2) Peningkatan Kapasitas Usaha dan Perluasan Akses Permodalan di Desa Wisata

Desa wisata merupakan salah satu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil kreativitas masyarakat yang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. pengembangan desa wisata di Indonesia menjadi salah satu strategi penting dalam upaya pembangunan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan, namun pengembangan tersebut tidak dapat berlangsung optimal tanpa peningkatan kapasitas usaha dan perluasan akses permodalan bagi masyarakat desa. Kegiatan peningkatan kapasitas usaha dan perluasan akses permodalan diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata, sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha, memperkuat ekosistem desa wisata, serta memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha pariwisata. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi katalis dalam mendorong desa wisata menuju desa wisata maju dan mandiri.

Kegiatan peningkatan kapasitas usaha dan perluasan akses permodalan di Desa Wisata bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha desa wisata;
- b. Mendorong kolaborasi dan diferensiasi produk desa wisata;
- c. Memberikan edukasi pengelolaan keuangan dan kesiapan SDM;
- d. Memperluas akses permodalan UMKM melalui perbankan; dan
- e. Meningkatkan literasi keuangan dan kewaspadaan terhadap pinjaman ilegal.

Kegiatan tersebut berupa kegiatan bimbingan teknis dengan melibatkan narasumber yang akan menyampaikan materi terkait pengembangan usaha dan akses permodalan. Peserta kegiatan ini adalah pelaku usaha pariwisata yang berlokasi di Desa Wisata tersebut. Pada periode tahun 2025 kegiatan ini dilaksanakan di tiga lokasi yaitu di Desa Lebakmuncang, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Desa Wisata Cempaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, serta Desa Wisata Lapeo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.



Gambar 3.13. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Perluasan Akses Permodalan

F.

Wonderful Indonesia Scale-up Hub (WISH) Paket Tour Gastronomy

Kementerian Pariwisata menginisiasi sebuah program *Wonderful Indonesia Scale-up Hub (WISH)* paket tur gastronomi. Kegiatan ini juga di inisiasi sebagai bagian dalam rangka mendukung salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata yaitu Pariwisata Berkualitas melalui pemanfaatan pariwisata minat khusus sebagai daya tarik pada bidang gastronomi.

Program ini telah mendokumentasikan ke dalam Katalog 15 Besar Peserta WISH Paket Tur Gastronomi untuk digunakan sebagai instrumen promosi strategis Kementerian di *platform* seperti *Indonesia.travel*, *event* dalam dan luar negeri ataupun juga dapat digunakan sebagai channel distribusi yang dapat dimanfaatkan oleh Asosiasi untuk menjual paket tur tersebut kepada konsumen. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah para pelaku usaha *travel and tour operation* baik perusahaan/perorangan yang memiliki paket wisata tur gastronomi/kuliner. Kegiatan ini telah diselenggarakan pada tanggal 28 Mei - 10 Agustus 2025, diselenggarakan secara *online*.



Gambar 3.14. Dokumentasi Katalog Peserta Program WISH paket Tour Gastronomy Tahun 2025

G. Demoday Wonderful Indonesia Scale-up Hub (WISH)

Program *Wonderful Indonesia Scale-up Hub* (WISH) 2025 diselenggarakan sebagai upaya Kementerian Pariwisata untuk memperkuat ekosistem usaha pariwisata di Indonesia. Latar belakang program ini berangkat dari kebutuhan pelaku usaha untuk memperoleh akses permodalan dan akses pasar yang lebih kuat. Sebagai inti dari program pengembangan akses pasar dan akses permodalan sekaligus salah satu *output* utama program ini, Kemenpar menyelenggarakan kegiatan Demoday WISH. Demoday WISH mendatangkan para pelaku untuk bertemu langsung dengan para calon mitra dari Lembaga Pembiayaan, Asosiasi, *Platform Digital* hingga NGO.



Gambar 3.15. Dokumentasi Kegiatan Demoday Wonderful Indonesia Scale-up Hub

Analisa Keberhasilan Pencapaian Target IKSS.1.1

Sejumlah faktor yang berkontribusi dalam pencapaian target IKSS.1.1 rasio PDB pariwisata pada tahun 2025, Kementerian Pariwisata telah melaksanakan berbagai program strategis yang mendorong pergerakan aktivitas wisata, khususnya perjalanan wisatawan nusantara, yaitu melalui penyelenggaraan Karisma Event Nusantara (KEN) 2025, penguatan kampanye perjalanan wisata dalam negeri #DiIndonesiaAja, serta pelaksanaan program unggulan seperti Gerakan Wisata Bersih, Pariwisata Berkualitas, Desa Wisata, dan *Event by Indonesia*, yang secara langsung mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor terkait pariwisata. Selain itu, Kementerian Pariwisata telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target Rasio PDB Pariwisata melalui penguatan dan tata kelola usaha pariwisata, kemudahan berusaha industri dan pelaku usaha pariwisata, serta penguatan rantai pasok dan jejaring usaha pariwisata, yang secara langsung mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor terkait pariwisata.

Analisa Penghambat Pencapaian Target IKSS.1.1

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKSS.1.1 rasio PDB pariwisata pada tahun 2025, di antaranya:

- 1) Penerapan Kebijakan Efisiensi Anggaran oleh Kementerian Keuangan, sehingga menyebabkan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan;
- 2) Belum maksimalnya penerapan kebijakan untuk mendorong kemitraan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha pariwisata dan industri besar;
- 3) Belum optimalnya kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung pariwisata yang belum sepenuhnya merata di seluruh destinasi.
- 4) Keterbatasan konektivitas ke beberapa destinasi prioritas, khususnya di wilayah luar Jawa;
- 5) Keterbatasan dalam pengukuran peningkatan pendapatan pelaku usaha pariwisata provinsi yang mempengaruhi akurasi pengukuran Rasio PDB Pariwisata.

Upaya dan Strategi Kedepan Pencapaian Target IKSS.1.1

Upaya dan strategi kedepan yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target IKSS.1.1 rasio PDB pariwisata di masa mendatang, antara lain:

- 1) Mengoptimalkan kembali perencanaan dan koordinasi dengan lintas kedeputan dan *stakeholder* (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan komunitas lokal) dalam menyusun kebijakan pengelolaan destinasi, pendampingan pengembangan bisnis industri pariwisata, serta penyelenggaraan *event*, yang terintegrasi agar program yang dijalankan *inline* untuk meningkatkan PDB sektor pariwisata dalam mencapai target RPJMN;

- 2) Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi yang implementatif dengan K/L untuk meningkatkan kemudahan berusaha pelaku usaha pariwisata (perluasan akses pasar dan pembiayaan), kualitas infrastruktur, serta konektivitas (integrasi transportasi multimoda) menuju destinasi di Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata Regeneratif.

IKSS.1.2 Devisa Pariwisata

Nilai devisa sektor pariwisata adalah penerimaan devisa dari sektor pariwisata yang berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara. Untuk mengukur pencapaian nilai devisa sektor pariwisata Kementerian Pariwisata, data diambil dari nilai penerimaan (ekspor) devisa jasa perjalanan wisman (*travel inbound*) yang terdapat pada Neraca Perdagangan Jasa Perjalanan di Laporan Neraca Pembayaran Indonesia, yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Metode perhitungan IKSS terkait dengan nilai devisa sektor pariwisata dengan formula sebagai berikut:

Data diambil dari nilai penerimaan (ekspor) devisa jasa perjalanan wisman (*travel inbound*) yang terdapat pada Neraca Perdagangan Jasa Perjalanan

Berdasarkan Laporan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Indonesia-Bank Indonesia sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, yaitu sebesar 18,28 milyar USD atau senilai 18.275 juta USD (3.808 juta USD di TWI + 4.390 juta USD di TWII + 5.624 juta USD di TWIII + 4.452 juta USD di TWIV), yang merupakan nilai ekspor perjalanan wisatawan mancanegara, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3. Neraca Pembayaran Indonesia Transaksi Berjalan Jasa-Jasa Triwulan IV Tahun 2025 (Juta USD)

Feb 2026

ITEMS	2023	2024				2025					
	Total	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Total	Tw.I*	Tw.II*	Tw.III*	Tw.IV**	Total**
Jasa-jasa	-17,676	-4,214	-4,978	-4,188	-5,105	-18,485	-5,360	-5,221	-4,371	-4,871	-19,823
- Ekspor	33,807	8,712	9,077	10,894	10,407	39,090	9,024	10,510	12,100	11,170	42,805
- Impor	-51,283	-12,926	-14,054	-15,082	-15,512	-57,575	-14,384	-15,732	-16,471	-16,041	-62,628
A. Jasa manufaktur	733	187	165	163	172	687	201	210	204	207	822
- Ekspor	733	187	165	163	172	687	201	210	204	207	822
- Impor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Jasa pemeliharaan dan perbaikan	-337	-120	-102	-120	-197	-539	-115	-89	-230	-199	-633
- Ekspor	424	118	109	118	146	490	125	135	171	119	551
- Impor	-762	-238	-211	-238	-343	-1,029	-240	-224	-401	-318	-1,184
C. Transportasi	-8,704	-2,432	-2,152	-2,030	-2,269	-8,883	-2,360	-2,076	-2,115	-2,281	-8,833
- Ekspor	4,316	1,123	1,197	1,607	1,579	5,506	1,364	1,512	1,586	1,601	6,064
- Impor	-13,020	-3,555	-3,349	-3,637	-3,847	-14,389	-3,724	-3,588	-3,702	-3,882	-14,897
a. Penumpang	-1,354	-513	-275	-138	-222	-1,147	-398	-187	-177	-217	-978
- Ekspor	625	143	251	322	327	1,042	313	348	323	298	1,282
- Impor	-1,979	-655	-526	-460	-548	-2,189	-710	-535	-500	-515	-2,260
b. Barang	-7,364	-1,936	-1,805	-1,891	-1,984	-7,618	-1,762	-1,811	-1,744	-1,859	-7,175
- Ekspor	2,531	686	686	946	936	3,253	762	899	986	1,042	3,689
- Impor	-9,895	-2,621	-2,490	-2,838	-2,919	-10,869	-2,524	-2,710	-2,730	-2,900	-10,864
c. Lainnya	14	16	-72	-1	-63	-120	-201	-194	-194	-206	-679
- Ekspor	1,160	294	261	338	316	1,210	289	265	277	282	1,093
- Impor	-1,146	-278	-333	-339	-380	-1,330	-490	-344	-472	-467	-1,773
D. Perjalanan	2,318	1,085	-366	1,273	1,252	3,245	1,052	46	1,814	1,569	4,482
- Ekspor	14,001	3,633	3,835	5,164	4,072	16,703	3,808	4,390	5,624	4,452	18,275
- Impor	-11,683	-2,547	-4,201	-3,890	-2,820	-13,459	-2,756	-4,344	-3,810	-2,883	-13,793
E. Jasa konstruksi	-43	-30	6	30	28	33	-24	60	32	-22	46
- Ekspor	530	129	161	164	187	642	147	184	169	154	653
- Impor	-573	-160	-155	-135	-159	-609	-171	-123	-137	-176	-607
F. Jasa asuransi dan dana pensiun	-1,885	-490	-468	-526	-618	-2,101	-492	-537	-570	-608	-2,206
- Ekspor	239	34	49	72	100	255	31	32	39	40	143
- Impor	-2,124	-524	-517	-597	-718	-2,356	-523	-569	-609	-647	-2,349
G. Jasa keuangan	-1,153	-278	-449	-629	-558	-1,914	-499	-423	-725	-496	-2,143
- Ekspor	1,958	363	417	275	562	1,617	251	559	336	372	1,518
- Impor	-3,111	-641	-866	-904	-1,120	-3,531	-750	-982	-1,061	-867	-3,660
H. Biaya penggunaan kekayaan intelektual	-2,290	-899	-513	-498	-586	-2,466	-540	-540	-574	-613	-2,267
- Ekspor	213	31	48	53	58	189	42	51	60	65	217
- Impor	-2,504	-900	-561	-551	-644	-2,656	-582	-591	-634	-678	-2,484
I. Jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi	-2,707	-331	-427	-547	-448	-1,752	-668	-538	-614	-599	-2,419
- Ekspor	2,774	915	957	890	998	3,760	811	1,001	1,164	1,215	4,191
- Impor	-5,480	-1,246	-1,383	-1,437	-1,446	-5,512	-1,478	-1,538	-1,778	-1,815	-6,610
J. Jasa bisnis lainnya	-3,937	-1,004	-720	-1,387	-1,926	-5,037	-1,912	-1,399	-1,671	-1,971	-6,953
- Ekspor	7,864	2,062	2,029	2,249	2,416	8,756	2,140	2,310	2,598	2,716	9,763
- Impor	-11,801	-3,067	-2,749	-3,636	-4,342	-13,793	-4,052	-3,709	-4,269	-4,687	-16,717
K. Jasa personal, kultural, dan rekreasi	49	10	7	21	17	56	2	36	38	80	156
- Ekspor	212	44	49	60	65	219	59	77	83	146	365
- Impor	-163	-33	-42	-39	-48	-163	-57	-41	-46	-67	-210
L. Jasa pemerintah	279	57	41	61	27	188	-4	27	41	61	125
- Ekspor	342	73	60	80	53	266	47	49	65	83	243
- Impor	-62	-16	-19	-19	-26	-80	-51	-22	-24	-21	-118
Memorandum:											
Jumlah pelawat (ribuan orang) ¹⁾											
- Ke dalam negeri	11,678	3,032	3,410	3,930	3,515	13,887	3,164	3,888	4,381	3,954	15,387
- Ke luar negeri	7,519	2,188	2,321	2,146	2,292	8,947	2,331	2,362	2,129	2,344	9,166

Sumber: Laporan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Realisasi Triwulan IV 2025, Bank Indonesia

Tabel 3.4. Persandingan Realisasi Devisa Pariwisata Tahun 2024-2025

IKSS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	SATUAN	2024	TARGET PERJANJIAN KINERJA	2025		GROWTH
			REALISASI		REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	
IKSS.1.2	Devisa Pariwisata	Milyar USD	16,71	17,1	18,28*	106,87%	9,37%

Catatan:

*) Data sementara NPI Bank Indonesia TW I-IV 2025, Februari 2026

Berdasarkan hasil persandingan realisasi Devisa Pariwisata Tahun 2024–2025, kinerja indikator IKSS.1.2 sudah melampaui target yang ditetapkan. Pada Tahun 2024, realisasi devisa pariwisata tercatat sebesar US\$16,71 miliar, sedangkan berdasarkan data sementara per Februari 2026 (NPI Bank Indonesia Triwulan I–IV), devisa pariwisata tercatat sebesar US\$18,28 miliar. Dibandingkan dengan target Tahun 2025 yang berada pada US\$17,1 miliar, capaian realisasi mencapai 106,87% dari target.

Realisasi nilai devisa pariwisata Tahun 2025, sebagaimana disajikan pada gambar grafik berikut ini.

IKSS.1.2. Devisa Pariwisata (milyar USD)



Gambar 3.16. Grafik Target Tahun 2024-2025 dan Realisasi Tahun 2025 Devisa Pariwisata

Sektor pariwisata Indonesia pada Tahun 2025 menunjukkan pemulihan lonjakan yang signifikan pasca pandemi, dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang terus meningkat setiap bulan. Peningkatan devisa pariwisata Indonesia pada Tahun 2025 tidak terlepas dari perkembangan positif tren pariwisata global, di mana mobilitas wisata internasional terus menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan, dimana menunjukkan pemulihan sekitar 108% dibandingkan Tahun 2019.

Wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia tetap menjadi kontributor utama terhadap perolehan devisa sektor pariwisata. Secara makro, target devisa pariwisata diperoleh dari banyaknya jumlah kunjungan wisman dan belanja wisman selama berkunjung di Indonesia. Hal ini juga perlu didukung dengan meningkatkan *seamless experience* dan pengembangan destinasi pariwisata memadai menciptakan pengalaman wisata yang nyaman dan berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian target devisa pariwisata ini, beberapa program strategis yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, antara lain:

A.**Dukungan Kebijakan Terkait Konektivitas Melalui Diseminasi Implementasi Aplikasi All Indonesia**

Layanan kebandarudaraan merupakan salah satu aspek strategis dalam mendukung sektor konektivitas di Indonesia. Berbagai upaya perbaikan dan optimalisasi terus dilakukan untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat, salah satunya melalui implementasi sistem deklarasi All Indonesia pada 1 Oktober 2025. Pemerintah Republik Indonesia resmi meluncurkan "All Indonesia" yakni aplikasi resmi sistem deklarasi kedatangan yang akan menyederhanakan seluruh proses masuk penumpang internasional termasuk wisatawan ke wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaan berbagai program strategis nasional terkait konektivitas tersebut, Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan memberikan dukungan melalui diseminasi informasi implementasi All Indonesia kepada pelaku perjalanan dan asosiasi terkait melalui kanal resmi Kementerian maupun kanal informasi lainnya. Kementerian Pariwisata juga mendukung penyampaian data dari total 21 parameter utama, yang salah satunya disediakan oleh Kemenpar dalam rangka evaluasi dan monitoring 36 bandara sesuai KepMenHub Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional. Kolaborasi yang baik telah memberikan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan kualitas layanan di sektor transportasi.

Selanjutnya, layanan kebandarudaraan akan diarahkan pada pilar penguatan ekosistem antara lain: tata kelola kolaborasi lintas sektor, transformasi digital, infrastruktur, perbaikan berkelanjutan, mekanisme audit, serta penyusunan regulasi pendukung, termasuk untuk penguatan kebijakan implementasi All Indonesia. Upaya ini kiranya dapat mendukung target Bandara Soekarno Hatta menjadi 10 bandara terbaik dunia pada 2029. Selain itu dalam rangka meningkatkan utilisasi bandar udara yang telah naik statusnya menjadi bandar udara internasional, maka Kemenpar ke depannya diharapkan akan mendorong promosi destinasi wisata dan sinergi dengan pengelola bandara dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan melalui bandara internasional serta memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk promosi pariwisata baik nasional maupun internasional.

Capaian pengisian All Indonesia periode 1 Oktober hingga 10 Desember 2025 rata-rata mencapai 87,28%, dan pengisian di origin/negara asal mencapai sekitar 69,05%. Angka ini masih perlu terus ditingkatkan, khususnya pengisian di origin, agar dapat memberi *seamless experience* bagi pengunjung yang tiba di Indonesia. Penambahan bahasa asing dan fitur lainnya juga terus dilakukan dalam rangka penyempurnaan kesisteman.

B.**Akselerasi Pengembangan Destinasi Pariwisata 3A (Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas)**

Salah satu program unggulan Kementerian Pariwisata adalah pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis 3A, yaitu Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas, sebagai dasar dalam meningkatkan daya saing dan kualitas destinasi pariwisata. Kemudahan akses menuju destinasi, serta ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai menciptakan pengalaman wisata yang nyaman dan berkelanjutan.

1) Fasilitas Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata

Program dukungan fasilitasi pengembangan amenitas dan aksesibilitas merupakan bagian dari upaya strategis Kementerian Pariwisata dalam meningkatkan kualitas destinasi melalui penguatan infrastruktur pendukung dan tata kelola yang berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengusung tema yang menjadi isu di daerah seperti *risk management*, Pengelolaan Desa Wisata, dan Pengembangan destinasi pariwisata regeneratif.

Selama pelaksanaannya, dukungan fasilitasi pengembangan amenitas dan aksesibilitas telah dilaksanakan di berbagai daerah. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan kapasitas daerah dalam mengelola destinasi, peningkatan kualitas amenitas dan aksesibilitas, penyesuaian pembangunan pariwisata dengan karakteristik dan potensi wilayah, meliputi Provinsi Lampung (Kabupaten Way Kanan dan Lampung Timur), Jawa Barat (Majalengka, Kuningan, Indramayu, dan Bekasi), DI Yogyakarta, Kepulauan Riau (Batam), Sumatera Utara (Simalungun), serta DKI Jakarta.

Sementara itu, dukungan fasilitasi pengembangan amenitas dan aksesibilitas juga diarahkan pada isu-isu strategis destinasi, seperti tata kelola destinasi, penguatan amenitas dan aksesibilitas, pengelolaan desa wisata, keamanan dan keselamatan destinasi bahari, pengembangan Paket 3B (Banyuwangi, Bali Barat, dan Bali Utara), serta pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui pendekatan *High Quality Sustainable Tourism (HQST)*.



Gambar 3.17. Dokumentasi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata di Banyuwangi, Bali, dan Kota Batam

2) Pendampingan *Geopark*

Dukungan dan Pendampingan *Geopark* merupakan bagian dari upaya strategis Kementerian Pariwisata dalam menjaga pengakuan UNESCO *Global Geopark* (UGGp) sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola, koservasi, dan pemanfaatan warisan geologi secara berkelanjutan. Kegiatan ini difokuskan pada pemenuhan standar UGGp melalui penguatan manajemen kawasan serta integrasi berbagai aspek seperti Edukasi, Konservasi, dan Pariwisata Berkelanjutan. Pendampingan ini diarahkan untuk memastikan keberlanjutan status UGGp, meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan geopark, serta memperkuat kontribusi geopark sebagai destinasi pariwisata unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan pendampingan *Geopark* yang telah dilaksanakan, meliputi antara lain: Forum Penguatan Tata Kelola Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata di Kawasan Ciletuh Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark, Kota Sukabumi; *The First International Conference Geotourism Destination Toba Caldera* UGGp, bertempat di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara; Lokakarya Nasional Penguatan Tata Kelola Belitung UGGp, bertempat di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Observer mendampingi Revalidasi UGGp Rinjani – Lombok bersama Assesor UNESCO, bertempat di Geosite yang representatif di *Geopark* Rinjani-Lombok yang akan diajukan dan direkomendasikan ke UNESCO pada sidang UNESCO *Global Geopark*.



Gambar 3.18. Dokumentasi Pendampingan di Geopark Danau Toba dan Rinjani-Lombok

3) Pendampingan Pengembangan *High Quality Sustainable Tourism (HQST)* Raja Ampat dan Bali

Pelaksanaan dan pengembangan *High Quality Sustainable Tourism (HQST)* di Raja Ampat dan Bali merupakan bagian dari upaya strategis Kementerian Pariwisata dalam mendukung pengembangan model destinasi pariwisata yang berorientasi pada konservasi, peningkatan kualitas destinasi, dan juga pemberdayaan masyarakat lokal. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan destinasi pariwisata yang seimbang sehingga pengembangan pariwisata dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Kegiatan pendampingan pengembangan *High Quality Sustainable Tourism* Raja Ampat dan Bali, antara lain: Forum Diskusi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat dan Konsep *High Quality Sustainable Tourism (HQST)*.



Gambar 3.19. Forum Diskusi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat dan Konsep *High Quality Sustainable Tourism*

C. Perancangan dan Tata Kelola Destinasi

1) Penyusunan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN)

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RIDPN merupakan amanat berjenjang mulai dari:

- a. Undang-Undang No. 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan pariwisata Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi, perlu didukung dengan pelaksanaan kebijakan penyelesaian 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang dipandu melalui Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional / *Integrated Tourism Master Plan* (RIDPN/ITMP);
- b. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang mengamanatkan bahwa pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan dilaksanakan dengan serangkaian strategi yaitu pengembangan DPP Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi dan Morotai; dan
- c. Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisata yaitu upaya strategis yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.

Kegiatan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Tahun Anggaran 2025 difokuskan pada penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) untuk 4 (empat) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP): (1). Labuan Bajo, (2). Bromo-Tengger-Semeru, (3). Wakatobi, dan (4). Morotai. Sesuai dengan masukan dari Kementerian PPN/Bappenas, telah disepakati bahwa proses perbaikan dilakukan secara bertahap dimulai dari RIDPN Labuan Bajo dan dilanjutkan oleh 3 (tiga) RIDPN lainnya yaitu Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi dan Morotai.



Gambar 3.20. RIDPN 10 Destinasi Prioritas Sebagai Acuan Pengembangan

2) Koordinasi Penyusunan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN)

Berdasarkan RPJMN 2025–2029, Indonesia menargetkan berada pada posisi ke-20 dunia dalam indeks TTDI pada tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Pariwisata aktif menjalin koordinasi lintas sektor dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemangku kepentingan terkait. Upaya ini dilakukan untuk menyamakan pemahaman mengenai pentingnya TTDI, mendorong perbaikan berkelanjutan pada sektor yang masih memerlukan peningkatan, dan memastikan ketersediaan data yang mutakhir serta berkualitas sebagai acuan mitra WEF dalam penyusunan indikator TTDI.

Peningkatan daya saing pariwisata Indonesia juga diperkuat melalui kolaborasi yang lebih erat dengan Pemerintah Daerah, salah satunya melalui penerapan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN), yang disusun dengan menggunakan kerangka, metodologi, dan indikator yang mengacu pada TTDI, namun telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nasional maupun daerah.

a. Indeks Pembangunan Pariwisata/Travel & Tourism Development Index (TTDI)

Untuk mencapai target peningkatan peringkat TTDI sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, Indonesia menargetkan masuk dalam 20 besar dunia pada tahun 2029. Hal ini berarti Indonesia perlu mampu melampaui beberapa negara maju seperti Swedia, UEA, Belgia, Irlandia, dan Polandia. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi serta kolaborasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan yang

berkontribusi pada indikator TTDI, agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

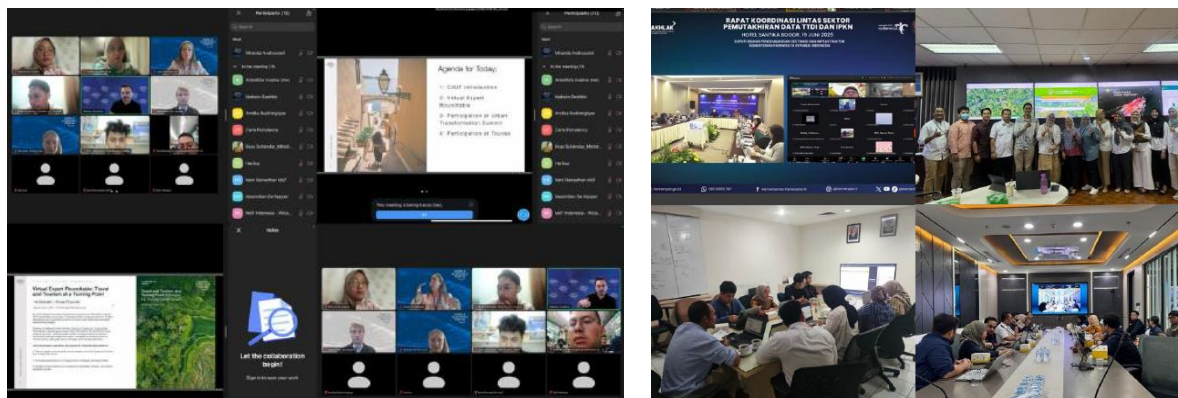
Berbagai program kolaborasi dalam penguatan peringkat TTDI dilakukan melalui: Koordinasi dengan *World Economic Forum* (WEF) dan Koordinasi Pemutakhiran Data TTDI dengan Kementerian/Lembaga terkait. Kegiatan Koordinasi dengan WEF dilakukan untuk memastikan data dan kondisi aktual pembangunan pariwisata Indonesia tercermin secara akurat dalam penilaian TTDI. Pemerintah dapat melakukan verifikasi, klarifikasi, dan memberikan masukan atas data dan metodologi yang digunakan WEF, serta membuka peluang partisipasi Indonesia dalam diskusi internasional, penyempurnaan metodologi indeks, dan kemitraan strategis lintas sektor.

Untuk itu di tahun 2025 telah dilaksanakan pertemuan dengan perwakilan WEF yang diwakili untuk membahas rencana pengukuran TTDI 2026 dan kondisi pariwisata Indonesia. Dari hasil pertemuan tersebut didapatkan bahwa proyek pengukuran TTDI akan didahului dengan pembentukan Tim Kerja, pelaksanaan survei pengumpulan data dan pengelolaan data. Adapun kriteria penilaian yang terkait dengan pillars dan indikator akan tetap sama dengan pengukuran yang digunakan dalam TTDI 2024. Pertemuan selanjutnya dilaksanakan untuk membahas kegiatan dan program kepariwisataan yang diselenggarakan oleh WEF yang akan dilaksanakan di akhir tahun 2025.

Selanjutnya, dalam memaksimalkan peran satuan kerja Kementerian Pariwisata serta Kementerian/Lembaga terkait, telah dilakukan identifikasi awal dan pemetaan program/kegiatan yang ada di satuan kerja Kementerian yang berpengaruh dalam peningkatan capaian indikator TTDI Indonesia yang kemudian dilakukan konfirmasi oleh Kementerian/Lembaga dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring maupun luring.

Pada tahun 2025, terdapat 8 (delapan) kegiatan pertemuan dalam rangka identifikasi kegiatan dan program Kementerian/Lembaga, meliputi: Rapat koordinasi internal Kementerian Pariwisata, Rapat koordinasi lintas K/L, Rapat audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Rapat audiensi dengan Kementerian Kehutanan, Rapat audiensi dengan Kementerian Kesehatan, Rapat audiensi dengan Kementerian Perhubungan, Rapat audiensi dengan Kementerian ESDM, dan Rapat audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Berdasarkan rapat koordinasi dan audiensi tersebut terdapat 22 indikator dari total 84 indikator sekunder TTDI yang datanya belum tersedia dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Keterlambatan penyampaian data ini disebabkan oleh ketidaktersediaan data yang relevan atau yang dapat menggambarkan secara tepat indikator TTDI yang menjadi tanggung jawab K/L tersebut.



Gambar 3.21. Dokumentasi Kegiatan Koordinasi dengan WEF dan Kementerian/Lembaga

b. Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN)

Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) merupakan inisiatif yang dibangun dalam upaya koordinasi untuk meningkatkan kesadaran nasional dalam membentuk ekosistem kepariwisataan yang memiliki keberlanjutan dan ketahanan tinggi, sehingga mengakselerasi pembangunan kepariwisataan nasional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pembangunan pariwisata Indonesia di tingkat global.

IPKN bertujuan untuk mendukung strategi peningkatan capaian *Travel and Tourism Development Index (TTDI)* Indonesia, menjadi acuan bagi Kementerian/ Lembaga, dan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas kepariwisataan nasional, serta meningkatkan "Awareness" terhadap capaian pembangunan kepariwisataan nasional.

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan IPKN 2026, pada tahun 2025 Kementerian Pariwisata melakukan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk konfirmasi ketersediaan data indikator sekunder IPKN, harmonisasi revisi Peraturan Menteri Pariwisata tentang Penyelenggaraan IPKN dan penyusunan Keputusan Menteri Pariwisata tentang Kerangka Penilaian IPKN.

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN
INDEKS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan dan kualitas kepariwisataan Indonesia melalui penyelenggaraan indeks pembangunan kepariwisataan nasional, diperlukan komitmen dan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan bidang kepariwisataan di pusat dan daerah;
- b. bahwa indeks pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu strategi mendorong peningkatan kualitas dan daya saing kepariwisataan dalam rangka peningkatan peringkat Indonesia pada *Travel and Tourism Development Index*;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Penyelenggaraan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

RANCANGAN
KEPUTUSAN
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...
TENTANG
KERANGKA PENILAIAN
INDEKS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor ... tentang Penyelenggaraan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata tentang Kerangka Penilaian Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4906) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
3. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1);

Gambar 3.22. *Draf Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan IPKN dan Draf Keputusan Menteri Pariwisata tentang Kerangka Penilaian IPKN*

Analisa Keberhasilan Pencapaian Target IKSS.1.2

Sejumlah faktor yang berkontribusi dalam pencapaian target IKSS.1.2 devisa pariwisata pada tahun 2025, Kementerian Pariwisata telah melaksanakan berbagai program strategis antara lain penguatan promosi pariwisata internasional melalui kampanye terpadu, peningkatan konektivitas penerbangan internasional, pengembangan produk pariwisata bernilai tambah tinggi, serta penyelenggaraan berbagai *event* internasional dan nasional berskala besar. Kementerian Pariwisata juga memperkuat program strategis seperti Pariwisata Berkualitas, dan promosi destinasi prioritas yang mendorong peningkatan kualitas kunjungan serta lama tinggal wisman. Selain itu, penguatan kolaborasi internasional dengan berbagai negara mitra turut memperluas pasar wisata Indonesia.

Analisa Penghambat Pencapaian Target IKSS.1.2

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKSS.1.2 devisa pariwisata pada tahun 2025, di antaranya:

- 1) Persaingan ketat antarnegara tujuan wisata dalam menarik pasar wisman, khususnya dengan Negara di Asia Tenggara;
- 2) Kebijakan Bebas Visa kunjungan (BVK) untuk 160+ negara (sebelum COVID) menjadi 13 negara (saat ini), padahal devisa pariwisata jauh melebihi nilai PNBP dari aplikasi visa;
- 3) Masih terbatasnya konektivitas dari dan ke destinasi pariwisata (belum tersedia penerbangan langsung dan penerbangan internasional);
- 4) Keterbatasan kapasitas dan kualitas tata kelola destinasi dan infrastruktur pendukung pariwisata di beberapa destinasi pariwisata prioritas;
- 5) Belum meratanya kesiapan sumber daya manusia pariwisata di daerah;
- 6) Keterbatasan data kunjungan dan pengeluaran wisatawan yang sepenuhnya terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 7) Masih terdapat regulasi yang tumpang tindih di Kementerian/Lembaga/Instansi maupun yang belum mendukung.

Upaya dan Strategi Kedepan Pencapaian Target IKSS.1.2

Upaya dan strategi kedepan yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target IKSS.1.2 devisa pariwisata di masa mendatang, antara lain:

- 1) Memperkuat koordinasi serta membangun sinergi lintas kementerian/lembaga terkait dan pemangku kepentingan, dalam rangka mendukung peningkatan konektivitas (reaktivasi rute transportasi), aksesibilitas internasional (penambahan *direct flight* dan *seat capacity*), serta kebijakan BKV, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara;
- 2) Menumbuhkan inovasi dalam pengembangan destinasi pariwisata, desa wisata berdaya saing dengan menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas dan berkelanjutan, berkolaborasi dengan unsur pentahelix, yang meliputi kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, yang diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan pembelanjaan wisatawan mancanegara.

IKSS.1.3. Pengeluaran Wisatawan Mancanegara

Angka capaian pengeluaran wisatawan mancanegara diperoleh dari perhitungan *Average Spending Per Arrival (ASPA)* wisman dari data yang diperoleh dari BPS. *Spending* atau pengeluaran wisman adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan. Pengeluaran wisman antara lain untuk akomodasi, makan minum, penerbangan domestik, transportasi lokal, belanja, cinderamata, hiburan, kesehatan/ kecantikan, kursus/ pelatihan, rekreasi, paket wisata lokal, jasa pemandu wisata, dan pengeluaran lainnya. Data rata-rata pengeluaran

wisatawan mancanegara terdapat dalam Statistik Pengeluaran Wisatawan Mancanegara, yang dipublikasikan oleh BPS.

Metode perhitungan IKSS.1.3 pengeluaran wisatawan mancanegara dengan cara sebagai berikut:

Data rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan diperoleh dari hasil *Passenger Exit Survey (PES)* yang dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden (wisman) menggunakan *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* di pintu keberangkatan internasional bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas

Berdasarkan data Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik, pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan Tahun 2025, adalah sebesar 1.267,07 USD. Pencapaian IKSS.4 pengeluaran wisatawan mancanegara disajikan pada tabel berikut:

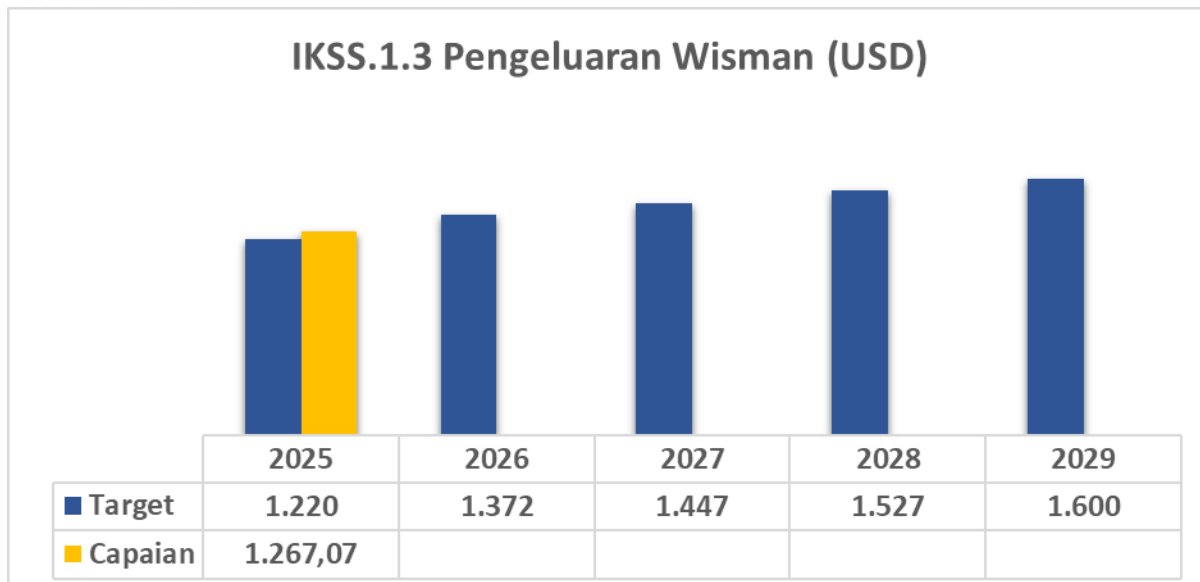
Tabel 3.5. Persandingan Realisasi Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Tahun 2024-2025

IKSS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	SATUAN	2024	2025			GROWTH
			REALISASI	TARGET PERJANJIAN KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	
IKSS.1.3	Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	USD/kunjungan	1.391,85	1.220	1.267,07*	103,86%	(8,97%)

Catatan:

*) Data Bahan Tayang Berita Resmi Statistik No. 13/02/Th. XXIX, 2 Februari 2026

Berdasarkan hasil persandingan realisasi Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Tahun 2024–2025, indikator kinerja IKSS.4 menunjukkan capaian yang melampaui target meskipun terjadi penurunan nilai rata-rata pengeluaran per kunjungan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara tercatat sebesar USD 1.391,85 per kunjungan. Sementara itu, pada Tahun 2025, berdasarkan data 2025, realisasi pengeluaran wisatawan mancanegara sebesar USD 1.267,07 per kunjungan. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap melampaui target Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar USD 1.220 per kunjungan, dengan tingkat pencapaian mencapai 103,86 persen.



Gambar 3.23. Grafik Target Tahun 2024-2025 dan Realisasi Tahun 2025 Pengeluaran Wisatawan Mancanegara

Berdasarkan data Tahun 2025, mengindikasikan bahwa meskipun pola belanja wisatawan mengalami penyesuaian, nilai pengeluaran masih berada di atas ekspektasi kebijakan, yang mencerminkan keberlanjutan daya tarik produk pariwisata Indonesia serta efektivitas penguatan kualitas destinasi dan layanan pariwisata.

Kementerian Pariwisata telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target peningkatan pengeluaran wisatawan mancanegara. Beberapa kegiatan unggulan Kementerian Pariwisata yang dilakukan untuk meningkatkan pengeluaran wisatawan mancanegara adalah sebagai berikut:

A. *The 37th Joint Meeting of the UN Tourism Commission for East Asia and the Pacific and Commission for South Asia di Jakarta*

Kegiatan ini merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh UN Tourism, dihadiri oleh sekitar 132 delegasi dari 16 negara anggota, 3 negara *associate members*, serta perwakilan organisasi internasional dan sektor swasta pariwisata kawasan Asia Timur, Pasifik, dan Asia Selatan. Forum gabungan ke-37 Komisi Asia Timur dan Pasifik serta Asia Selatan ini menjadi agenda strategis dalam penguatan pariwisata regional, dengan pembahasan meliputi arah pengembangan pariwisata global, strategi pemulihan, inovasi, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Penyelenggaraan *37th CAP-CSA Joint Commission Meeting 2025* di Jakarta" tanggal 15-16 April 2025 oleh Kementerian Pariwisata dapat dilihat dari segi ekonomi, acara ini berhasil menciptakan peningkatan produksi barang dan jasa sekitar Rp7.706 juta, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp4.378 juta. Artinya, setiap Rp1 yang dibelanjakan selama acara ini berkontribusi tambahan sekitar Rp1,63 terhadap perekonomian Indonesia, yang menunjukkan bagaimana acara yang diselenggarakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Acara ini juga turut memberikan dampak langsung terhadap sektor-sektor

terkait, seperti akomodasi, transportasi, kuliner, dan lain-lain. Acara ini diselenggarakan dengan skala lebih kecil dibandingkan dengan festival atau konser besar, tetapi dampaknya terhadap sektor ekonomi lokal tetap signifikan. Sekitar 197 orang terserap menjadi pekerja selama acara berlangsung, memberikan kontribusi pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.



Gambar 3.24. Dokumentasi Kegiatan CAP-CSA 2025

B. Southeast Asia Business Event Forum (SEABEF) 2025

SEABEF merupakan forum strategis yang membahas isu utama pengembangan *Business Events* sekaligus mendorong kolaborasi regional dan peluang ASEAN sebagai destinasi terpadu *Business Events*. Diselenggarakan atas inisiatif Kementerian Pariwisata bersama pemangku kepentingan industri, SEABEF 2025 merupakan penyelenggaraan ketiga sejak 2023 dan diikuti oleh 252 peserta yang terdiri atas 247 delegasi domestik dan 5 delegasi internasional. Forum ini berfungsi sebagai wadah kolaborasi dan berbagi praktik terbaik, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia terhadap penerapan prinsip green event dalam industri MICE regional.

Dari sisi dampak ekonomi, SEABEF 2025 tanggal 10-11 Oktober 2025 menghasilkan estimasi total pengeluaran peserta sebesar sekitar Rp637,7 juta, dengan rata-rata pengeluaran Rp2.481.700 per peserta domestik dan Rp4.943.100 per peserta internasional. Pengeluaran tersebut mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, belanja produk, aktivitas tambahan, dan pengeluaran lainnya, yang menunjukkan kontribusi langsung kegiatan MICE terhadap perekonomian. Kementerian Pariwisata memberikan dukungan penyelenggaraan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca acara.



Gambar 3.25. Dokumentasi Kegiatan SEABEF 2025

E. Rasa Rempah Indonesia (S'Rasa)

Rasa Rempah Indonesia (S'Rasa) adalah sinergi antar Kementerian/Lembaga, Diaspora, Swasta dan UMKM yang bertujuan menjadikan rempah dan rasa dari Indonesia sebagai duta bangsa di kancah mancanegara. Program ini merupakan gerakan diplomasi kuliner global yang tidak hanya menyajikan makanan, tetapi juga menghadirkan identitas, cerita dan warisan budaya Indonesia melalui restoran Indonesia di berbagai negara.

Launching S'Rasa (Rasa Rempah Indonesia) telah dilaksanakan pada hari Kamis 28 Agustus 2025 berlokasi di Sarinah- Thamrin, Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan dari 6 Kementerian/ Lembaga. Terdapat 6 Kementerian turut mendukung program Rasa Rempah Indonesia yang diatur melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), yaitu: Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian UMKM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata. Adapun PKS tersebut berlaku sejak tahun 2025 hingga 2029, pada 5 (lima) restoran Indonesia di 5 (lima) kota, yaitu Amsterdam, London, New York, Tokyo dan Sydney.



Gambar 3.26. Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 6 Kementerian

F. The 2nd BIMP-EAGA Tourism Village Forum

Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Filipina Growth Area (BIMP-EAGA) memiliki komitmen untuk berfungsi sebagai *platform* guna mempercepat pembangunan sosial-ekonomi. Didorong oleh visi BIMP-EAGA 2035 yang baru, yaitu "*Socially Inclusive, Open, Aligned, and Resilient*" atau yang disebut SOAR, kerja sama subregional ini berfokus pada pencapaian empat tujuan atau hasil utama, yaitu *climate-smart agro-industry and fisheries, seamless travel and sustainable tourism destination, network of production hubs and attractive investment destination*, dan *agile and future-ready human resources*.

Sebagai *Standing Chair* pada *Tourism Cluster*, Kementerian Pariwisata melihat adanya kemungkinan untuk memperkuat posisi desa wisata sebagai salah satu kekuatan fundamental destinasi BIMP-EAGA. Dengan demikian, hal ini tidak hanya dapat meningkatkan keunggulan kompetitif BIMP-EAGA sebagai destinasi

pariwisata, tetapi juga menunjukkan bahwa BIMP-EAGA sebagai single tourism destination dengan memamerkan produk desa wisata yang saling melengkapi satu sama lain.

Oleh karena itu sebagai bentuk implementasi dari kerjasama BIMP-EAGA, Kementerian Pariwisata telah menyelenggarakan the 2nd BIMP-EAGA *Tourism Village Forum* di Maros, Sulawesi Selatan pada 23 Agustus 2025 yang juga merupakan rangkaian dari pertemuan the 21st BIMP-EAGA *Tourism Cluster Meeting*. Forum ini juga merupakan kelanjutan dari the 1st BIMP-EAGA *Tourism Village Forum* di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.



Gambar 3.27. Dokumentasi Kegiatan BIMP-EAGA *Tourism Village Forum*

Forum ini bertujuan untuk mengatasi isu-isu dan tantangan dalam pengembangan desa wisata di kawasan BIMP-EAGA. Selain itu, forum ini juga mengumpulkan pemangku kepentingan terkait dari pemerintah, industri, dan khususnya komunitas lokal dari masing-masing negara anggota untuk membahas strategi, penilaian pasar, dan kemungkinan merancang kolaborasi timbal balik dalam membentuk ekosistem desa wisata sub kawasan di antara para pemangku kepentingan. Pada forum ini menghasilkan konsep kerja sama antar desa wisata BIMP-EAGA yang disebut BIMP-EAGA *Tourism Village Network*.

Analisa Keberhasilan Pencapaian Target IKSS.1.3

Sejumlah faktor yang berkontribusi dalam pencapaian target IKSS.1.3 pengeluaran wisatawan mancanegara pada tahun 2025, Kementerian Pariwisata telah melaksanakan berbagai program strategis seperti penyelenggaraan *event* internasional dan promosi produk wisata minat khusus, antara lain penyelenggaraan CAP-CSA *Joint Commission Meeting 2025* di Jakarta, *Southeast Asia Business Event Forum (SEABEF) 2025*, *Sustainable Wholistic Wellness International Conference & Expo (SWWICE) 2025*.

Analisa Penghambat Pencapaian Target IKSS.1.3

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKSS.1.3 pengeluaran wisatawan mancanegara pada tahun 2025, di antaranya:

- 1) Belum meratanya pengembangan produk dan destinasi wisata bernilai tambah tinggi, yang menjadi bagian dari fungsi pengembangan destinasi dan produk pariwisata;
- 2) Keterbatasan kapasitas dan kualitas layanan pariwisata di sejumlah destinasi, terkait dengan fungsi peningkatan kualitas dan daya saing SDM serta standar pelayanan pariwisata;
- 3) Pemanfaatan data belanja wisman yang belum optimal sebagai dasar perumusan kebijakan dan program, khususnya dalam fungsi perencanaan, pemasaran, dan evaluasi kebijakan berbasis data.

Upaya dan Strategi Kedepan Pencapaian Target IKSS.1.3

Upaya dan strategi kedepan yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target IKSS.1.3 pengeluaran wisatawan mancanegara di masa mendatang, antara lain:

- 1) Penguatan diversifikasi produk wisata/atraksi pada destinasi regeneratif dan prioritas melalui pemanfaatan minat khusus sebagai daya tarik: *gastronomi, marine, wellness, wastra, art & design*, untuk menarik wisatawan mancanegara berdaya beli tinggi dan meningkatkan pengeluaran;
- 2) Penyelenggaraan *event* berkualitas yang menjadi ciri khas Indonesia dan mengangkat nama pariwisata Indonesia di kancah global;
- 3) Penguatan kualitas amenities dan aksesibilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan SDM berstandar internasional;
- 4) Penguatan promosi berbasis digital yang lebih terarah pada pasar potensial dan wisatawan berkualitas untuk mendorong optimalisasi pola belanja pada sektor akomodasi, transportasi, kuliner, dan ekonomi kreatif;
- 5) Peningkatan efektivitas promosi berbasis digital yang lebih terarah pada pasar potensial dan wisatawan berkualitas untuk mendorong optimalisasi pola belanja pada sektor akomodasi, transportasi, kuliner, dan ekonomi kreatif.

IKSS.1.4 Tenaga Kerja Pariwisata

Indikator ini mengukur jumlah Sumber Daya Manusia yang bekerja di sektor pariwisata nasional. Data jumlah tenaga kerja pariwisata didapat dari hasil olahan Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan BPS.

Metode perhitungan IKSS.1.4 tenaga kerja pariwisata dengan cara sebagai berikut:

Perhitungan jumlah tenaga kerja pariwisata menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), dengan cakupan sektor pariwisata menggunakan KBLI Bidang Pariwisata.

Tenaga kerja pariwisata ini diukur melalui sisi penawaran (*supply*) dan seberapa banyak *supply*/pasokan tenaga kerja Indonesia yang terserap pada sektor pariwisata. Penghitungan tenaga kerja pariwisata sebelumnya menggunakan KBLI 2009 Bidang Pariwisata (mencakup 103 kode KBLI) dan penimbang proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk Tahun 2010. Sedangkan penghitungan tenaga kerja pariwisata Tahun 2022 ini (data 2018 – 2021) menggunakan metodologi terbaru, yaitu menggunakan KBLI Tahun 2015 Bidang Pariwisata dan penimbang proyeksi penduduk hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015. KBLI Tahun 2015 bidang pariwisata merupakan turunan dari KBLI tahun 2015 (Perka BPS No.19 tahun 2017) yang juga dilengkapi dengan sumber klasifikasi baik nasional maupun internasional. KBLI Tahun 2015 bidang pariwisata teridentifikasi dan terurai menjadi 158 KBLI yang dikelompokkan dalam 12 (dua belas) jenis industri pariwisata (*IRTS 2008 UNWTO*). Sumber data adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) bulan Agustus 2018 – 2021.

Berdasarkan data sementara Sakernas Februari 2025, jumlah tenaga kerja pariwisata Tahun 2025 diperoleh capaian sebesar 25,91 juta orang. Pencapaian IKSS.1.4 tenaga kerja pariwisata disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6. Persandingan Realisasi Tenaga Kerja Pariwisata Tahun 2024-2025

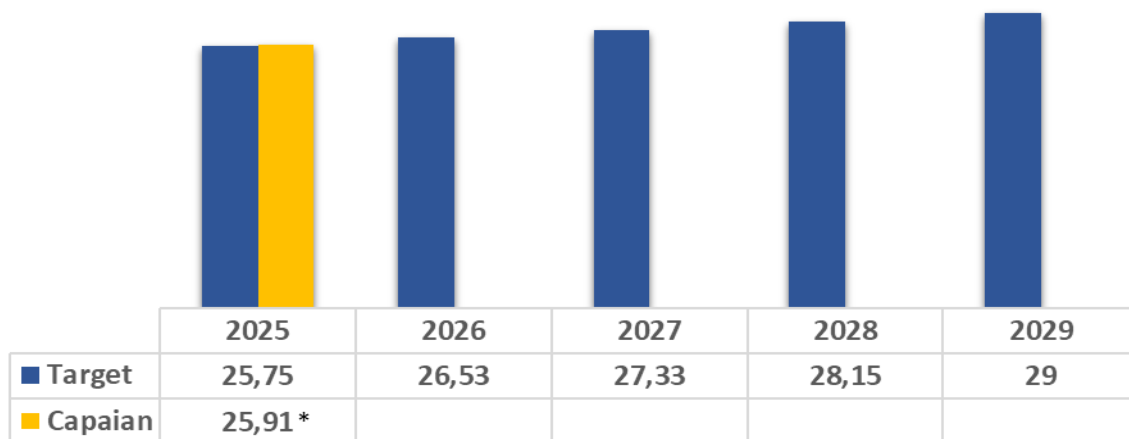
IKSS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	SATUAN	2024	2025		GROWTH	
			REALISASI	TARGET PERJANJIAN KINERJA	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN
IKSS.1.4	Tenaga Kerja Pariwisata	Juta orang	25,01	25,75	25,91*	100,62%	3,60%

Catatan:

*) Data sementara, Sakernas Agustus 2025 Badan Pusat Statistik

Berdasarkan hasil persandingan realisasi Tenaga Kerja Pariwisata Tahun 2024–2025, indikator kinerja IKSS.1.4 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan. Pada Tahun 2024, jumlah tenaga kerja pariwisata tercatat sebesar 25,01 juta orang. Pada Tahun 2025, berdasarkan data sementara SAKERNAS Februari 2025 Badan Pusat Statistik, jumlah tenaga kerja pariwisata meningkat menjadi 25,91 juta orang atau tumbuh sebesar 3,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi tersebut telah melampaui target Tahun 2025 sebesar 25,75 juta orang dengan tingkat capaian mencapai 100,62 persen.

IKSS.1.4 Tenaga Kerja Pariwisata (juta orang)



Gambar 3.28. Grafik Target Tahun 2024-2025 dan Realisasi Tahun 2025 Tenaga Kerja Pariwisata

Peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata di Indonesia pada Tahun 2025 ini mencerminkan semakin kuatnya peran sektor pariwisata sebagai penggerak penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan meningkatnya aktivitas usaha pariwisata, pengembangan destinasi, serta pelaksanaan berbagai program unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Upaya Kementerian Pariwisata untuk mendukung capaian kinerja jumlah tenaga kerja pariwisata adalah melalui pelaksanaan program yang mendukung pencapaian target IKSS di atas, diantaranya adalah:

A. Insentif PPh 21 DTP dan Program Magang

Dalam Program Paket Ekonomi 8+4+5, terdapat dua program yang berkaitan langsung dengan pariwisata: kebijakan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dengan pendapatan hingga 10 juta per bulan, dan program magang satu tahun dengan uang saku dari Pemerintah, yang dapat dimanfaatkan fresh graduate pariwisata.

Mengaktivasi insentif PPh 21 DTP, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait telah diterbitkan pada 20 Oktober 2025. Sosialisasi kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan akan kembali dilakukan oleh Kementerian Pariwisata untuk memastikan penerapan kebijakan ini merata, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.

Atas program magang satu tahun yang juga dapat dimanfaatkan lulusan pariwisata, 39 perusahaan di sektor pariwisata telah berpartisipasi, membuka 457 lowongan. Sosialisasi untuk perluasan program ke Kementerian/Lembaga telah dilaksanakan agar semakin banyak lulusan pariwisata memperoleh pengalaman praktik langsung dan kemudahan akses ke dunia kerja.



Gambar 3.29. Dokumentasi Pembahasan Insentif PPh 21 DTP dan Program Magang

B.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata - Wisuda Politeknik Pariwisata

Pada periode September 2025 hingga November 2025, Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di seluruh Indonesia merayakan momen wisuda, dengan 2.905 lulusan dari 6 Poltekpar. Seluruh rangkaian wisuda dihadiri oleh Menteri atau Wakil Menteri Pariwisata yang menekankan pentingnya menjadi calon pemimpin di bidang pariwisata yang tidak hanya memiliki kesiapan memasuki dunia kerja, tetapi juga memiliki kemampuan menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan pelestarian lingkungan dan budaya.

Berikut ini adalah data jumlah lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata Tahun 2025 dari 6 (enam) Poltekpar:

Tabel 3.7. Jumlah Lulusan Poltekpar Tahun 2025

NO	POLTEKPAR	JUMLAH LULUSAN (orang)
1	Politeknik Pariwisata NHI Bandung	599
2	Politeknik Pariwisata Bali	661
3	Politeknik Pariwisata Makassar	565
4	Politeknik Pariwisata Medan	539
5	Politeknik Pariwisata Lombok	286
6	Politeknik Pariwisata Palembang	255
TOTAL LULUSAN		2.905

Sumber Data: Kementerian Pariwisata Tahun 2025



Gambar 3.30. Dokumentasi Kegiatan Wisuda Politeknik Pariwisata

C. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan keterampilan tenaga kerja pariwisata, Kementerian Pariwisata terus melakukan berbagai upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemberdayaan dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat guna memastikan tersedianya layanan pariwisata yang berkualitas dan berstandar kompetensi. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 2.622 SDM industri telah mengikuti uji kompetensi dan pelatihan berbasis kompetensi, 27.393 masyarakat memperoleh pelatihan *soft skills*, *managerial skills*, serta pariwisata berkelanjutan, dan 1.018 SDM aparaturnya serta pendidikan vokasi mengikuti pelatihan dan uji kompetensi, termasuk JF Adyatama, Pelatihan Dasar CPNS Mandiri, dan pelatihan teknis pariwisata dasar.

Berbagai upaya pengembangan kapasitas dilakukan untuk mendorong daya saing dan keterampilan tenaga kerja pariwisata, meliputi:

1) Destinasi Pariwisata Bali

Untuk memastikan tenaga kerja yang terserap memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri, program pelatihan dan sertifikasi kompetensi berbasis standar nasional dan internasional secara aktif diselenggarakan. Politeknik Pariwisata Bali meluluskan 661 mahasiswa yang sudah siap bekerja pada tahun 2025 yang siap diterima oleh industri pariwisata. Program magang selama satu tahun dengan bantuan dari pemerintah melibatkan puluhan perusahaan di bidang pariwisata, sementara pemerintah terus meningkatkan sertifikasi kompetensi bagi para pekerja di bidang perhotelan, pemandu wisata, dan kuliner. Kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan pelatihan berlandaskan "*Tourism 5.0*" (digital dan AI) membantu mempersiapkan tenaga kerja yang siap beradaptasi dengan tren global. Dengan pendekatan vokasi yang terpadu, Bali tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan kualitas layanan yang kompetitif dan berkelanjutan.

2) Destinasi Pariwisata *Greater Jakarta*

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kemampuan dan mampu bersaing, program pelatihan serta sertifikasi kompetensi diselenggarakan di area *greater Jakarta*. Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan pemerintah daerah serta asosiasi industri secara aktif menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi untuk para pekerja di bidang perhotelan, tata hidang, pemandu wisata, dan penyelenggaraan acara. Sertifikasi profesi dalam bidang pariwisata melalui LSP juga diadakan untuk menjamin standar kualitas layanan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, insentif seperti program magang selama satu tahun dengan dana tunai dari pemerintah serta insentif pajak penghasilan (PPH) 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata telah membantu meningkatkan kemampuan tenaga kerja sekaligus menjaga kemampuan membeli mereka di *greater Jakarta*.

Di Jawa Barat, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor pariwisata, dilaksanakan pelatihan vokasi pariwisata melalui Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang telah menghasilkan 599 lulusan pada tahun 2025, serta beberapa sekolah menengah kejuruan pariwisata di wilayah Jawa Barat. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi dilaksanakan secara intensif, mencakup bidang pemanduan wisata, pengelolaan pondok wisata, gastronomi dan pelayanan prima. Kolaborasi dengan industri melalui program magang memastikan keterpaduan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Sertifikasi profesi melalui LSP serta pelatihan berbasis kompetensi digital (*Tourism 5.0*) semakin memperkuat kemampuan tenaga kerja di sektor pariwisata Jawa Barat dalam bersaing di tingkat global dan memenuhi harapan kunjungan wisatawan yang semakin tinggi.

Di Banten, untuk memastikan yang kompeten sesuai dengan karakteristik destinasi Banten, berbagai program pelatihan dan sertifikasi kompetensi dilaksanakan secara berkelanjutan. Pelatihan untuk pengelola desa wisata, pemandu ekowisata, serta pelayanan restoran dan akomodasi dilakukan dalam kerja sama dengan LSP dan asosiasi industri. Pendidikan vokasi melalui SMK Pariwisata dan sekolah kelautan di Serang dan Pandeglang, serta program *link and match* dengan industri perhotelan dan *travel*, menghasilkan lulusan yang siap diserap pasar kerja. Sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata bahari, pengelolaan kawasan konservasi, serta kuliner khas Banten semakin memperkuat kemampuan tenaga kerja lokal dalam bersaing. Selain itu, Dukungan program magang industri dan insentif pelatihan yang diberikan pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja pariwisata Banten dalam menghadapi persaingan regional.

3) Destinasi Pariwisata Kepulauan Riau

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan karakteristik destinasi kepulauan, Kepulauan Riau giat menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi berbasis potensi lokal. Pelatihan pengelolaan destinasi bahari, pemandu wisata sejarah (seperti di

Pulau Penyengat), serta pelayanan kapal pesiar dan yacht dilaksanakan bekerja sama dengan LSP dan asosiasi industri. Pendidikan vokasi melalui SMK Kelautan dan Pariwisata di Batam, Tanjungpinang, dan Karimun, serta program magang industri dengan hotel dan operator wisata bahari, menghasilkan lulusan yang siap masuk ke pasar. Selanjutnya, sertifikasi halal untuk produk usaha mikro kecil menengah di desa wisata, seperti yang sudah dilakukan di Pulau Penyengat bersama BPJPH, membantu meningkatkan kemampuan para pengusaha lokal. Dukungan program pelatihan *digital marketing* dan *Tourism 5.0* juga diberikan agar tenaga kerja pariwisata Kepulauan Riau mampu bersaing di kawasan regional Asia Tenggara.

4) Destinasi Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dalam mengelola destinasi warisan dunia, BYP (Jawa Tengah) mengembangkan program pendidikan vokasi khusus di bidang pariwisata budaya. Program ini berlangsung di beberapa sekolah menengah kejuruan pariwisata di Magelang, Klaten, dan Surakarta, serta bekerja sama dengan Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi spesifik seperti pemandu wisata budaya yang bersertifikasi nasional, tenaga konservasi artefak, dan ahli interpretasi warisan budaya dilaksanakan bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya dan LSP Pariwisata. Kemudian program magang yang terstruktur di hotel heritage, museum, dan situs arkeologi yang dilengkapi sertifikasi kemampuan bahasa asing dan *digital guiding*, memastikan SDM pariwisata mampu memberikan pengalaman wisata berkualitas tinggi sekaligus menjaga kelestarian warisan budaya untuk keberlanjutan ekonomi kawasan.

Untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil yang menguasai kekhasan budaya Yogyakarta, DIY mengembangkan sistem pendidikan vokasi pariwisata budaya melalui Universitas Gadjah Mada (UGM) Program Studi Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo, dan jejaring SMK Pariwisata yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi budaya Jawa. Program pelatihan dan sertifikasi kompetensi spesifik seperti pemandu wisata budaya yang bersertifikasi, pengelola homestay budaya, serta ahli konservasi cagar budaya dilaksanakan bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY dan LSP. Lebih lanjut, inisiatif magang di Keraton serta pelatihan *digital storytelling* bagi pengelola wisata budaya dilengkapi dengan sertifikasi kemampuan berbahasa asing dan teknologi wisata (*Tourism 5.0*), sehingga tenaga kerja pariwisata DIY tidak hanya mampu melestarikan warisan budaya lokal, tetapi juga bisa beradaptasi dengan tren pariwisata global yang lebih berkelanjutan.

5) Destinasi Pariwisata Danau Toba

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil yang memahami karakteristik destinasi Danau Toba, pemerintah bersama *stakeholder* mengembangkan program pendidikan vokasi pariwisata. Melalui Politeknik Pariwisata Medan menghasilkan 539 lulusan tahun 2025, serta SMK

pariwisata di Sumatera Utara yang berfokus pada kompetensi kepariwisataan alam dan budaya. Pelatihan dan sertifikasi keterampilan khusus seperti pemandu wisata geologi Danau Toba, pengelola tempat penginapan yang memenuhi standar nasional, serta ahli masakan tradisional Batak dilakukan bersama dengan LSP dan organisasi industri terkait. Program magang terstruktur di hotel, restoran, serta operator wisata danau, dilengkapi sertifikasi bahasa asing dan keterampilan digital wisata, memastikan SDM pariwisata Danau Toba mampu memberikan pelayanan berkualitas tinggi sekaligus menjaga kelestarian alam, budaya, dan aset berkelanjutan.

6) Destinasi Pariwisata Lombok- Gili Tramena

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan memahami karakteristik destinasi bahari serta budaya, Lombok-Gili Tramena mengembangkan program pendidikan vokasi pariwisata bahari melalui Politeknik Pariwisata Lombok yang akan menghasilkan 286 lulusan pada tahun 2025. Selain itu, terdapat beberapa SMK di NTB yang fokus pada bidang kelautan dan pariwisata, serta mengutamakan kompetensi dalam bidang pariwisata bahari dan budaya. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi spesifik seperti pemandu wisata selam (*diving guide*) yang bersertifikasi internasional, pengelola akomodasi berstandar *eco-resort*, serta ahli kuliner *seafood* tradisional dilakukan melalui kerja sama dengan LSP Pariwisata dan asosiasi industri internasional. Program magang terstruktur di bidang pariwisata laut, operator wisata bahari, dan event internasional dilengkapi dengan sertifikasi bahasa asing, keterampilan digital wisata, dan sertifikasi halal untuk produk lokal, memastikan SDM pariwisata Lombok-Gili Tramena mampu bersaing di pasar global sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem bahari sebagai aset utama destinasi.

7) Destinasi Pariwisata Manado-Likupang

Manado-Likupang memperluas pendidikan vokasi pariwisata bahari melalui SMK kelautan dan pariwisata di Manado dan Bitung serta kolaborasi dengan Politeknik Pariwisata Makassar untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil yang memahami karakteristik destinasi bahari. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi spesifik seperti pemandu wisata selam (*diving guide*) bersertifikasi internasional (PADI/SSI), pengelola akomodasi berstandar *eco-resort*, dan ahli kuliner khas Minahasa dilaksanakan melalui LSP dan asosiasi industri selam internasional. Program magang terstruktur di *resort*, operator selam, dan hotel, dilengkapi sertifikasi bahasa asing (khususnya Mandarin dan Inggris) serta keterampilan digital pariwisata, memastikan SDM pariwisata Manado-Likupang mampu bersaing di pasar global sekaligus menjaga kelestarian alam bawah laut sebagai aset utama destinasi.

8) Destinasi Pariwisata Bangka Belitung

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan memahami karakteristik destinasi geologi serta bahari, Bangka Belitung mengembangkan program pendidikan vokasi pariwisata melalui SMK pariwisata dan kelautan di Pangkalpinang dan Sungailiat, serta melakukan

kolaborasi dengan politeknik pariwisata yang menyediakan lulusan yang siap bekerja. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi tertentu seperti pemandu wisata geologi yang sudah bersertifikat, pengelola akomodasi yang memenuhi standar nasional, serta ahli kuliner seafood tradisional dilakukan secara bersama-sama dengan LSP dan berbagai asosiasi industri. Kemudian, program magang yang terstruktur di hotel, *resort*, dan operator wisata bahari dilengkapi dengan sertifikasi bahasa asing serta keterampilan digital dalam sektor pariwisata, sehingga tenaga kerja pariwisata di Bangka Belitung mampu memberikan pelayanan berkualitas tinggi sekaligus menjaga kelestarian alam dan warisan geologinya sebagai aset pariwisata yang berkelanjutan.

9) Destinasi Pariwisata Raja Ampat

Raja Ampat mengembangkan program pendidikan vokasi bidang kelautan dan kepariwisataan bahari melalui SMK Kelautan dan sekolah tinggi terkait di Papua Barat, serta program magang khusus di resort dan operator selam internasional. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi tinggi seperti sertifikasi instruktur selam internasional (*PADI/SSI Master Instructor*), pelatihan penerjemah ekosistem laut, serta sertifikasi pengelola *eco-resort* dilakukan secara bersamaan dengan LSP dan lembaga sertifikasi internasional. Program beasiswa pendidikan kelautan dan kursus bahasa asing khusus pariwisata alam dilengkapi dengan sertifikasi digital marketing untuk ekowisata dan fotografi bawah laut. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pariwisata Raja Ampat agar mampu memenuhi standar pelayanan wisata alam premium secara global, sekaligus menjadikan mereka sebagai agen konservasi yang berperan dalam menjaga kelestarian biodiversitas laut sebagai aset utama destinasi wisata.

10) Destinasi Pariwisata Labuan Bajo

Saat ini Labuan Bajo sedang mengembangkan program pelatihan vokasi di bidang pariwisata alam dan kelautan melalui beberapa SMK pariwisata dan kelautan di Manggarai Barat, serta bekerja sama dengan politeknik pariwisata memproduksi lulusan yang siap bekerja. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi khusus seperti pemandu wisata alam yang bersertifikasi nasional (interpretasi ekosistem Komodo), sertifikasi pengelola akomodasi berstandar *eco-resort*, serta pelatihan keselamatan wisata bahari dilaksanakan bekerja sama dengan LSP. Kemudian, program magang terstruktur di resort, operator kapal wisata, dan lembaga konservasi dilengkapi dengan sertifikasi bahasa asing dan keterampilan digital tourism, memastikan SDM pariwisata Labuan Bajo mampu memberikan pelayanan berkualitas tinggi sekaligus menjadi agen pelestarian alam yang menjaga keberlanjutan destinasi sebagai warisan dunia.

11) Destinasi Pariwisata Bromo Tengger Semeru

Bromo-Tengger-Semeru mengembangkan program pendidikan vokasi di bidang pariwisata alam dan budaya melalui SMK di Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, serta Probolinggo, serta bekerja sama dengan

politeknik pariwisata nasional yang menghasilkan lulusan siap kerja. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi khusus seperti pemandu wisata gunung yang telah memiliki sertifikasi nasional, pelatihan keselamatan kegiatan alam (SAR dasar), sertifikasi pengelola homestay berstandar, serta pelatihan interpretasi geologi dan budaya Tengger dilaksanakan bekerja sama dengan LSP serta instansi terkait. Selain hal tersebut, program magang yang terstruktur di hotel, biro perjalanan adventure, dan desa wisata dilengkapi dengan sertifikasi bahasa asing dan digital tourism skills, memastikan SDM pariwisata Bromo-Tengger-Semeru mampu memberikan pelayanan berkualitas tinggi sekaligus menjadi pelestari alam dan budaya lokal yang berkelanjutan.

12) Destinasi Pariwisata Wakatobi

Dalam rangka mengembangkan program pendidikan vokasi di bidang kelautan dan pariwisata bahari, serta meningkatkan kualifikasi tenaga kerja melalui SMK Kelautan dan sekolah teknik perkapalan di Sulawesi Tenggara, serta melalui program magang khusus di *resort* dan operator penyelaman internasional. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi tinggi, seperti sertifikasi instruktur selam internasional (PADI/SSI), pelatihan interpreter konservasi laut, serta sertifikasi pengelola eco-resort, dilakukan secara bersama-sama dengan LSP dan organisasi sertifikasi internasional. Program kursus bahasa asing dan digital marketing untuk ekowisata ini dilengkapi dengan sertifikasi fotografi bawah laut serta pelatihan *first responder*, sehingga tenaga kerja pariwisata Wakatobi mampu memenuhi standar pelayanan wisata alam premium secara global, sekaligus menjadi pelindung ekosistem laut di kawasan Taman Nasional Wakatobi dan Cagar Biosfer UNESCO.

13) Destinasi Pariwisata Morotai

Hingga saat ini, Morotai terus mengembangkan program pendidikan vokasi di bidang sejarah dan kelautan melalui beberapa SMK yang fokus pada pariwisata dan kelautan di Maluku Utara, serta melalui program magang khusus di museum, operator wisata bahari, dan penyedia akomodasi. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi spesifik seperti pemandu wisata sejarah yang telah bersertifikasi, pelatihan konservasi artefak bersejarah, sertifikasi pengelola *homestay*, serta pelatihan keselamatan wisata bahari dilakukan secara bersama dengan LSP Pariwisata, instansi kebudayaan, dan dinas kelautan. Program kursus bahasa asing bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemandu wisata sejarah di Morotai, dilengkapi dengan sertifikasi digital storytelling dan pengarsipan digital warisan budaya. Program ini bertujuan agar SDM pariwisata dapat menyampaikan narasi sejarah secara otentik sekaligus mampu mengelola potensi sumber daya laut secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di destinasi tersebut.

D. **Penyusunan Draft Peraturan Presiden tentang Ratifikasi ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (ASEAN MRA-TP)**

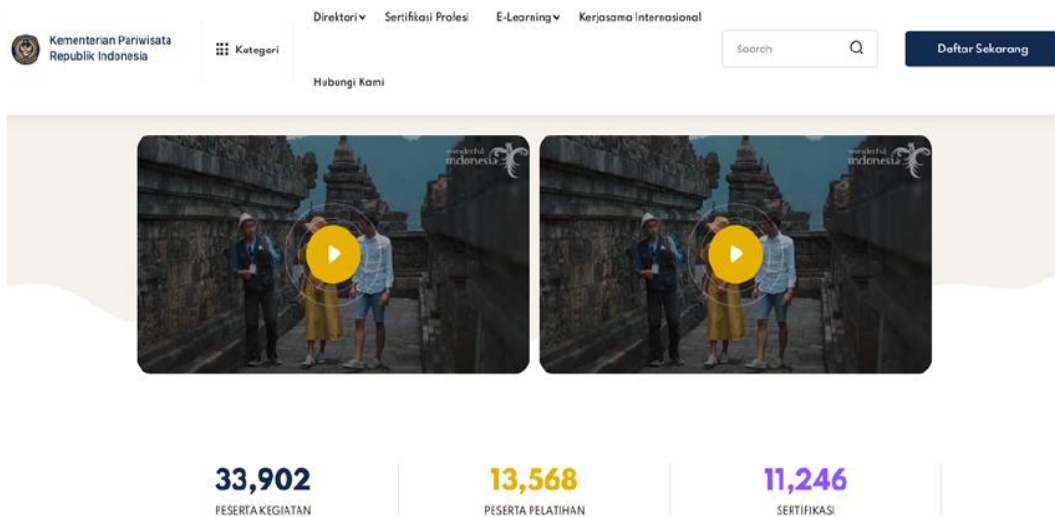
Menteri Pariwisata se-ASEAN menandatangani kesepakatan *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (ASEAN MRA-TP)* pada tahun 2012 di Bangkok. Tujuan dari ASEAN MRA-TP adalah yang telah memiliki standar dan mendorong mobilisasi tourism professionals di kawasan lifikasi yang diakui secara bersama oleh semua ASEAN *Member States* (AMS). Pada tahun 2019, (AMS) sepakat melakukan perubahan pada skema ASEAN MRA-TP dengan menambahkan 2 (dua) *job occupations* baru, yaitu *MICE Professionals* dan *Event Professionals*. Perubahan ini dituangkan pada Kesepakatan *Protocol to Amend ASEAN MRA-TP* yang ditandatangani oleh seluruh Menteri Pariwisata negara anggota ASEAN secara sirkuler (*circular signing*) pada tanggal 24 Juni 2022 di Laos. Kesepakatan pada Protokol ini menyebutkan bahwa seluruh AMS diwajibkan untuk menyerahkan *Instrument of Ratification/Acceptance/Approval* kepada ASEC agar kesepakatan ini dapat dikatakan *Enter Into Force*.

Hingga tahun 2025, terdapat 6 negara yang telah menyampaikan instrumen ratifikasi: Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Filipina dan Kamboja. Saat ini, Indonesia selaku negara penggagas ASEAN MRA-TP sedang melakukan proses internal untuk proses ratifikasi Protokol ini. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku instrumen yang diperlukan untuk melakukan ratifikasi perjanjian tersebut melalui Peraturan Presiden (Perpres). Pada tahun 2025, Kemenpar telah selesai melakukan proses pembahasan substansi Rancangan Perpres dan telah menyelesaikan proses harmonisasi dengan pihak Kementerian Hukum. Pada akhir tahun 2026, diharapkan Kemenpar sudah dapat menyampaikan surat permohonan penandatanganan Rancangan Perpres ini kepada Presiden.

E. **Platform Informasi Pengembangan SDM Pariwisata**

Platform informasi Kementerian Pariwisata terkait pendataan SDM serta kegiatan-kegiatan terkait pengembangan SDM pariwisata terintegrasi dan akuntabel yang dapat diakses melalui <https://pintar.kemenpar.go.id/>. Platform informasi pengembangan SDM pariwisata atau disebut PINTAR, sekaligus melaksanakan amanah program strategis Kementerian Pariwisata dengan fokus transformasi digital. *Platform* ini bertujuan agar SDM pariwisata tidak tumpang tindih antar kegiatan. Pengelolaan data ini untuk memetakan serta menganalisis pelatihan yang dibutuhkan berdasarkan data SDM yang akan ditingkatkan kompetensinya serta mempunyai sertifikasi kompetensi di daerahnya.

Hingga akhir Desember 2025, jumlah SDM pariwisata yang terdata dalam platform ini sebanyak 24.814 orang, yang terdiri dari 13.586 peserta pelatihan dan 11.246 peserta sertifikasi bidang pariwisata.



Gambar 3.31. Dokumentasi Platform <https://pintar.kemenpar.go.id/>

Analisa Keberhasilan Pencapaian Target IKSS.1.4

Sejumlah faktor yang berkontribusi dalam pencapaian target IKSS.1.4 tenaga kerja pariwisata pada tahun 2025, Kementerian Pariwisata telah melaksanakan berbagai program strategis yang mendorong peningkatan tenaga kerja pariwisata melalui program pendidikan vokasi di enam Politeknik Pariwisata, bagi SDM industri program uji kompetensi dan pelatihan berbasis kompetensi, bagi masyarakat pelatihan *soft skills*, *managerial skills*, dan pariwisata berkelanjutan, serta bagi SDM aparatur dan pendidikan vokasi mengikuti pelatihan dan uji kompetensi, termasuk JF Adyatama, Pelatihan Dasar CPNS Mandiri, dan pelatihan teknis pariwisata dasar.

Analisa Penghambat Pencapaian Target IKSS.1.4

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKSS.1.4 tenaga kerja pariwisata pada tahun 2025, di antaranya:

- 1) Belum meratanya kualitas dan kompetensi tenaga kerja pariwisata, khususnya di destinasi berkembang dan desa wisata, sehingga standar pelayanan belum optimal;
- 2) Ketimpangan distribusi tenaga kerja pariwisata antarwilayah;
- 3) Belum optimalnya *link and match* antara kebutuhan industri pariwisata dengan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi;
- 4) Kerentanan penyerapan tenaga kerja pariwisata terhadap fluktuasi permintaan akibat dinamika ekonomi global dan perubahan pola perjalanan wisatawan.

Upaya dan Strategi Kedepan Pencapaian Target IKSS.1.4

Upaya dan strategi kedepan yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target IKSS.1.4 tenaga kerja pariwisata di masa mendatang, antara lain:

- 1) Pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata melalui penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan skema okupasi bidang pariwisata, kurikulum dan modul pelatihan berbasis kompetensi, serta fasilitasi pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja;
- 2) Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan dan magang untuk meningkatkan kapasitas SDM pariwisata (*softskill*, *managerial skill*, dan pariwisata berkelanjutan);
- 3) Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan sertifikasi melalui Politeknik Pariwisata dan institusi pendidikan bidang pariwisata lainnya untuk menyiapkan calon tenaga kerja pariwisata;
- 4) Pengelolaan *Platform* Informasi Pengembangan SDM Pariwisata (PINTAR);
- 5) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (pelatihan dan uji kompetensi, termasuk JF Adyatama, Pelatihan Dasar CPNS Mandiri, dan pelatihan teknis pariwisata dasar).

IKSS.1.5 Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Sesuai dengan *International Recommendations Tourism Statistics (IRTS)* Tahun 2008 yang diterbitkan *United Nations Statistics Division (UNSD)* dan *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)*, definisi wisatawan mancanegara adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari 1 (satu) tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi.

Definisi wisatawan di atas terbagi dalam 2 (dua) kategori tamu, yaitu:

1. Wisatawan (*tourist*) yang berarti setiap pengunjung yang tinggal paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain:
 - a. Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan, olah raga, keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain.
 - b. Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain.
2. Pelancong (*Excursionist*) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise* passenger yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

Target kunjungan wisman didistribusikan ke 2 (dua) unit kerja di Kementerian Pariwisata yang mengawal sasaran program terkait wisman yaitu Deputi Bidang Pemasaran untuk

wisatawan personal dan Deputy Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (*Events*) untuk wisatawan bisnis dan profesional. Data jumlah wisman Kementerian Pariwisata diperoleh dari publikasi Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2025, Berita Resmi Statistik (BRS) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional oleh BPS.

Metode perhitungan IKSS.1.5 kunjungan wisatawan mancanegara dihitung dengan cara sebagai berikut:

- 1) Data diperoleh dari (1) laporan statistik bulanan kedatangan orang (WNI/WNA) yang masuk ke wilayah Indonesia dari Direktorat Jenderal Imigrasi; (2) *Mobile Positioning Data (MPD)* di daerah perbatasan untuk melengkapi data wisman.
- 2) Perhitungan cakupan kategori wisman didasarkan pada *International Recommendations Tourism Statistics (IRTS) 2008* yang diterbitkan *United Nations Statistics Division (UNSD)* dan *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)*.

Berdasarkan data Berita Resmi Statistik BPS, kunjungan wisman Tahun 2025 adalah sebanyak 15,39 juta kunjungan. Dengan data tersebut, pencapaian target jumlah kunjungan wisman, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8. Persandingan Realisasi Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2024-2025

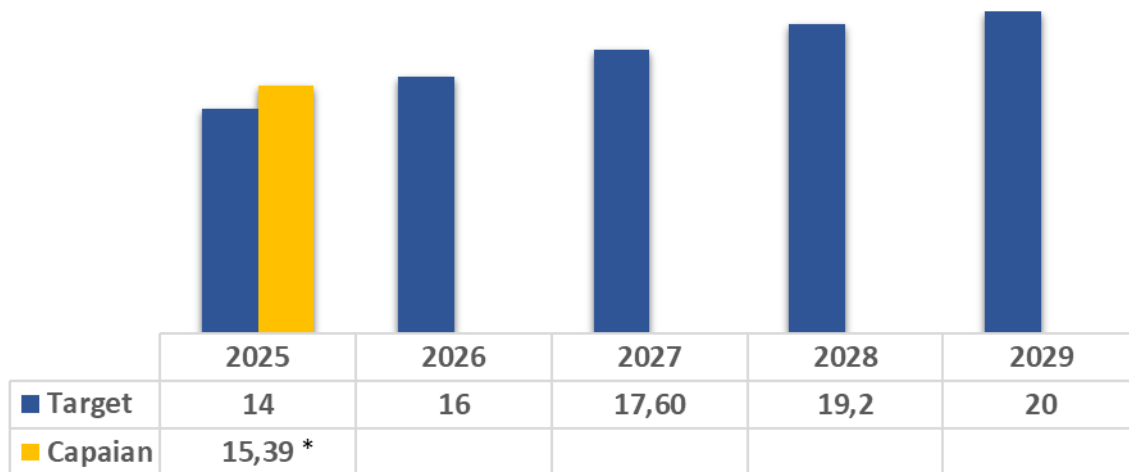
IKSS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	SATUAN	2024	2025			GROWTH
			REALISASI	TARGET PERJANJIAN KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	
IKSS.1.5	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta kunjungan	13,89	14	15,39*	109,93%	10,80%

Catatan:

*) Data Bahan Tayang Berita Resmi Statistik No. 13/02/Th. XXIX, 2 Februari 2026

Berdasarkan hasil persandingan realisasi Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2024–2025, indikator kinerja IKSS.5 menunjukkan capaian yang sudah melampaui target. Pada Tahun 2025, realisasi kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 15,39 juta kunjungan, naik sebesar 10,80% dari tahun sebelumnya.

IKSS.1.5 Kunjungan Wisman (juta kunjungan)



Gambar 3.32. Grafik Target Tahun 2024-2025 dan Realisasi Tahun 2025 Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)

Berdasarkan data Tahun 2025, menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang positif, tercermin dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di tingkat global, juga di Indonesia. Capaian tahun 2025 sudah mencapai 109,93 persen dari target yang telah ditetapkan, yaitu 14 juta kunjungan.

Berikut ini bentuk upaya Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisman Tahun 2025:

A. ASEAN Tourism Forum (ATF) 2025

Pada tahun 2025, pariwisata Indonesia mencatat sejumlah capaian strategis di tingkat regional, dimulai dari komitmen bersama para Menteri Pariwisata ASEAN pada ASEAN *Tourism Forum* (ATF) yang diselenggarakan pada tanggal 16-20 Januari 2025 di Johor Bahru, Malaysia menandatangani *Joint Media Statement* (JMS) of ASEAN Tourism Ministers. Kesepakatan ini menjadi pondasi penting bagi masa depan pariwisata kawasan, dengan 3 (tiga) fokus utama:

1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

ASEAN sepakat memperkuat implementasi standar keberlanjutan demi menghadirkan destinasi yang ramah lingkungan, berpihak pada masyarakat lokal, dan memberikan pengalaman bermakna bagi wisatawan.

2) Peningkatan Nilai Kompetitif Destinasi ASEAN

Kolaborasi pemasaran terpadu, peningkatan kualitas layanan, serta diversifikasi produk wisata menjadi strategi bersama untuk menjaga daya saing ASEAN di pasar global.

3) Pengembangan *Tourism Professional* di Kawasan ASEAN

Melalui ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals* (ASEAN MRA-TP), negara-negara anggota berkomitmen memperkuat

kapasitas SDM pariwisata, mendorong mobilitas tenaga profesional, dan meningkatkan standar layanan.

Indonesia juga meraih prestasi membanggakan pada *ASEAN Tourism Awards* (ATA) 2025 melalui kemenangan pada tiga kategori—3rd *ASEAN Homestay Award*, 4th *ASEAN Community-Based Tourism Award*, dan 3rd *ASEAN Public Toilet Award* yang menegaskan kualitas destinasi serta pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.



Gambar 3.33. Dokumentasi ASEAN Tourism Forum (ATF)



Gambar 3.34. Dokumentasi ATF TRAVEX 2025

Selain itu, partisipasi Indonesia dalam ATF Travex 2025 di Johor Bahru, Malaysia dengan melibatkan 18 industri pariwisata. Potensial devisa yang diperoleh industri selama kegiatan *business-to-business* (B2B) mencapai Rp 60,544,312,920 dengan transaksi potensial sebanyak 22.689 pax, menunjukkan tingginya kepercayaan pelaku industri internasional terhadap produk dan layanan pariwisata nasional.

B. Promosi Pariwisata Indonesia Pasar Wisatawan Mancanegara

Pada tahun 2025, Kementerian Pariwisata berpartisipasi dalam kegiatan promosi yang melibatkan *sellers* dan *buyers* internasional, antara lain:

1) *Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin 2025*



Kementerian Pariwisata kembali berpartisipasi dalam ajang pameran pariwisata terbesar di dunia, *Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin 2025*. Acara bergengsi ini diselenggarakan pada tanggal 4-6 Maret 2025 di Berlin Expo Center, Messe Berlin, Jerman.

Tahun ini, tercatat sebanyak 88 total kolaborator yang bergabung di Paviliun Wonderful Indonesia dengan



Gambar 3.35. *Dokumentasi ITB Berlin 2025*

komposisi 4 Mitra Kolaborasi. Aliansi Promosi Pariwisata Indonesia (APPI) dengan 14 *co-exhibitors*, Marriott Bonvoy dengan 11 *co-exhibitors*, BCA dengan 4 *co-exhibitors*, White Tiger DMC dengan 5 *co-exhibitors*, serta 50 *co-exhibitors* lainnya yang bergabung secara mandiri di Paviliun Wonderful Indonesia.

Potensi devisa dan perjalanan 513.692 pax, meningkat 40,28% dari tahun 2024, dengan potensi devisa mencapai Rp13,6 triliun.

2) **World Travel Market (WTM) London 2025**



Gambar 3.36. *Dokumentasi WTM London 2025*

Kementerian Pariwisata memperkuat posisi Indonesia di pasar global dengan berpartisipasi pada salah satu pameran pariwisata internasional terbesar dan tertua, *World Travel Market (WTM) London 2025* yang berlangsung di ExCel London, Inggris, pada 4–6 November 2025.

Paviliun ini menampilkan 46 pelaku industri pariwisata nasional, termasuk hotel, agen perjalanan, dan *destination management company (DMC)*, serta berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3) **SATTE (South Asia's Travel & Tourism Exchange) 2025**



Gambar 3.37. *Dokumentasi SATTE 2025*

SATTE telah dilaksanakan pada 19-21 Februari 2025 di Yashobhoomi (*India International Convention & Expo Centre*), Dwarka, New Delhi, India dengan lahan seluas 162 m² dan membawa 46 industri.

Perolehan transaksi potensial dari peserta SATTE 2025 sebesar Rp 106.278.352.000,- dan wisman potensial sebanyak 40.881 orang. Berdasarkan jumlah wisman potensial tersebut, maka perkiraan devisa potensial mencapai USD 68.434.794 atau setara Rp1.094.956.704.000,-.

4) **NATAS Holiday 2025**



Gambar 3.38. Dokumentasi NATAS Holiday 2025

NATAS Holidays 2025 dilaksanakan pada 15-17 Agustus 2025 di *Singapore Expo Hall* 5 & 6. Kemenpar bekerja sama dengan KBRI Singapura menyewa lahan seluas 108 m² diikuti 15 industri.

Transaksi potensial tercatat sebesar 649 pax dengan potensi transaksi mencapai Rp 1,86 miliar. Sementara *real transaction* yang dihasilkan sebesar 182 pax dengan nilai transaksi sebesar Rp 106,5 juta.

5) **MATTA Fair 2025**



Gambar 3.39. Dokumentasi MATTA Fair 2025

MATTA Fair 2025 dilaksanakan di *Malaysia International Trade and Exhibition Centre* (MITEC) pada 5 - 7 September 2025. Paviliun Indonesia menempati area seluas 144 m² dengan pelaku industri sebanyak 19 *exhibitor*.

Transaksi *real* mencapai 459 pax dengan nilai transaksi mencapai Rp.1.573.250.000,-. Sementara Transaksi potensial mencapai 1.416 pax dengan nilai potensial transaksi mencapai Rp 6.840.266.000.

6) **ITB India 2025**



Gambar 3.40. Dokumentasi ITB India 2025

ITB India dilaksanakan pada 2-4 September 2025 di *Jio World Convention Centre*, Mumbai, India dengan luas lahan 90 m² berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. *Co-exhibitors (seller)* Indonesia berjumlah 20 perusahaan.

Perolehan transaksi potensial sebesar USD 5.060.938 atau sekitar Rp 83.505.468.750 (kurs Rp16.500/USD) dengan jumlah wisman potensial sebanyak 9.513 pax dan perkiraan devisa potensial mencapai USD 10.920.924 atau setara Rp 180.195.246.000,-

7) **ITB Asia 2025**



Gambar 3.41. Dokumentasi ITB Asia 2025

Pameran pariwisata B2B terbesar di Asia yang diselenggarakan di Singapura. ITB Asia berlangsung pada 15-17 Oktober 2025, di *Sands Expo & Convention Centre, Marina Bay Sands*, Singapura. Kemenpar bekerja sama dengan KBRI Singapura dengan penyewaan lahan seluas 63 m² diikuti oleh 16 industri.

Transaksi potensial tercatat sebesar 6.098 pax dengan potensi transaksi mencapai Rp 51,467 miliar.

8) **Business Matching Amerika Serikat (29 September - 1 Oktober 2025)**



Gambar 3.42. Dokumentasi Business Matching Amerika Serikat

Kegiatan *business matching* bekerja sama dengan KJRI di Chicago, Los Angeles, dan New York. Melibatkan total 16 *sellers* dari Indonesia dan 63 *buyers* dari Amerika Serikat.

Potensi devisa dan perjalanan: Rp129,9 miliar dan 3.720 pax.

9) **Business Matching Minangkabau Travel Mart (7-10 Oktober 2025)**



Gambar 3.43. Dokumentasi Business Matching Minangkabau Travel Mart

Minangkabau Travel Mart ke-6 bertema "*Wellness West Sumatera: Your Gastronomy and Wellness Tourism Destination*", dengan 28 *sellers* dan 130 *buyers* dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Potensi transaksi dan perjalanan: Rp892,3 juta dan 384 pax.

10) *Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) (10-12 Oktober 2025)*



Gambar 3.44. *Dokumentasi WITF 2025*

Pameran wisata dan *business matching* yang dihadiri oleh 200 *buyers* dari 40 negara dan 300 pelaku industri pariwisata dan ekraf. Kementerian Pariwisata menghadirkan *booth* Wonderful Indonesia dengan 8 *seller* dari industri pariwisata.

Potensi transaksi dan perjalanan: Rp3,6 miliar dan 1.220 pax.

11) *Sales Mission MICE (15 Oktober 2025)*



Gambar 3.45. *Dokumentasi Sales Mission MICE*

Sales Mission di Taiwan berupa pertemuan B2B untuk promosi Indonesia sebagai destinasi MICE internasional di kawasan Asia, dengan 30 *buyers* dari Taiwan dan 7 *sellers* dari Indonesia.

Potensi transaksi dan perjalanan: Rp46,2 miliar dan 3.410 pax.

12) *Business Matching Timur Tengah (19-23 Oktober 2025)*



Gambar 3.46. *Dokumentasi Business Matching Timur Tengah*

Kegiatan *business matching* di Muscat (Oman), Riyadh, dan Jeddah (Arab Saudi) mempromosikan Indonesia sebagai destinasi wisata ramah Muslim, dihadiri oleh 71 *buyers*.

Potensi devisa dan perjalanan: Rp58,6 miliar dan 1.849 pax.

13) Borobudur Travel Mart & Expo 2025 (BTMX) (22-23 Oktober 2025)



BTMX di Kota Surakarta menghadirkan business meeting dan pameran UMKM, diikuti 44 sellers, 100 buyers dan 30 pelaku UMKM dan ekraf. Royal Surakarta Wellness Festival hadir sebagai seller untuk promosi kegiatan Wonderful Indonesia Wellness.

Potensi transaksi dan perjalanan: Rp2,6 miliar dan 4.640 pax.

Gambar 3.47. Dokumentasi BTMX 2025

14) Familiarization Trip Pasar Malaysia

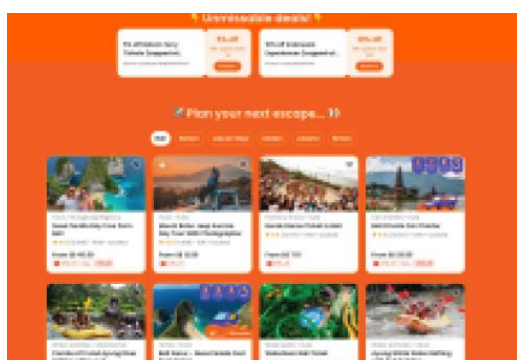


Familiarization Trip (FamTrip) dilaksanakan bagi 6 TA/TO Malaysia ke Bandung dan Jakarta pada tanggal 24–28 Juni 2025.

Mitra kolaborator terdiri dari Kereta Api Wisata, ASITA Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dan PIK Tourism Board.

Gambar 3.48. Dokumentasi Famtrip Pasar Malaysia

15) Kerja Sama Terpadu (KST) dengan Klook



Periode kampanye 16 Juli - 16 September 2025, dengan 27.083 booking yang 460 di antaranya merupakan pemesanan spesifik Feri di Batam. Terdapat 5 destinasi yang diminati: Bali, Jakarta, Riau, Yogyakarta dan Jawa Timur.

Berdasarkan motivasinya, pemesanan paling banyak didorong oleh tur dan aktivitas, informasi pendukung seperti wifi/kartu SIM dan asuransi perjalanan, serta mobilitas dan transfer pribadi. Sementara itu, atraksi dan akomodasi berada pada urutan selanjutnya.

Konten berbentuk kompetisi (giveaway) menjadi konten dengan interaksi (engagement) kuat



Gambar 3.49. Dokumentasi KST dengan Klook

dengan 740 komentar di unggahan konten tersebut.

Ads juga menjadi pendorong kuat untuk meningkatkan engagement dengan nilai CTR (*Click Through Rate*) yang di atas rata-rata (1,3 dari *benchmark* industri sebesar 1,2).

C.

Partisipasi pada *Sustainable Wholistic Wellness International Conference & Expo (SWWICE) 2025*

SWWICE 2025 diselenggarakan pada 24–29 Juni 2025 di Sabah International Convention Centre, dengan fokus pada pengembangan *Sustainable Wholistic Wellness Tourism* berbasis 10 Pilar Kesejahteraan Holistik. Dalam forum tersebut, Kementerian Pariwisata menjadi salah satu pembicara panel yang membahas topik "*Wellness Tourism in the Republic of Indonesia and Opportunities for Growth*", sebagai momentum strategis untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis *wellness* di tingkat global.

Kegiatan SWWICE ini menunjukkan tren pertumbuhan signifikan sektor *wellness tourism* secara global, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan fisik dan mental. Tingginya minat terhadap pijat tradisional Indonesia serta paket *wellness* mencerminkan potensi kunjungan wisatawan ke Indonesia, khususnya ke destinasi unggulan seperti Bali dan Jakarta. Selain praktik *wellness* tradisional, berkembangnya *medical wellness* turut membuka peluang usaha dan investasi baru yang relevan dengan arah pengembangan industri pariwisata Indonesia. Keikutsertaan Kementerian Pariwisata pada SWWICE2025 juga dimanfaatkan untuk memperluas jejaring dan membangun kemitraan dengan pelaku industri dan profesional *wellness* internasional.



Gambar 3.50. Dokumentasi Kegiatan Fasilitas Industri SWWICE 2025

D. *International Halal Tourism Summit*

Pada 9 Oktober 2025, diselenggarakan 7th *Internasional Halal Tourism Summit* di Jakarta, dan pada kesempatan tersebut Kementerian Pariwisata meluncurkan *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) 2025. Indeks ini merupakan hasil kolaborasi dengan Bank Indonesia, *Enhali Halal Tourism Center* (EHTC) dan CrescentRating. IMTI bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan provinsi dalam mengembangkan pariwisata ramah Muslim, dengan *Global Muslim Travel Index* (GMTI) sebagai acuan standar. Peluncuran IMTI sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi ramah Muslim sekaligus pusat pariwisata halal global. Melalui indeks ini, pemangku kepentingan dapat menilai dan mengidentifikasi aspek pelayanan dan infrastruktur pariwisata yang perlu ditingkatkan.

Menggunakan kerangka *ACES* (*Access, Communication, Environment, Services*), IMTI 2025 menilai kesiapan dari 15 provinsi, dan menetapkan 5 provinsi terbaik, yaitu Jawa Barat, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan pariwisata ramah Muslim di 15 provinsi, program sertifikasi halal bersama BPJPH diperluas ke 1.500 desa wisata mulai kuartal IV tahun 2025. Modul-modul pelatihan akan turut disiapkan untuk meningkatkan kapasitas destinasi.

Selain itu, tengah dikembangkan portal Pariwisata Ramah Muslim dalam *platform indonesia.travel*, yang akan memuat tiga kategori utama: *Atraksi, Event, dan Services*, serta *dashboard* untuk memantau kesiapan destinasi. Kementerian Pariwisata juga akan menyiapkan pola perjalanan tematik *dan Muslim-friendly desk* berisi informasi wisata ramah Muslim di berbagai pameran pariwisata. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kualitas dan kesiapan destinasi pariwisata ramah Muslim di Indonesia, sekaligus mendorong peningkatan peringkat Indonesia dalam *Global Muslim Travel Index* (GMTI).



Gambar 3.51. Dokumentasi Kegiatan International Halal Tourism Summit

E.

Promosi Wisata MICE di AIME (Asia Pacific Incentives and Meetings Event)

Pada 10-12 Februari 2025, Kementerian Pariwisata berpartisipasi dalam *Asia Pacific Incentives and Meetings Event*, salah satu pameran MICE terbesar di kawasan Asia Pasifik, sebagai bagian dari strategi promosi berkelanjutan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi MICE unggulan di tingkat regional dan global. Indonesia menghadirkan paviliun "*Remarkable Indonesia: Your Premier MICE Destination*" yang melibatkan 16 pelaku industri MICE nasional, terdiri atas *stand alone venue*, PCO/PEO, DMC/DMO, dan perhotelan, guna mempromosikan layanan dan potensi destinasi MICE Indonesia.

Partisipasi Indonesia pada AIME 2025 menghasilkan peningkatan potensi nilai transaksi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni lebih dari Rp155 miliar, dengan estimasi potensi kunjungan wisman MICE sebesar 24.096 pax. Selain itu, kegiatan ini memperluas jejaring dengan penyelenggara event global serta membuka peluang kerja sama baru dengan buyers dari Australia, Eropa, Asia Timur, dan Asia Selatan. Paviliun Indonesia juga memperoleh respons positif atas desain dan inovasi penyajian informasi yang dinilai semakin profesional dan kompetitif. Melalui keikutsertaan pada AIME 2025, Kementerian Pariwisata menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi MICE kelas dunia, mendorong peningkatan kunjungan wisatawan MICE, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.



Gambar 3.52. Dokumentasi Kegiatan AIME 2025

F. *Business Matching Tiongkok*

Business Matching MICE merupakan pertemuan *business-to-business* (B2B) yang mempertemukan buyers dari Tiongkok dengan *sellers* Indonesia, difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata, guna memperluas jejaring dan peluang kerja sama di pasar Tiongkok. Kegiatan ini diikuti oleh 10 *sellers* Indonesia yang terdiri atas DMO/DMC, biro perjalanan, dan penyedia akomodasi, serta melibatkan *buyers* di Guangzhou, Shenzhen, dan Zhuhai.

Tiongkok merupakan pasar strategis pariwisata Indonesia dengan potensi outbound traveler yang terus meningkat seiring stabilisasi pasca pandemi. Pada tahun 2025, Kementerian Pariwisata menargetkan 1,2 juta wisatawan Tiongkok, dengan kontribusi sektor MICE diharapkan mencapai hingga 20 persen. Penyelenggaraan *Business Matching* MICE bertujuan mempromosikan Indonesia sebagai destinasi MICE, mempertemukan *sellers* nasional dengan *buyers* berkualitas, serta mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Berdasarkan *Buyers Profile Report*, kegiatan ini menghasilkan potensi transaksi sebesar 6.204 pax dengan estimasi devisa sekitar Rp56,55 miliar, serta realisasi transaksi sebesar 2.900 pax pada tahun 2025 dan 2.500 pax pada tahun 2026.

G. *Wonderful Indonesia Crossborder Fest*

MICE Cross Border Fest merupakan ajang perayaan identitas yang menyatukan dua budaya, Indonesia dan Timor Leste, dalam semangat persatuan dan keberagaman. Acara ini dimeriahkan dengan berbagai hiburan dan pertunjukan musik, serta menampilkan bazar UMKM dan aksi peduli lingkungan sebagai upaya mendukung pariwisata berkelanjutan. Dengan mengusung semangat "*Explore the Border, Feel the Wonder*", festival ini menjadi jembatan untuk mempererat hubungan masyarakat di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Cross Border Fest 2025 diikuti oleh 114 peserta dan estimasi rata-rata pengeluaran selama partisipasi dalam acara mencapai Rp1.587.600 per orang, sehingga total pengeluaran peserta mencapai sekitar Rp180,98 juta. Selain itu, pelaksanaan event memberikan dampak positif terhadap pergerakan wisatawan dan ekonomi lokal, ditandai dengan kehadiran lebih dari 1.000 penonton pada *WI Road Race Championship* dan lebih dari 3.000 penonton pada Konser Musik, serta tercatat 340 kedatangan warga negara asing melalui PLBN Wini pada periode 16–21 Juli 2025.

H. *Delegate Boosting PDGI Ke Shanghai*

Indonesia melalui Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) telah ditetapkan sebagai tuan rumah *Asia Pacific Dental Congress* (APDC) 2027 yang direncanakan berlangsung di Bali. Untuk meningkatkan jumlah delegasi pada penyelenggaraan

tersebut, dilaksanakan kegiatan *delegate boosting* pada *FDI World Dental Congress (WDC) 2025* tanggal 9-11 September 2025 di Shanghai sebagai upaya promosi dini guna meningkatkan *awareness* dan *engagement* calon delegasi terhadap APDC 2027 di Indonesia.

Aktivitas *delegate boosting* meliputi pendampingan PDGI pada sesi presentasi rencana APDC 2027 di Bali, aktivasi booth promosi untuk menarik minat delegasi WDC 2025, serta diseminasi materi promosi pariwisata Indonesia sebagai destinasi MICE potensial. Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan peran Kementerian Pariwisata dalam memperkuat promosi *event* internasional, meningkatkan prospek jumlah delegasi, serta mendukung pengembangan pariwisata berkualitas dan manfaat ekonomi berkelanjutan.

I. **Borobudur Marathon**

Borobudur Marathon 2025 merupakan ajang lari internasional bersertifikasi *Elite Label* dari *World Athletics* dengan rute yang melintasi kawasan *heritage* Borobudur dan wilayah Magelang. *Event* ini menjadi ikon *sport tourism* berskala internasional yang berkontribusi pada pengembangan pariwisata Jawa Tengah melalui pelibatan masyarakat, UMKM, dan pelaku industri olahraga. Mengusung tema "*Stride to Glory*", penyelenggaraan tahun ini menghadirkan inovasi rute baru yang menyajikan lanskap kawasan *heritage*, perkampungan budaya Jawa, dan perbukitan Menoreh. Kategori lomba yang dipertandingkan meliputi *Marathon 42K*, *Half Marathon 21K*, *10K*, dan *10K Young Talent*, seluruhnya memenuhi standar *World Athletics*, serta diperkuat dengan kehadiran *elite runners* mancanegara guna menjaga kualitas kompetisi dan meningkatkan eksposur internasional.

Dari sisi dampak, *Borobudur Marathon 2025* melibatkan 10.500 pelari dari 39 negara serta ribuan pendamping dan pengunjung. Dukungan terhadap UMKM diwujudkan melalui partisipasi 20 *tenant* kuliner dari 11 desa dalam program Bank Jateng Pawone, dengan total transaksi mencapai Rp176 juta selama rangkaian *Race Expo* hingga *Race Day*. Selain itu, cakupan media dan digital mencapai sekitar 28 juta *impressions* melalui laman resmi, serta peningkatan pengikut media sosial sebesar 36 persen, yang menunjukkan tingginya daya tarik publik dan eksposur *event* secara nasional maupun internasional.



Gambar 3.53. Dokumentasi Borobudur Marathon 2025

Analisa Keberhasilan Pencapaian Target IKSS.1.5

Sejumlah faktor yang berkontribusi dalam pencapaian target IKSS.1.5 kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2025, Kementerian Pariwisata telah melaksanakan berbagai program strategis penguatan promosi pariwisata bagi pasar wisatawan mancanegara melalui partisipasi pada bursa pariwisata internasional, penyelenggaraan misi penjualan, *business matching*, *familiarization trip*, kerja sama terpadu pada pasar utama dan pasar potensial dunia, penyelenggaraan *event* internasional, dan perluasan kerja sama internasional dengan negara mitra strategis guna membuka pasar baru dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara.

Analisa Penghambat Pencapaian Target IKSS.1.5

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKSS.1.5 kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2025, di antaranya:

- 1) Keterbatasan anggaran promosi dan pendukung *event*, menuntut penerapan prinsip efisiensi, penajaman prioritas pasar, serta pemilihan kegiatan promosi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisman;
- 2) Belum optimalnya pengembangan konten promosi bagi pasar wisman dan penyelenggaraan *event* internasional;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan *platform* digital dalam promosi pariwisata bagi pasar wisman dan *event* internasional, baik oleh penyelenggara *event* maupun pemerintah daerah, terutama dalam aspek promosi terpadu, *digital campaign*, dan pemanfaatan *big data*.

Upaya dan Strategi Kedepan Pencapaian Target IKSS.1.5

Upaya dan strategi kedepan yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target IKSS.1.5 kunjungan wisatawan mancanegara di masa mendatang, antara lain:

- 1) Penguatan strategi, *targeting*, dan *market intelligence* pemasaran untuk pasar utama dan potensial pasar wisatawan mancanegara berdasarkan minat dan perilaku perjalanan;
- 2) Penguatan kolaborasi dengan industri pariwisata dan mitra, seperti melalui partisipasi pada bursa pariwisata internasional, misi penjualan, *business matching*, perjalanan wisata pengenalan, pengembangan *joint promotion*/ kerja sama terpadu yang kompetitif dengan maskapai, *wholesaler*, TA/TO, *Key Opinion Leader (KOL)*, *platform* OTA, dan pelaku industri pariwisata lainnya di masing-masing pasar;
- 3) Pengembangan produk dan pengalaman wisata yang sesuai preferensi pasar melalui pengalaman tematik seperti gastronomi, *marine*, *wellness experience*, *family-friendly destination*, *romantic & luxury travel*;

- 4) Penguatan koordinasi serta membangun sinergi lintas kementerian/lembaga terkait dan pemangku kepentingan, dalam rangka mendukung aksesibilitas internasional (penambahan *direct flight* dan *seat capacity*), serta kebijakan BKV, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara;
- 5) Penyelenggaraan *Event Internasional by Indonesia* berbasis warisan budaya, dan produk kreatif untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara;
- 6) Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan inovasi digital, dan pengembangan materi untuk publikasi melalui *owned media* (website indonesia.travel dan medsos Wonderful Indonesia), media cetak, luar ruang, elektronik, digital, dan publikasi pariwisata minat khusus untuk meningkatkan eksposur dan konversi pasar wisatawan mancanegara.

IKSS.1.6 Perjalanan Wisatawan Nusantara

Definisi Wisatawan Nusantara (*wisnus*)/*domestic tourists*, menurut BPS, adalah seseorang yang melakukan perjalanan di wilayah teritorial suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 12 (dua belas) bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan dalam rangka bekerja atau sekolah secara rutin. Perjalanan Wisata ("Perjalanan"/"Bepergian") adalah bepergian/perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dari tempat tinggal biasanya ke tempat di luar lingkungan sehari-hari di wilayah geografis Indonesia secara sukarela selama kurang dari 6 (enam) bulan dan bukan bertujuan untuk bekerja (memperoleh upah/gaji dari penduduk di tempat yang dituju) atau sekolah secara rutin. Tempat di luar lingkungan sehari-hari dimaksud meliputi: berwisata ke obyek wisata, dan atau mengunjungi kabupaten/kota lain dan tinggal minimal 6 (enam) jam.

Data jumlah wisnus diperoleh dari statistik wisnus yang dipublikasikan oleh BPS. Data perjalanan wisatawan nusantara yang dikumpulkan dengan pendekatan *Mobile Positioning Data* (MPD) selanjutnya dilakukan estimasi total perjalanan wisatawan nusantara. MPD merupakan suatu dataset berskala besar mengenai catatan transaksi dan lokasi dari pelanggan operator seluler (*Mobile Network Operator/MNO*) yang diproses dan disimpan di dalam suatu sistem.

Metode perhitungan IKSS.1.6 perjalanan wisatawan nusantara adalah dengan cara sebagai berikut:

Mendapatkan data jumlah perjalanan wisatawan nusantara yang diperoleh dari mobilitas nomor *handphone*

Berdasarkan data Berita Resmi Statistik BPS, jumlah perjalanan wisnus Tahun 2025 adalah sebanyak 1.200,33 juta perjalanan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Persandingan Realisasi Perjalanan Wisatawan Nusantara Tahun 2024-2025

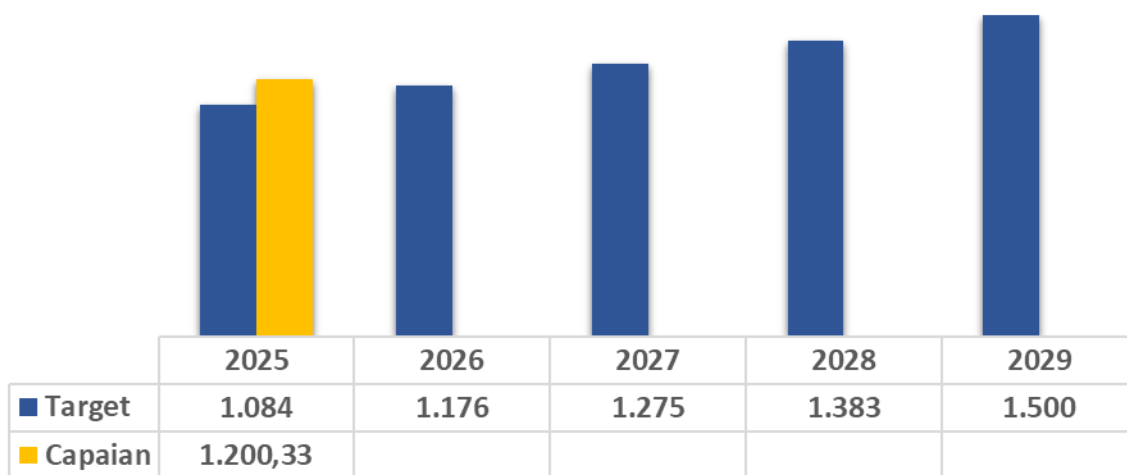
IKSS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	SATUAN	2024	2025		GROWTH	
			REALISASI	TARGET PERJANJIAN KINERJA	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN
IKSS.1.6	Perjalanan Wisatawan Nusantara	Juta Perjalanan	1.021,08	1.084	1.200,33*	110,73%	17,55%

Catatan:

*) Data Bahan Tayang Berita Resmi Statistik No. 13/02/Th. XXIX, 2 Februari 2026

Berdasarkan hasil persandingan realisasi Perjalanan Wisatawan Nusantara Tahun 2024–2025, indikator kinerja IKSS.1.6 menunjukkan capaian sudah melampaui target. Pada Tahun 2025, realisasi perjalanan wisatawan nusantara sebanyak 1.200,33 juta perjalanan, naik sebesar 17,55% dari tahun sebelumnya.

IKSS.1.6 Perjalanan Wisnus (juta perjalanan)


Gambar 3.54. Grafik Target Tahun 2024-2025 dan Realisasi Tahun 2025 Perjalanan Wisatawan Nusantara

Berdasarkan data Tahun 2025, mencerminkan pemulihan dan penguatan mobilitas masyarakat serta membaiknya aktivitas pariwisata domestik di berbagai wilayah Indonesia. Capaian tahun 2025 sudah mencapai 110,73% dari target yang telah ditetapkan dari target, yaitu 1.084 juta perjalanan.

Di Tahun 2025, Kementerian Pariwisata telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah perjalanan wisnus, antara lain:

A. Insentif Nataru

Menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, pemerintah menyiapkan stimulus berupa insentif perjalanan melalui diskon transportasi kereta, laut dan penyeberangan, dan udara untuk mendorong peningkatan perjalanan wisata dalam negeri. Insentif untuk pesawat udara (13-14%), kereta api (30%), dan penyeberangan (penghapusan biaya jasa pelabuhan) berlaku untuk perjalanan pada 22 Desember 2025 - 10 Januari 2026; sementara diskon angkutan laut (20%) berlaku untuk perjalanan 17 Desember 2025 – 10 Januari 2026. Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Kementerian Pariwisata mendorong perjalanan, serta melakukan sosialisasi dan pemantauan kepatuhan oleh *online travel agent* (OTA) dan para pemangku kepentingan terkait.

B. Promosi Pariwisata Indonesia Pasar Wisatawan Nusantara

Pada tahun 2025, Kementerian Pariwisata melakukan promosi yang ditujukan bagi pasar wisatawan nusantara.

1) Pameran Edutrip Desa Wisata (9-10 Oktober 2025)



Gambar 3.55. Dokumentasi Pameran Edutrip Desa Wisata

Pameran di 8th SPK *Indonesia Annual Convention 2025* untuk promosi desa wisata sebagai destinasi wisata edukatif, dihadiri lebih dari 400 peserta dari lembaga pendidikan dan pemerintah.

Potensi transaksi dan perjalanan: Rp2 miliar dan 1.850 pax.

2) Pameran Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) (18-19 Oktober 2025)



Gambar 3.56. Dokumentasi Pameran BBWI 2025

Pameran di Bali untuk mempromosikan paket perjalanan wisata ke Daerah 3B (Banyuwangi, Bali Barat, dan Bali Utara), dihadiri oleh 23 pelaku industri pariwisata dan dua *online travel agent*.

Potensi transaksi dan perjalanan: Rp805,6 juta dan 500 pax.

C. Karisma Event Nusantara (KEN)

Karisma Event Nusantara (KEN) adalah rangkaian event berbasis kearifan lokal yang telah terkurasi dari 38 provinsi di Indonesia. *Event* KEN menampilkan kekayaan budaya, seni, musik, kuliner dan karnaval di berbagai destinasi pariwisata Indonesia. Sebagai program unggulan Kementerian Pariwisata, KEN tidak hanya sekadar kumpulan atraksi pariwisata, namun juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, melestarikan budaya Indonesia dan berdampak positif pada lingkungan.

KEN menjadi magnet bagi wisatawan domestik dan mancanegara, menciptakan ekosistem kolaboratif yang menghubungkan pemerintah, pelaku *event*, dan industri pariwisata. Pada tahun 2025, terdapat 110 *event* yang tergabung dalam KEN, dengan realisasi pelaksanaan sebanyak 99 *event*. Tercatat 11 *event* dibatalkan pelaksanaannya oleh penyelenggara karena alasan ketersediaan anggaran, keselamatan, dan dampak bencana alam.

Hasil Analisis Dampak Ekonomi Karisma *Event* Nusantara (KEN) 2025 menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pergerakan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Sepanjang penyelenggaraan KEN 2025, tercatat sekitar 12,2 juta pengunjung yang terdiri atas wisatawan lokal, nasional, dan mancanegara. Aktivitas ini melibatkan kurang lebih 135.148 tenaga kerja (panitia, petugas keamanan, dan vendor), 115.764 pelaku seni sebagai pengisi acara, 6.649 anggota komunitas lokal, serta 20.877 pelaku UMKM yang berpartisipasi langsung dalam rantai penyelenggaraan *event* pariwisata.

Secara keseluruhan, total dampak ekonomi KEN 2025 mencapai Rp23,76 triliun. Nilai tersebut mencerminkan total perputaran ekonomi yang dihasilkan dari belanja pengunjung, aktivitas penyelenggara, serta transaksi UMKM selama rangkaian *event* berlangsung. Dampak ekonomi ini tersusun atas dampak langsung sebesar Rp9,27 triliun yang berasal dari pengeluaran pengunjung dan penyelenggara, dan transaksi UMKM selama *event* pariwisata berlangsung; dampak tidak langsung sebesar Rp6,86 triliun yang muncul pada sektor-sektor pendukung; serta dampak lanjutan (*induced*) sebesar Rp7,63 triliun dari peningkatan belanja rumah tangga tenaga kerja yang memperoleh tambahan pendapatannya bertambah karena adanya *event* pariwisata.

Selain itu, nilai *multiplier output* sebesar 1,74 menunjukkan bahwa setiap Rp1 yang dibelanjakan dalam penyelenggaraan *event* KEN, baik oleh pengunjung, panitia, maupun pelaku UMKM mampu menghasilkan Rp1,74 aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Capaian ini menegaskan peran strategis KEN 2025 sebagai instrumen pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguatan ekosistem *event* pariwisata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 3.57. Dokumentasi Kegiatan Karisma Event Nusantara 2025

D. PENTAS (Pergelaran *Event* di Destinasi Pariwisata Prioritas)

PENTAS (Pergelaran *Event* di Destinasi Pariwisata Prioritas) merupakan program apresiasi dan fasilitasi bagi pelaku seni dan budaya lokal yang diselenggarakan secara rutin dalam bentuk *event* di destinasi prioritas. Program ini bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan dan promosi destinasi melalui penyelenggaraan *event* berkelanjutan, memperkuat kapasitas pelaku *event* melalui pengembangan konten dan pengemasan pertunjukan, serta menata ekosistem pendukung *event* yang melibatkan UMKM dan komunitas peduli lingkungan.

PENTAS Labuan Bajo pertama kali diselenggarakan pada tahun 2022 dan hingga kini telah terlaksana sebanyak delapan kali. Pada tahun 2025, kolaborasi dilanjutkan melalui program WAP (*Weekend at Parapuar*), yaitu pertunjukan budaya Manggarai yang diselenggarakan secara reguler untuk memperkaya atraksi wisata, memberdayakan seniman lokal, melestarikan budaya daerah, serta menciptakan nilai ekonomi dari pariwisata berbasis budaya.

Sementara itu, PENTAS Borobudur pertama kali dilaksanakan pada tahun 2024 melalui kolaborasi dengan Badan Otorita Borobudur. Pada penyelenggaraan tahun 2025, kegiatan ini dilaksanakan di Museum & Kampung Seni Borobudur sebagai dukungan terhadap pengembangan destinasi wisata baru di Kawasan Candi Borobudur. PENTAS Borobudur menghadirkan pertunjukan seni budaya dari komunitas dan pelaku seni lokal, seperti Sanggar Seni Gaboet Wasesa dan Sekar Rimba Indonesia, serta penampilan musik dari grup band Ngatmombilung dan Aftershine yang berhasil menarik ribuan pengunjung.



Gambar 3.58. Dokumentasi Kegiatan PENTAS Tahun 2025

E. *Mandalika Racing Series*

Mandalika Racing Series 2025 merupakan Kejuaraan Nasional Balap Motor kategori *sport bike* yang meliputi kelas *Junior Sport* U-15, 150cc, 250cc, *Super sport* 600cc, serta kelas pendukung *Underbone* 150 U-25, 250 *Community*, dan *Super sport/Superbike Community*. Ajang ini diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dalam lima seri perlombaan, yaitu Seri 1 (11–13 April), Seri 2 (20–22 Juni), Seri 3 (15–17 Agustus), Seri 4 (19–21 September), dan Seri 5 (1 Oktober–2 November). Kegiatan ini diselenggarakan oleh PRIDE *Motorsport* bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia dan *Mandalika Grand Prix Association*. Penyelenggaraan lima putaran dilakukan sebagai respons atas tingginya animo dan respons positif dari pelaku balap motor nasional pada pelaksanaan tahun sebelumnya.

Mandalika Racing Series 2025 tercatat menarik total 6.600 pengunjung, terdiri atas 79 persen wisatawan nusantara dan 21 persen wisatawan mancanegara. Estimasi perputaran ekonomi yang dihasilkan mencapai lebih dari Rp45 miliar, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp32 miliar berdasarkan data yang dihimpun oleh penyelenggara.



Gambar 3.59. Dokumentasi Kegiatan *Mandalika Racing Series* 2025

Analisa Keberhasilan Pencapaian Target IKSS.1.6

Sejumlah faktor yang berkontribusi dalam pencapaian target IKSS.1.6 perjalanan wisatawan nusantara pada tahun 2025, Kementerian Pariwisata telah melaksanakan berbagai program strategis yang mendorong perjalanan wisatawan nusantara, yaitu melalui penguatan kampanye perjalanan wisata dalam negeri #DiIndonesiaAja, penyelenggaraan berbagai *event* nasional dan daerah melalui Karisma Event Nusantara 2025, pengembangan desa wisata, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata berbasis alam, budaya, dan minat khusus.

Analisa Penghambat Pencapaian Target IKSS.1.6

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKSS.1.6 perjalanan wisatawan nusantara pada tahun 2025, di antaranya:

- 1) Keterbatasan dan kebutuhan optimalisasi anggaran pemasaran dan penyelenggaraan *event*, sehingga diperlukan penajaman prioritas program dan segmentasi pasar wisatawan nusantara;
- 2) Belum optimalnya penyelenggaraan *event* di tingkat pusat dan daerah, yang mempengaruhi kualitas perencanaan, pengemasan, dan promosi *event*;
- 3) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dan regulasi perizinan penyelenggaraan *event* antarwilayah;
- 4) Pemanfaatan teknologi dan *platform* digital untuk promosi pariwisata nusantara belum optimal dan merata.

Upaya dan Strategi Kedepan Pencapaian Target IKSS.1.6

Upaya dan strategi kedepan yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target IKSS.1.6 perjalanan wisatawan nusantara di masa mendatang, antara lain:

- 1) Penguatan strategi, *targeting* untuk pasar utama dan potensial pasar wisatawan nusantara berdasarkan minat dan perilaku perjalanan;
- 2) Penguatan kolaborasi dengan industri pariwisata dan mitra, seperti melalui partisipasi pada bursa pariwisata nasional, misi penjualan, *business matching*, perjalanan wisata pengenalan, kerja sama terpadu dengan maskapai, TA/TO, *Key Opinion Leader (KOL)*, *platform* OTA, dan pelaku industri pariwisata lainnya untuk pasar wisatawan nusantara;
- 3) Pengembangan produk dan pengalaman wisata yang sesuai preferensi pasar wisatawan nusantara melalui pengalaman tematik seperti gastronomi, *marine*, *wellness*, *wastra*;
- 4) Penguatan koordinasi serta membangun sinergi lintas kementerian/lembaga terkait dan pemangku kepentingan, dalam rangka mendukung aksesibilitas nasional (penurunan harga tiket domestik, program diskon wisata) untuk mendorong perjalanan wisatawan nusantara dan kemudahan perijinan penyelenggaraan *event* nasional;
- 5) Penyelenggaraan *Event Nasional by Indonesia* berbasis: *event* olahraga, musik, kreatif, budaya, religi, kuliner, dan kenegaraan;
- 6) Memberikan dukungan penyelenggaraan *event* terkurasi, event festival, karnaval, pertunjukan budaya, dan kegiatan kreatif (Karisma Event Nusantara);
- 7) Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan inovasi digital, dan pengembangan materi untuk publikasi melalui *owned media*, media cetak, luar ruang, elektronik, digital, dan kampanye nasional yang dirancang untuk mendorong wisatawan nusantara menjelajahi Indonesia (Bangga Berwisata di Indonesia).

SS.2**Meningkatnya Kualitas Governans Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur**

Sasaran Strategis 2, Meningkatkan Kualitas Governans Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pariwisata memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai targetnya pada Tahun 2025, yaitu:

- **IKSS.2.1.: Indeks Reformasi Birokrasi**

dengan penjelasan sebagaimana Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

IKSS.2.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator ini merupakan hasil evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Reformasi birokrasi (RB) merupakan wujud dari komitmen berkelanjutan Kementerian Pariwisata menuju pemerintahan yang berintegritas tinggi, dimana mampu menyelenggarakan pelayanan prima pada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada Tahun 2025.

Sejalan dengan dinamika kebijakan nasional, sejak Tahun 2023 kerangka evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi mengalami penyesuaian dibandingkan ketentuan sebelumnya. Penyesuaian tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, yang menekankan pengukuran Reformasi Birokrasi secara lebih berorientasi pada hasil dan dampak. Kerangka evaluasi ini berlaku pada periode penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dan menjadi dasar dalam pengukuran capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata.

Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan melalui 2 (dua) jenis evaluasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Evaluasi Internal dilaksanakan oleh evaluator internal pada tahap perencanaan Reformasi Birokrasi (*ex-ante*) serta pada tahap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*on-going*), sebagai bagian dari pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi. Sementara itu, Evaluasi Eksternal dilaksanakan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional pada tahap pasca pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*ex-post*) yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan:

- a. RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategis RB; dan
- b. RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik.

Keduanya dilakukan secara terintegrasi sebagai satu kesatuan kerangka evaluasi, baik dalam Evaluasi Internal maupun Evaluasi Eksternal. Pendekatan terintegrasi tersebut memastikan bahwa capaian Indeks Reformasi Birokrasi mencerminkan kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata secara menyeluruh.

Metode perhitungan IKKS.2.1 nilai RB Kementerian Pariwisata dengan cara: melakukan identifikasi hasil penilaian RB oleh Kementerian PAN RB.

Data Indeks RB Kemenpar Tahun 2025 berdasarkan dari penilaian RB oleh Kementerian PAN RB, Kemenpar memperoleh nilai 86,67 atau melebihi target yang telah ditentukan, namun masih dalam proses sanggah. Nilai tersebut diperoleh dari agregasi capaian komponen RB General dan RB Tematik yang dihitung berdasarkan bobot indikator.

Tabel 3.10. Persandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024-2025

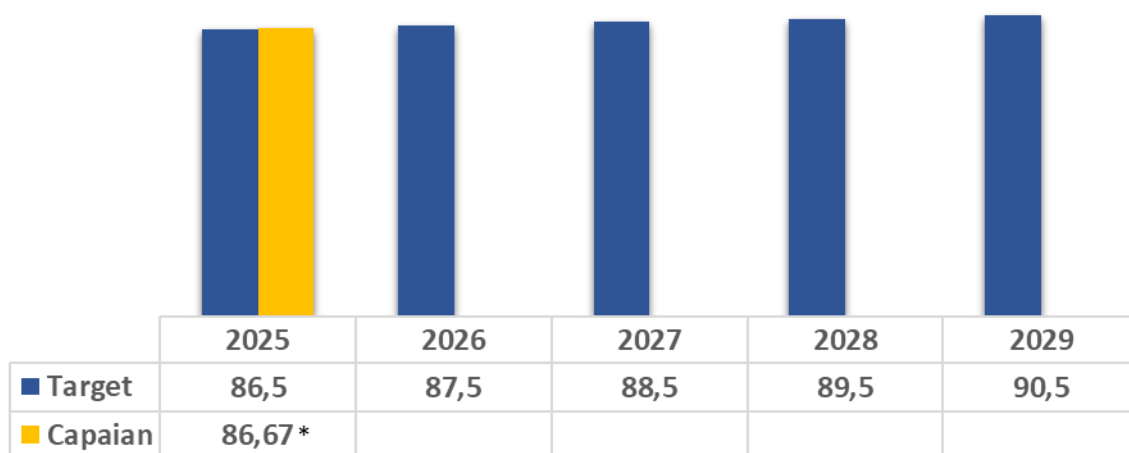
IKSS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	SATUAN	2024	2025			GROWTH
			REALISASI	TARGET PERJANJIAN KINERJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	
IKSS.7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,31	86,5	86,67*	100,19%	0,41%

Catatan:

*) Data sementara berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN-RB prasanggah

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKSS.2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata telah mencapai target sebesar 100,19%. Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata Tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 0,41% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024.

IKSS.2.1 Indeks Reformasi Birokrasi



Gambar 3.60. Grafik Target Tahun 2024-2025 dan Realisasi Tahun 2025 Indeks Reformasi Birokrasi

Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, capaian sebesar 86,67 berada pada kategori Baik dan menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pembentuk Indeks RB telah memenuhi atau melampaui target kinerja. Secara kualitas capaian ini menunjukkan Penguatan konsistensi pelaksanaan RB dibanding periode sebelumnya dan meningkatnya kontribusi RB terhadap pencapaian sasaran strategis kementerian.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata Tahun 2025 sebesar 86,78 tidak terlepas dari berbagai faktor strategis yang secara sistematis mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan konsistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang telah bergerak dari pendekatan administratif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada kualitas sistem dan hasil kinerja organisasi.

Nilai Proyeksi Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari nilai total capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang diukur dengan beberapa indikator sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.11. Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata Tahun 2025

NO	Indikator	Target 2025	Nilai		Bobot Indeks Max	Skor Indeks RB*
			2024	2025		
	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif					
1	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100	100	100	2	2,00
2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk penyederhanaan Birokrasi	5	5	5	2	2,00
3	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,81	3,809	3,811	4	3,05
4	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1	1	1	2	1,00
5	Nilai SAKIP	80	78,9	78,98	3	3,16
6	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	94,5	94,26	95,14	2	1,90
7	Tingkat Implementasi kebijakan Arsitektur SPBE	1	3	4	2	1,60
8	Tingkat Digitalisasi Arsip	91,73	91,73	91,73	2	1,83
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94,78	94,28	94,78	2	1,90
10	Indeks Pengelolaan Aset	3,44	3,8	3,64	2	1,82
11	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	4	4	3	1,5	0,90
12	Indeks Kualitas Kebijakan	88	93,83	90,02	1,5	1,35
13	Indeks Reformasi Hukum	95	100	100	1,5	1,5
14	Indeks Pembangunan Statistik	3,42	3,42	3,42	1,5	1,5
15	Indeks Tata Kelola Pengadaan	65	76,13	76,13	1,5	1,03
16	Indeks SPBE	4,68	4,68	4,67	9	8,41

NO	Indikator	Target 2025	Nilai		Bobot Indeks Max	Skor Indeks RB*
			2024	2025		
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional					
17	Indeks Sistem Merit	335	330	330	4	3,22
18	Indeks Pelayanan Publik	4	4,67	4,61	1,5	1,38
19	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	-	-	-	1,5	-
20	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP	WTP	WTP	5	5
21	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	70	69,18	87,16	4	2,49
22	Survey Penilaian Integritas (SPI)	80	79,24	78,03	10	7,8
23	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	90,01	90,91	92,22	8	7,39
24	Indeks BerAKHLAK	81	79,83	79,83	4	3,19
	Capaian Strategi Pelaksanaan RB General					
25	Rencana Aksi Pembangunan RB General	2,05	2,05	2,05	3	2,05
26	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	10	10	10	7	4,78
27	Capaian Prioritas Nasional	92,84	80	95,69	3	2,27
28	Capaian Indikator Kinerja Utama	94,54	94,54	80	7	4,48
	RB Tematik					
1	Pengentasan kemiskinan	0,88	0,88	1,31	2	1,31
2	Realisasi Investasi	1,2	1,2	1,58	2	1,58
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Kementerian/ Lembaga)	-	0,93	0,93	2	0,93
4	Laju Inflasi (Kementerian/ Lembaga)	-	1,08	1,08	2	1,08
5	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kementerian/ Lembaga)	-	1,75	1,75	2	1,76
3	Percepatan Hilirisasi	-	-	-	0,01	-
4	Ketahanan Pangan Nasional	-	-	-	0,01	-
5	Peningkatan Kualitas dan Akses Kesehatan	-	-	-	0,01	-
	Peningkatan, Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	-	-	-	0,01	-
	SKOR INDEKS RB	-	-	-	110	86,67*

*) Hasil penilaian KemenPANRB prasangah

Di Tahun 2025, Kementerian Pariwisata telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, antara lain:

A. Komitmen Pimpinan

Komitmen pimpinan menjadi faktor kunci dalam memastikan Reformasi Birokrasi berjalan secara terarah dan terintegrasi. Hal ini ditunjukkan melalui:



Gambar 3.61. Kick Off Meeting Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- Pelaksanaan Kick Off Meeting Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebagai momentum konsolidasi awal pelaksanaan RB;
- Evaluasi capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan rencana aksi tahun berjalan;
- Penetapan Keputusan Menteri Pariwisata tentang Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang memperkuat kelembagaan pengawalan RB.

B. Penguatan Tata Kelola dan Mekanisme Monitoring Berkala

Keberhasilan capaian nilai RB juga dipengaruhi oleh penguatan mekanisme pengendalian internal dan monitoring pelaksanaan rencana aksi, antara lain:



Gambar 3.62. Pertemuan Rutin Tim RB

- Pertemuan rutin Tim Reformasi Birokrasi sepanjang Tahun 2025 untuk memantau realisasi rencana aksi RB General dan RB Tematik;
- Evaluasi berkala atas capaian indikator Kegiatan Utama;
- Penyempurnaan rencana aksi agar lebih terukur dan memiliki daya ungkit terhadap sasaran strategis.

C. Integrasi RB General dan RB Tematik

Pendekatan terintegrasi antara RB General dan RB Tematik menjadi faktor signifikan dalam mendorong capaian indeks. RB General memperkuat fondasi tata kelola internal, sedangkan RB Tematik diarahkan pada kontribusi terhadap agenda prioritas nasional. Sinergi tersebut memastikan bahwa perbaikan sistem internal berdampak pada peningkatan kualitas pelaksanaan program, Intervensi tematik

memiliki dasar tata kelola yang kuat dan Evaluasi tidak bersifat parsial, tetapi mencerminkan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Analisa Keberhasilan Pencapaian Target IKSS.2.1

Sejumlah faktor yang berkontribusi dalam pencapaian target IKSS.2.1 Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2025, Kementerian Pariwisata melakukan berbagai upaya, yaitu komitmen pimpinan dan penguatan tata kelola Reformasi Birokrasi, yang tercermin dari konsistensi pelaksanaan kebijakan, pengendalian, serta pemantauan capaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata; penguatan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak bersifat administratif semata, tetapi berorientasi pada hasil dan perbaikan kinerja organisasi; dan pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi digital, yang mendukung penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kualitas layanan, serta efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Analisa Penghambat Pencapaian Target IKSS.2.1

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKSS.2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata pada tahun 2025 yaitu:

- 1) Belum kuatnya implementasi RB pada seluruh unit kerja dan kurangnya peningkatan kualitas pemanfaatan hasil evaluasi RB sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja berkelanjutan;
- 2) Keterbatasan kewenangan langsung Kementerian Pariwisata, khususnya program RB Tematik, menjadi tantangan dan menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta dalam mendukung keberhasilan indikator ini.

Upaya dan Strategi Kedepan Pencapaian Target IKSS.2.1

Upaya dan strategi kedepan yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target IKSS.2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata di masa mendatang, antara lain:

- 1) Penguatan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata;
- 2) Penyempurnaan kebijakan, proses bisnis, dan indikator kinerja guna meningkatkan orientasi hasil serta efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 3) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pendukung dalam rangka memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik.

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PRIORITAS

Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029, halaman 1371-1376, Kementerian Pariwisata diberi tugas mengampu Kegiatan Prioritas Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau, serta Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) & 3 Destinasi Regeneratif (DPR).

Dalam hal pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) & 3 Destinasi Regeneratif (DPR), Kegiatan Prioritas (KP) dibagi menjadi kategori berikut ini:

- 1) Percepatan pembangunan DPP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramenan, Labuan Bajo, dan Danau Toba;
- 2) Pengembangan DPP Manado-Likupang, Bangka Belitung, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, dan Morotai;
- 3) Penguatan DPR Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau.

Adapun indikator untuk Kegiatan Prioritas Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau, yakni (1) jumlah wisatawan nusantara di destinasi bahari dan danau prioritas; dan (2) jumlah wisatawan mancanegara di destinasi bahari dan danau prioritas. Sedangkan, untuk pengembangan 10 DPP dan 3 DPR, masing-masing destinasi memiliki indikator, yakni (1) PDRB dan sektor Akomodasi dan Makan Minum; (2) Pendapatan dari Wisatawan Nusantara; (3) Devisa Pariwisata; (4) Tenaga Kerja Pariwisata; dan (5) Investasi Pariwisata.

Capaian kinerja Kegiatan Prioritas (KP) diuraikan secara rinci sebagai berikut:

A Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau

Berikut ini capaian indikator pengembangan destinasi bahari dan danau prioritas:

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru				
PROGRAM PRIORITAS	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru				
KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau	Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau	Lokasi Destinasi Pariwisata Bahari	10	10	100%
	Jumlah wisatawan nusantara di destinasi bahari dan danau prioritas	Ribu Perjalanan	13.686,56	86.259,70 ¹⁾	630%
	Jumlah wisatawan mancanegara di destinasi bahari dan danau prioritas	Ribu Kunjungan	12.204,23	15.059,95 ²⁾	123%

Keterangan:

- 1) Data BPS, diolah kembali oleh Kementerian Pariwisata, Data Tahun 2025 tersedia sampai dengan Desember Tahun 2025
- 2) Data BPS, diolah kembali oleh Kementerian Pariwisata, Data Tahun 2025 tersedia sampai dengan November Tahun 2025

B

Percepatan Pembangunan DPP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, dan Danau Toba

Berikut ini capaian indikator percepatan pembangunan DPP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, dan Danau Toba:

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Percepatan Pembangunan DPP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, dan Danau Toba Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi				
PROGRAM PRIORITAS	Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan				
KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Juta Rupiah	22.023.561,06	24.845.280,00 ¹⁾	113%
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Miliar Rupiah	23.672,34	38.662,00 ²⁾	163%
	Devisa Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Juta USD	718,37	201,00 ³⁾	28%
	Tenaga kerja pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (Jawa Tengah)	Orang	3.280.514,00	3.430.000,00 ⁴⁾	105%
	Investasi sektor pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Juta Rupiah	1.191.228,32	1.363.228,87 ⁵⁾	114%
	Tenaga kerja pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (DIY)	Orang	454,43	440.000,00 ⁴⁾	96825%
Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Lombok-Gili Tramena	Juta Rupiah	2.432.513,02	2.691.880,00 ¹⁾	111%
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Lombok-Gili Tramena	Miliar Rupiah	14.850,43	8.537,00 ²⁾	57%
	Devisa Pariwisata Lombok-Gili Tramena	Juta USD	800,6	1.104,42 ³⁾	138%
	Tenaga kerja pariwisata Lombok-Gili Tramena	Orang	544.460	460.000,00 ⁴⁾	84%
	Investasi sektor pariwisata Lombok-Gili Tramena	Juta Rupiah	5.598.319,34	4.324.513,54 ⁵⁾	77%
Percepatan Pembangunan Destinasi	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Labuan Bajo	Juta Rupiah	42.889,25	53.990,00 ¹⁾	126%

PRIORITAS NASIONAL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi				
PROGRAM PRIORITAS	Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan				
KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	Pendapatan dari wisatawan nusantara Labuan Bajo	Miliar Rupiah	1.175,23	1.097,00 ²⁾	93%
	Devisa Pariwisata Labuan Bajo	Juta USD	283,52	259,00 ³⁾	91%
	Tenaga kerja pariwisata Labuan Bajo	Orang	304.910	340.000,00 ⁴⁾	112%
	Investasi sektor pariwisata Labuan Bajo	Juta Rupiah	663.817,72	1.741.446,85 ⁵⁾	262%
Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Danau Toba	Juta Rupiah	2.417.786,51	2.894.990,00 ¹⁾	120%
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Danau Toba	Miliar Rupiah	2.048,41	10.991,00 ²⁾	537%
	Devisa Pariwisata Danau Toba	Juta USD	163,91	148,12 ³⁾	90%
	Tenaga Kerja Pariwisata Danau Toba	Orang	1.199.556	1.340.000,00 ⁴⁾	112%
	Investasi sektor pariwisata Danau Toba	Juta Rupiah	513.030,98	43.180,55 ⁵⁾	8%

Keterangan:

- 1) Data BPS, diolah kembali oleh Kementerian Pariwisata, Data Tahun 2025 tersedia sampai dengan triwulan II Tahun 2025
- 2) Data Sementara Perhitungan Tim Rescue (BPS, Bappenas, Kemenpar) Semester I Tahun 2025 diolah kembali oleh Kemenpar
- 3) Data Sementara Perhitungan Tim Rescue (BPS, Bappenas, Kemenpar) Semester I Tahun 2025 diolah kembali oleh Kemenpar
- 4) Data sementara, Sakernas Agustus 2025 Badan Pusat Statistik
- 5) BKPM, diolah kembali oleh Kemenpar

C

Pengembangan DPP Manado-Likupang, Bangka Belitung, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, dan Morotai

Berikut ini capaian indikator pengembangan DPP Manado-Likupang, Bangka Belitung, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, dan Morotai:

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Pengembangan DPP Manado-Likupang, Bangka Belitung, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, dan Morotai Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi				
PROGRAM PRIORITAS	Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan				
KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Manado-Likupang	Juta Rupiah	2.837.523,71	3.144.410,00 ¹⁾	111%
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Manado-Likupang	Miliar Rupiah	8.982,47	5.317,00 ²⁾	59%
	Devisa Pariwisata Manado-Likupang	Juta USD	267,09	NA	N.A.
	Tenaga kerja pariwisata Manado-Likupang	Orang	219.919	246.049,00 ⁴⁾	112%
	Investasi sektor pariwisata Manado-Likupang	Juta Rupiah	965.762,85	442.682,56 ⁵⁾	46%
Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bangka Belitung	Juta Rupiah	3.614.153,73	3.918.900,00 ¹⁾	108%
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Bangka Belitung	Miliar Rupiah	13.161,89	3.871,00 ²⁾	29%
	Devisa Pariwisata Bangka Belitung	Juta USD	41,54	NA	N.A.
	Tenaga Kerja Pariwisata Bangka Belitung	Orang	109.216	110.000,00 ⁴⁾	101%
	Investasi sektor pariwisata Bangka Belitung	Juta Rupiah	657.861,88	113.770,57 ⁵⁾	17%
Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Raja Ampat	Juta Rupiah	18.196,50	19.260,00 ¹⁾	106%
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Raja Ampat	Miliar Rupiah	290,4	231,00 ²⁾	80%
	Devisa Pariwisata dari Raja Ampat	Juta USD	42,44	224,26 ³⁾	528%
	Tenaga kerja pariwisata Raja Ampat	Orang	9.054	60.000,00 ⁴⁾	663%
	Investasi sektor pariwisata Raja Ampat	Juta Rupiah	15.683,97	81.815,43 ⁵⁾	522%
Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bromo-Tengger-Semeru	Juta Rupiah	19.273.275,88	21.028.400,00 ¹⁾	109%
	Pendapatan dari wisatawan nusantara di Bromo-Tengger-Semeru	Miliar Rupiah	1.112,12	33.878,00 ²⁾	3046%
	Devisa Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	Juta USD	7,21	202,14 ³⁾	2804%

PRIORITAS NASIONAL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi				
PROGRAM PRIORITAS	Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan				
KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Tenaga kerja pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	Orang	3.954.841	3.990.000,00 ⁴⁾	101%
	Investasi sektor pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	Juta Rupiah	971.309,16	1.992.084,52 ⁵⁾	205%
Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Wakatobi	Juta Rupiah	39.122,37	43.340,00 ¹⁾	111%
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Wakatobi	Miliar Rupiah	132,95	279,00 ²⁾	210%
	Devisa Pariwisata Wakatobi	Juta USD	9,38	NA	N.A.
	Tenaga kerja pariwisata Wakatobi	Orang	243.687	210.000,00 ⁴⁾	86%
	Investasi sektor pariwisata Wakatobi	Juta Rupiah	45.520,70	65.444,49 ⁵⁾	144%
Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Morotai	Juta Rupiah	2.849,87	3.000,00 ¹⁾	105%
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Morotai	Miliar Rupiah	159,98	203,00 ²⁾	127%
	Devisa Pariwisata Morotai	Juta USD	0,78	NA	N.A.
	Tenaga kerja pariwisata Morotai	Orang	82.835	90.000,00 ⁴⁾	109%
	Investasi sektor pariwisata Morotai	Juta Rupiah	49.626,20	9.232,95 ⁵⁾	19%

Keterangan:

- 1) Data BPS, diolah kembali oleh Kementerian Pariwisata, Data Tahun 2025 tersedia sampai dengan triwulan II Tahun 2025
- 2) Data Sementara Perhitungan Tim Rescue (BPS, Bappenas, Kemenpar) Semester I Tahun 2025 diolah kembali oleh Kemenpar
- 3) Data Sementara Perhitungan Tim Rescue (BPS, Bappenas, Kemenpar) Semester I Tahun 2025 diolah kembali oleh Kemenpar
- 4) Data sementara, Sakernas Agustus 2025 Badan Pusat Statistik
- 5) BKPM, diolah kembali oleh Kemenpar

D

Penguatan DPR Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau

Berikut ini capaian indikator penguatan DPR Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau:

Tabel 3.15. Capaian Kinerja Penguatan DPR Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi				
PROGRAM PRIORITAS	Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan				
KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penguatan Destinasi Regeneratif Bali	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bali	Juta Rupiah	60.288.199,30	71.310.560,00 ¹⁾	118%
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Bali	Miliar Rupiah	123.500,99	26.892,00 ²⁾	22%
	Devisa pariwisata Bali	Juta USD	12.665,99	15.305,20 ³⁾	121%
	Tenaga kerja pariwisata Bali	Orang	644.270	800.000,00 ⁴⁾	124%
	Investasi sektor pariwisata Bali	Juta Rupiah	9.413.987,20	16.052.380,42 ⁵⁾	171%
Penguatan Destinasi Regeneratif Jakarta	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum <i>Greater</i> Jakarta	Juta Rupiah	211.658.892,86	244.991.900,00 ¹⁾	116%
	Pendapatan dari wisatawan nusantara <i>Greater</i> Jakarta	Miliar Rupiah	421.993,70	145.866,00 ²⁾	35%
	Devisa Pariwisata Jakarta	Juta USD	3.439,37	6.388,02 ³⁾	186%
	Tenaga kerja pariwisata <i>Greater</i> Jakarta (DKI)	Orang	1.537.529	1.700.000,00 ⁴⁾	111%
	Tenaga kerja pariwisata <i>Greater</i> Jakarta (Jawa Barat)	Orang	5.591.063	5.200.000,00 ⁴⁾	93%
	Tenaga kerja pariwisata <i>Greater</i> Jakarta (Banten)	Orang	1.523.452	1.160.000,00 ⁴⁾	76%
	Investasi sektor pariwisata <i>Greater</i> Jakarta	Juta Rupiah	14.130.860,16	23.744.721,75 ⁵⁾	168%
Penguatan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kepulauan Riau	Juta Rupiah	6.947.814,54	7.457.570,00 ¹⁾	107%
	Pendapatan dari wisatawan nusantara Kepulauan Riau	Miliar Rupiah	5.819,81	6.334,00 ²⁾	109%
	Devisa Pariwisata Kepulauan Riau	Juta USD	2.870,43	2.287,70 ³⁾	80%
	Tenaga kerja pariwisata Kepulauan Riau	Orang	294.642	230.000,00 ⁴⁾	78%
	Investasi sektor pariwisata Kepulauan Riau	Juta Rupiah	2.937.364,16	2.011.716,61 ⁵⁾	68%

Keterangan:

- 1) Data BPS, diolah kembali oleh Kementerian Pariwisata, Data Tahun 2025 tersedia sampai dengan triwulan II Tahun 2025
- 2) Data Sementara Perhitungan Tim Rescue (BPS, Bappenas, Kemenpar) Semester I Tahun 2025 diolah kembali oleh Kemenpar
- 3) Data Sementara Perhitungan Tim Rescue (BPS, Bappenas, Kemenpar) Semester I Tahun 2025 diolah kembali oleh Kemenpar
- 4) Data sementara, Sakernas Agustus 2025 Badan Pusat Statistik
- 5) BKPM, diolah kembali oleh Kemenpar

KINERJA PROGRAM UNGGULAN KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2025

Dalam upaya mendorong kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung transformasi menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian mengembangkan program unggulan yang sejalan dengan RPJMN Tahun 2025–2029 dan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kelima program ini dirancang untuk menjawab tantangan global, memperkuat daya saing nasional, dan memperluas pemerataan manfaat pariwisata secara inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Program-program tersebut tidak berdiri sendiri sebagai inisiatif sektoral, tetapi akan disematkan secara lintas-deputi dan diinternalisasikan ke dalam rencana kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian di tahun 2025.



Gambar 3.63. Program Unggulan Kementerian Pariwisata Tahun 2025

1. Gerakan Wisata Bersih

Gerakan Wisata Bersih merupakan bagian dari penanganan sampah nasional di destinasi pariwisata. Program ini bertujuan untuk mengamplifikasi pesan dan mengedukasi publik bahwa sampah adalah masalah bersama yang melibatkan stakeholders pariwisata, sehingga penanganannya harus dilakukan secara sistemik dan terintegrasi, bukan hanya oleh satu unit tertentu. Program ini adalah salah satu langkah Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan aspek skor *Travel and Tourism Development Index* (TTDI) pada kategori *Health & Hygiene* (3,78) yang masih di bawah rata-rata Asia Pasifik (4,53).

Gerakan Wisata Bersih merupakan inisiatif strategis Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia dengan mendorong kebersihan destinasi melalui regulasi, edukasi, kolaborasi, dan teknologi guna memperkuat citra wisata, meningkatkan pengalaman wisatawan, serta mendukung keberlanjutan. Melalui, GWB pemerintah mendorong terciptanya lingkungan destinasi yang bersih, sehat, dan

nyaman dengan mengedepankan pendekatan regulasi, edukasi, kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku industri pariwisata, pengelola destinasi, hingga masyarakat setempat, sehingga tercipta tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan wisata.

Saat ini, masih terdapat tantangan terkait pengelolaan kebersihan dan sampah di sejumlah destinasi wisata yang berdampak pada rendahnya indikator kebersihan dan higienitas. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas pengalaman wisatawan serta melemahkan daya saing pariwisata nasional. Oleh karena itu, Gerakan Wisata Bersih hadir sebagai solusi terpadu untuk menjawab tantangan tersebut secara sistematis dan berkelanjutan.

Melalui kolaborasi lintas sektor, program ini menargetkan peningkatan penanganan sampah hingga 70 persen serta pengurangan timbulan sampah sebesar 30 persen. Dengan tercapainya target tersebut, Gerakan Wisata Bersih diharapkan mampu memperkuat citra positif pariwisata Indonesia, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan wisatawan, serta mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Adapun tujuan GWB, antara lain:

- 1) *Competitiveness*: Meningkatkan daya saing destinasi wisata melalui penerapan praktik kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan yang dapat menarik lebih banyak wisatawan;
- 2) *Sustainability*: Mendukung pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek tata kelola, sosial ekonomi, budaya dan lingkungan;
- 3) *Regenerative*: Meningkatkan kualitas pariwisata berbasis komunitas yang berkontribusi pada keberlanjutan dan penambahan kapasitas pelestarian alam, budaya dan;
- 4) *Inclusivity*: Memastikan partisipasi dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, pelaku usaha, wisatawan termasuk perempuan, pemuda, kelompok adat, dan mereka yang terpinggirkan.

Melalui keempat tujuan strategis tersebut, Gerakan Wisata Bersih diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang bersih, berkualitas, dan berkelanjutan.

Adapun *roadmap* Gerakan Wisata Bersih, adalah sebagai berikut :

- a. Jangka Pendek: Aktivasi Gerakan Wisata Bersih di 14 lokasi dengan Aksi Bersih Destinasi Wisata, penyediaan sarana kebersihan, dan kampanye edukasi, didukung kolaborasi awal dengan mitra strategis.
- b. Jangka Menengah: Pendampingan dalam pembangunan kapasitas, pembentukan Bank Sampah, penguatan waste management, pemanfaatan teknologi kebersihan, serta pemberian insentif bagi desa wisata.

- c. Jangka Panjang: Integrasi ekonomi sirkular, pengembangan produk daur ulang, investasi swasta, dan perluasan gerakan secara nasional dengan model keberlanjutan.

Program GWB terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- a. Penanganan Sampah, yang berfokus pada 3R (reduce, reuse, recycle), edukasi, dan inovasi serta pemanfaatan sampah yang melibatkan masyarakat dan pelaku wisata untuk menciptakan destinasi yang bersih, sehat, dan berkelanjutan; dan
- b. Pengelolaan Toilet, sebagai fasilitas yang bersih dan memadai untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan dan mencerminkan standar pelayanan destinasi wisata.

Adapun sebaran lokasi, tanggal pelaksanaan, mitra kolaborasi, dan dokumentasi kegiatan, disampaikan dibawah ini:

Tabel 3.16. Sebaran Lokasi, Tanggal Pelaksanaan dan Mitra Kolaborasi Kegiatan GWB

No	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Mitra Kolaborasi
1	Pantai Parangtritis, D.I. Yogyakarta	23 Januari 2025	1) Rekosistem 2) Danone (Aqua) 3) Grab Indonesia
2	Kota Tua, D.K. Jakarta	16 Februari 2025	1) Artha Graha Group 2) Agung Sedayu Group 3) Artha Graha Peduli 4) Artha Graha International 5) Grab Indonesia
3	Marina Waterfront City, NTT	12 April 2025	1) ITDC 2) GoTo Impact Foundation
4	Pantai Pede, NTT	12 April 2025	1) ITDC 2) GoTo Impact Foundation
5	Pantai Kuta Mandalika, NTB	24 April 2025	ITDC
6	Gili Air, NTB	25 April 2025	ITDC
7	Waterfront City Pangururan, Sumatera Utara	4 Mei 2025	PT Astra International Tbk
8	Pantai Bebas Parapat, Sumatera Utara	5 Mei 2025	Bank Indonesia Pematang- siantar
9	Pantai Grand Watu Dodol, Jawa Timur	17 Juni 2025	1) PT Pertamina Patra Niaga 2) Atourin
10	Pantai Lovina, Bali	23 Juni 2025	1) Booking.com 2) Sungai Watch 3) Atourin 4) Grab Indonesia
11	Pulau Penyengat, Kepulauan Riau	30 Juli 2025	PT Telkomsel
12	Pantai Karangria, Sulawesi Utara	8 Agustus 2025	1) PT Elnusa Petrofin 2) PT Telkomsel
13	Pulau Pramuka, Jakarta	27 Agustus 2025	PT Astra International Tbk
14	Pagar Alam, Sumatera Selatan	15 November 2025	

Sepanjang tahun 2025, capaian GWB telah dilaksanakan di 14 lokasi di Indonesia, berkolaborasi dengan 17 mitra strategis dan pendampingan oleh 5 mitra, mengumpulkan sampah sebanyak 21,50 ton, serta melibatkan partisipan sebanyak 9.134 orang. Melalui kegiatan GWB ini, diharapkan dapat menjadi pemantik semangat masyarakat di sekitar destinasi untuk menjaga lingkungan, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku wisata, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap pariwisata bersih dan berkelanjutan.



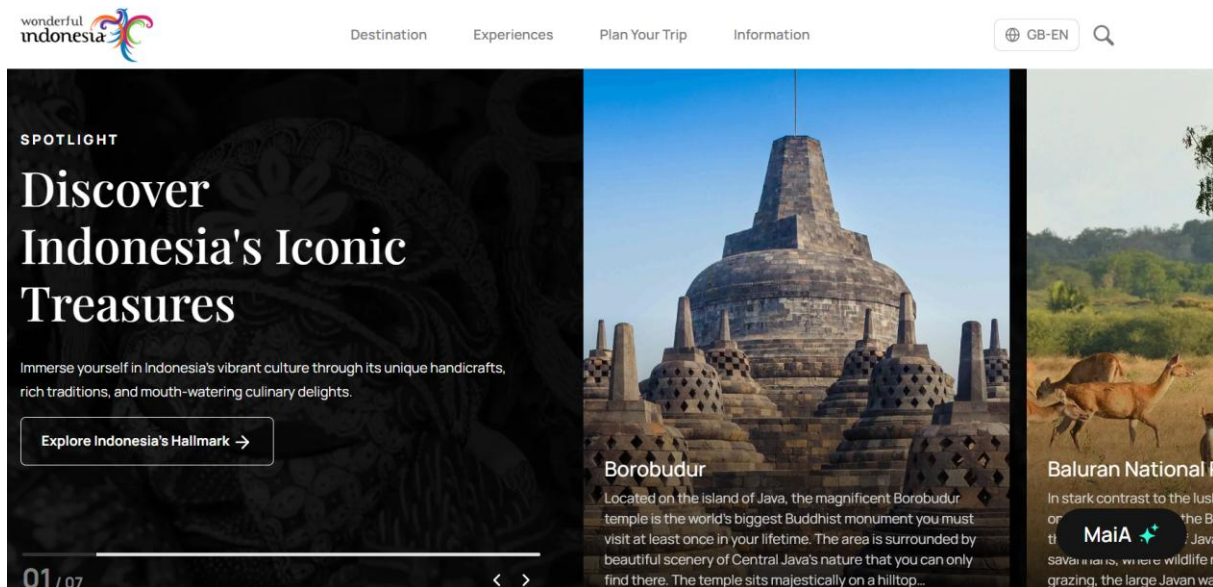
Gambar 3.64. Gerakan Wisata Bersih Tahun 2025

2. *Tourism 5.0: AI dan Digitalisasi*

Transformasi digital di sektor pariwisata bukan sekedar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam menjawab perubahan perilaku wisatawan global. *Tourism 5.0* mendorong pemanfaatan teknologi terkini seperti *Artificial Intelligence (AI)*, *machine learning*, dan *user journey personalization* dalam digitalisasi pemasaran pariwisata. Melalui platform indonesia.travel yang dilakukan pembaharuan (*revamping*), sehingga calon wisatawan dapat menikmati pengalaman yang telah dipilih dan disesuaikan berdasarkan preferensi, mudah diakses, dan relevan dengan minat pribadi mereka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan promosi, mempercepat konversi kunjungan, serta menciptakan pengalaman wisata digital yang imersif dan berbasis data strategis.

Kementerian Pariwisata meyakini bahwa digitalisasi jika dimanfaatkan dengan baik, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program kerja; terutama untuk pemasaran.

Setelah dilakukan *revamping website* indonesia.travel yang kini dapat menjadi sumber informasi pariwisata yang lengkap dan menarik, Kementerian Pariwisata mengembangkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) (target November 2025). Fitur yang dikembangkan, tidak hanya membantu menarik wisatawan dan membantu mereka merencanakan perjalanan, namun juga membantu Kementerian Pariwisata menganalisis perilaku wisatawan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pemasaran yang terarah dan pengembangan produk wisata.



Gambar 3.65. *Revamping Website indonesia.travel*

3. Pariwisata Berkualitas

Program ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata berkualitas tinggi. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan selama di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menarik wisatawan dengan pengeluaran tinggi, memperpanjang lama tinggal, serta meningkatkan pendapatan devisa secara signifikan. Upaya yang dilakukan menyeluruh, mulai dari penyusunan produk wisata dan pemberdayaan industri, hingga promosi dan pemanfaatan *event* untuk mengkomunikasikan pariwisata Indonesia, termasuk ke pangsa pasar yang belum tergarap secara optimal. Kementerian Pariwisata memulai dengan berfokus pada beberapa segmen utama, yakni *gastronomy*, *marine*, dan *wellness tourism*.

Wonderful Indonesia Gourmet (WIG) 2025

Program *Wonderful Indonesia Gourmet* merayakan kekayaan gastronomi Indonesia dengan menghadirkan media *gastro-tour*, *talk show* dengan panelis ahli terkemuka, *Artisan Food Market*, serta beragam aktivasi kolaboratif lainnya.

Wonderful Indonesia Gourmet diumumkan pada 22 September 2025 melalui konferensi pers, dan diselenggarakan pada 25 September hingga 1 Oktober 2025 di Jakarta dan Bali. Selama rangkaian kegiatan tersebut, program ini mendapat perhatian luas dan diliput oleh berbagai media. Program ini menghadirkan 15 jurnalis level internasional dan

Key Opinion Leaders (KOL) dari Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand, Hong Kong, Jepang, Australia, Prancis, dan Inggris Raya untuk mengikuti media *gastro-tour* ke 17 restoran dan usaha F&B. Pengalaman tersebut dipublikasikan secara internasional melalui artikel dan unggahan di media sosial mereka.

Program *Wonderful Indonesia Gourmet* (WIG) Tahun 2025 memberikan dampak nyata terhadap penguatan citra kuliner Indonesia sekaligus mendorong perputaran ekonomi pariwisata berbasis gastronomi. Melalui dukungan peliputan 40 media nasional dan internasional serta 11 KOL, program ini menghasilkan nilai publisitas sebesar Rp16,37 miliar, memperkuat posisi kuliner Indonesia di tingkat global. Pelaksanaan WIG Talks dengan 160 peserta dan 24 pembicara berperan dalam peningkatan kapasitas dan kolaborasi pelaku industri, sementara Artisan Market yang melibatkan 25 tenant mencatat transaksi Rp88,98 juta sebagai bentuk pemberdayaan UMKM. Dampak ekonomi yang lebih luas tercermin dari Restaurant Week dengan partisipasi 78 restoran terkurasi yang membukukan transaksi Rp15,36 miliar, serta penerbitan *Gourmet Guide* yang memuat 120 restoran terkurasi di Jakarta dan Bali sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing destinasi kuliner. Secara keseluruhan, WIG 2025 berkontribusi signifikan dalam mendorong pariwisata berkualitas, bernilai tambah, dan berkelanjutan.



Gambar 3.66. Program *Wonderful Indonesia Gourmet* (WIG) 2025

Wonderful Indonesia Wellness (WIW) 2025

Program *Wonderful Indonesia Wellness* (WIW) merupakan agenda unggulan tahunan Kementerian Pariwisata, lebih dari sekadar festival, inisiatif ini menjadi gerakan bersama untuk merayakan kearifan lokal, tradisi kebugaran, serta harmoni antara tubuh, pikiran, dan alam. Program ini berlangsung selama 1-30 November 2025 di Surakarta & Yogyakarta. Pembukaan *Wonderful Indonesia Wellness* 2025 diselenggarakan di Taman Balekambang, Surakarta. WIW 2025 diharapkan dapat mengembangkan wisata kebugaran dengan memadukan keautentikan budaya lokal dan keindahan alam tanah air. Dua festival utama yaitu *Royal Surakarta Wellness Festival* dan *Jogja Cultural*

Wellness Festival dengan tema "*Two Destinations, One Wellness Heritage*", menghadirkan pengalaman unik yang memadukan budaya dan kebugaran secara autentik dari tanah Jawa.

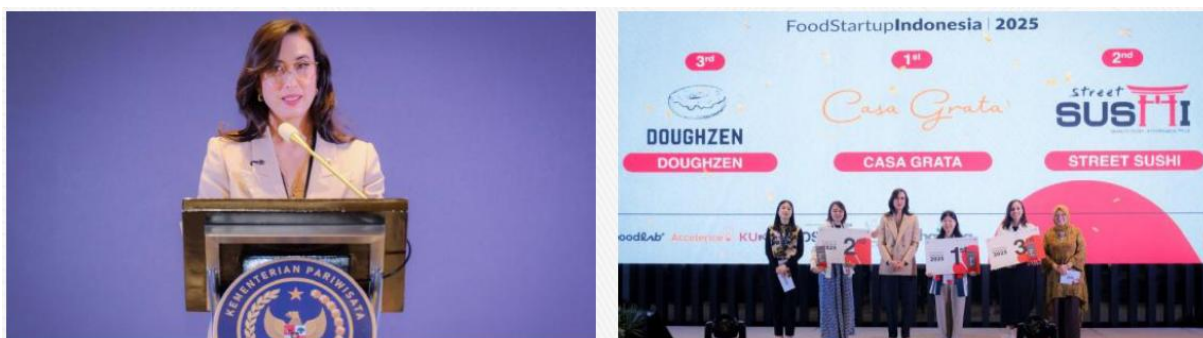
Rangkaian kegiatan WIW 2025 mencakup aktivitas wellness berbasis budaya dan kesehatan, antara lain yoga, meditasi, pengalaman spiritual, imersi kearifan Jawa, pertunjukan seni, WIW Talks, WIW Workshop, Wellness Bazaar, serta pertunjukan budaya harian. Seluruh rangkaian ditutup dengan seremoni penutupan di Pura Mangkunegaran yang dihadiri unsur pemerintah, keraton, pelaku industri, mitra strategis, dan media. Program *Wonderful Indonesia Wellness 2025* melibatkan 73 mitra, 3.735 pengunjung, 96 UMKM, dan 1.792 tenaga kerja.



Gambar 3.67. Program *Wonderful Indonesia Wellness (WIW) 2025*

Kegiatan *FoodStartup Indonesia (FSI) 2025*

FoodStartup Indonesia (FSI) adalah program Kementerian Pariwisata sejak 2016 untuk membina dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kuliner Indonesia, serta memfasilitasi akses pembiayaan. Pasca pendaftaran pada 7 April 2025, 308 pendaftar dikurasi hingga terpilih 48 pelaku usaha kuliner untuk mengikuti *Demoday FSI 2025*, pada 29-31 Oktober 2025. Selama tiga hari, para peserta mengikuti konferensi dan *mentoring* bersama pakar industri kuliner tentang pengelolaan bisnis, pengembangan produk, peningkatan daya saing. 10 finalis terpilih melakukan *final pitching* di hadapan juri dan calon investor. *FSI 2025* didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, SMESCO, Bank Indonesia, *Indonesia Gastronomy Network*, dan *Ultima Rasa Akselerasi*. *FSI* diharapkan dapat terus memperkuat ekosistem kuliner nasional yang inovatif dan berdaya saing.



Gambar 3.68. Program *FoodStartup Indonesia (FSI) 2025*

Pengembangan Produk Wisata

Salah satu program unggulan Kementerian Pariwisata di tahun 2025 adalah menciptakan Pariwisata Berkualitas, yang diwujudkan melalui pengembangan dan pemanfaatan wisata minat khusus sebagai daya tarik utama untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dan memperkuat posisi destinasi di pasar pariwisata. Pada tahun ini juga Kementerian Pariwisata memiliki 3 produk unggulan yaitu *Gastronomi*, *Marine*, dan *Wellness*. Pada tahun 2025, Kementerian Pariwisata merilis tiga buku panduan pola perjalanan: *Wisata Rasa di Bumi Pasundan*; *Wellness Journey Across the Java Wonders*; dan *Wonderful Indonesia Diving Directory*.

Pada 19 Oktober 2025, Kementerian Pariwisata merilis panduan pola perjalanan berjudul "Wisata Rasa di Bumi Pasundan" sebagai referensi bagi *travel agent*, pelaku wisata, dan masyarakat. Buku hasil kolaborasi Pemerintah Daerah, pelaku industri, komunitas gastronomi, akademisi, dan konsultan kreatif ini menampilkan wisata tematik berbasis kuliner di Jawa Barat dan ditujukan untuk menginspirasi pengembangan paket tur wisata kuliner serupa di berbagai daerah.



Gambar 3.69. Peluncuran Buku "Wisata Rasa di Bumi Pasundan"

Peluncuran buku *Wellness Journey Across the Java Wonders* dibarengi dengan peresmian *Wonderful Indonesia Wellness 2025* ini, diadakan di Taman Balekambang, Solo, Jawa Tengah. Buku ini bertujuan untuk memberikan rujukan bagi pelaku usaha pariwisata dalam merencanakan pola perjalanan *wellness* yang terintegrasi dengan keberadaan Candi Borobudur sebagai pusat perjalanan, serta menawarkan pengalaman berwisata yang unik dan otentik. Pola perjalanan ini dirancang bukan hanya sebagai rute wisata biasa, melainkan untuk memperoleh pengalaman kebugaran dan mendorong transformasi kesehatan holistik bagi wisatawan untuk mencapai keseimbangan dimensi *wellness* yang meliputi aspek fisik, emosi, mental, sosial, lingkungan, dan spiritual melalui pendekatan pariwisata. Konsep pola perjalanan ini adalah interpretasi modern dari "*Awakening Journey*" atau "perjalanan pencerahan" yang digambarkan pada relief Candi Borobudur.



Gambar 3.70. Peluncuran Buku "Wellness Journey Across the Java Wonders"

Kementerian Pariwisata meluncurkan buku "Wonderful Indonesia Diving Directory" sebagai rujukan komprehensif bagi wisatawan maupun penyelam profesional untuk mengenal destinasi dengan titik selam terbaik di Indonesia pada saat Jumpa Pers Akhir Tahun di Balai Rung Soesilo Soedarman, Jakarta tanggal 16 Desember 2025. Direktori ini diharapkan menjadi panduan yang informatif sekaligus edukatif, baik bagi wisatawan maupun pemangku kepentingan, dalam mengembangkan pariwisata selam yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Buku ini mengelompokkan destinasi selam dari berbagai wilayah di Indonesia, dengan kawasan Indonesia Timur sebagai fokus utama karena berada di jantung Coral Triangle. Dalam buku ini telah diberikan penjelasan mengenai 679 titik dive spot yang tersebar di Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.



Gambar 3.71. Peluncuran Buku "Wonderful Indonesia Diving Directory"

4. **Event by Indonesia**

Indonesia memiliki kekayaan budaya dan seni yang dapat dikurasi menjadi event berbasis kekayaan intelektual yang unik dan otentik. Program ini mendorong penyelenggaraan *event* pariwisata kelas dunia yang tidak hanya mengangkat citra Indonesia secara global, tetapi juga memperkuat ekosistem industri pariwisata lokal dan membuka peluang ekspor budaya. Dengan menjadikan *event* sebagai *signature tourism product*, Indonesia diharapkan tampil sebagai pusat penyelenggaraan event internasional yang kreatif, otentik, dan berdampak ekonomi tinggi. Pelaksanaan sebelumnya telah membuktikan keberhasilan event dalam menghasilkan dampak

ekonomi besar dalam waktu singkat. Memanfaatkan potensi yang masih dapat dioptimalkan, Kementerian Pariwisata mengusahakan hadirnya *event by Indonesia*.

Dampak *Event by Indonesia*

Program *Event by Indonesia* Tahun 2025 menunjukkan dampak yang signifikan terhadap penguatan ekosistem pariwisata berbasis event serta pergerakan ekonomi nasional. Pada tahun 2025 telah diselenggarakan 239 *event*, yang terdiri atas 99 Karisma Event Nusantara (KEN), 54 event nasional, 31 event internasional, 30 event MICE, 22 event Non KEN, 2 event PENTAS dan 1 event Crossborder. Program *Event by Indonesia* Tahun 2025 berhasil menarik 12,20 juta pengunjung dan melibatkan 20.877 UMKM, sekaligus menyerap 257.561 tenaga kerja, pelaku seni, dan komunitas di berbagai daerah. Aktivasi event berskala lokal hingga internasional tersebut mendorong perputaran ekonomi langsung yang mencapai Rp23,76 triliun, mencerminkan peran strategis event sebagai instrumen stimulus ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan citra destinasi Indonesia. Secara keseluruhan, *Event by Indonesia* berkontribusi nyata dalam mendorong pariwisata berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan melalui pemerataan manfaat ekonomi lintas wilayah.



Gambar 3.72. Program *Event by Indonesia* Tahun 2025

5. Desa Wisata

Guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat desa sekaligus meningkatkan jumlah Desa Wisata berprestasi di kancah internasional, Kementerian Pariwisata terus mengembangkan Desa Wisata, yang per 3 November 2025 berjumlah 6.171 desa wisata.

Program ini tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas infrastruktur, amenities, *storytelling* lokal, dan kapasitas SDM masyarakat desa wisata agar mampu menjadi pelaku utama dalam industri pariwisata. Target ke depan adalah menjadikan lebih banyak desa wisata Indonesia sebagai juara internasional, berdaya saing global, dan mampu mengangkat nama Indonesia di forum pariwisata dunia.

Kolaborasi Kementerian Pariwisata dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Menteri Pariwisata meninjau Desa Wisata Pulau Penyengat di Kepulauan Riau pada 16 Oktober 2025. Desa ini adalah salah satu dari 20 desa wisata dalam *pilot project* sertifikasi halal dengan BPJPH sejak Juli 2025. Sebanyak 438 produk UMKM bersertifikat halal telah dihasilkan melalui program ini. Desa Wisata Pulau Penyengat sendiri telah memiliki 24 sertifikat halal. Untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi ramah Muslim unggulan, kolaborasi Kemenpar dan BPJPH pada tahun 2025 sebanyak 2.885 desa wisata telah memiliki sertifikat halal. Inisiatif ini mendorong pengembangan pariwisata halal sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Program Sertifikasi Desa Wisata (Sertidewi) Berkelanjutan

Sejak 2020 hingga 2024, Program Sertidewi Berkelanjutan telah berhasil mensertifikasi 40 desa wisata dan 2 destinasi. Pada tahun 2025, 10 desa wisata yang berhasil meraih Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan 2025, dimana 5 desa wisata baru tersertifikasi dan 5 lainnya melakukan re-sertifikasi, sehingga total mencapai 45 desa wisata dan 2 destinasi (Bintang Resort dan ITDC). Sertidewi Berkelanjutan merupakan program sertifikasi yang memastikan destinasi wisata memenuhi standar dan kriteria sebagai destinasi berkelanjutan.

Sertifikasi ini dilaksanakan Kemenpar berkolaborasi dengan BCA (Bank Central Asia) melalui proses penentuan status mutu, standar, dan kualitas desa wisata dengan mekanisme penilaian/audit menggunakan kriteria dan indikator kepariwisataan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Sertifikasi ini dilakukan melalui mekanisme penilaian lembaga sertifikasi yang bernaung di bawah Kemenpar, yaitu Lembaga Sertifikasi Produk Indonesia *Sustainable Tourism Council* (LS Pr-ISTC).

Dari sepuluh desa yang terpilih, ada empat desa wisata yang berhasil memperoleh sertifikasi melalui program dari Kemenpar adalah: (1) Desa Wisata Wanurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah; (2) Desa Wisata Kreet di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; (3) Desa Wisata Les di Kabupaten Buleleng, Bali; dan (4) Desa Wisata Senaru di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, ada enam desa wisata yang berhasil memperoleh sertifikasi melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari BCA, yaitu: (1) Desa Wisata Dayun di Kabupaten Siak, Riau; (2) Desa Wisata Kreatif Terong, di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung; (3) Desa Wisata Tamansari di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; (4) Desa Wisata Pentingsari di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; (5) Desa Wisata Taro di Kabupaten Gianyar, Bali; dan (6) Desa Wisata Bilebante di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Program Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan menjadi bagian dari strategi nasional pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan pilar-pilar pembangunan desa wisata mencakup ekonomi, sosial-budaya, serta lingkungan. Ke depan, Desa Wisata diharapkan terus berkembang secara holistik sehingga mampu menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dan mensejahterakan masyarakatnya.



Gambar 3.73. Sertifikasi Desa Wisata (Sertidewi) Berkelanjutan 2025

3.2. REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025

Berikut ini merupakan realisasi anggaran Kemenpar Tahun 2025:

Tabel 3.17. Realisasi Anggaran Kemenpar Tahun 2025 Berdasarkan Program

NO	PROGRAM	PAGU 2025 (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Pendidikan & Pelatihan Vokasi	276.461.909.000	251.757.130.814	91,06%
2	Program Kepariwisataaan	432.139.135.000	411.625.322.356	95,25%
3	Program Dukungan Manajemen	780.999.409.000	757.140.349.961	96,95%
Total		1.489.600.453.000	1.420.522.803.131	95,36%

Sumber: Laporan Keuangan Kemenpar Tahun 2025 unaudited

Tabel 3.18. Realisasi Anggaran Kemenpar Tahun 2025 Berdasarkan Sumber Dana

NO	SUMBER DANA	PAGU 2025 (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	RUPIAH MURNI	1.427.957.523.000	1.364.861.248.414	95,58%
2	PNBP	53.168.248.000	51.237.941.685	96,37%
3	BLU	8.474.682.000	4.423.613,032	52,19%
Total		1.489.600.453.000	1.420.522.803.131	95,36%

Sumber: Laporan Keuangan Kemenpar Tahun 2025 unaudited

Tabel 3.19. Realisasi Anggaran Kemenpar Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Barang	1.029.056.658.000	973.583.185.536	94.51%
2	Modal	97.544.352.000	94.412.889.265	96.67%
3	Pegawai	362.999.443.000	352.526.728.330	97.07%
Total		1.489.600.453.000	1.420.522.803.131	95.36%

Sumber: Laporan Keuangan Kemenpar Tahun 2025 unaudited

Tabel 3.20. Realisasi Anggaran Kemenpar per Satuan Kerja Tahun 2025

NO	UNIT KERJA/SATUAN KERJA	PAGU 2025 (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan (D1)	32.433.275.000	31.286.326.905	96.24%
2	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Dan Infrastruktur (D2)	49.113.657.000	48.348.398.175	98.28%
3	Deputi Bidang Industri dan Investasi (D3)	30.596.871.000	29.623.181.749	96.75%
4	Deputi Bidang Pemasaran (D4)	201.728.795.000	185.907.793.738	92.14%
5	Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (<i>Events</i>)(D5)	161.340.359.000	161.127.291.726	99.67%
6	Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama	395.988.471.000	392.949.509.261	99.17 %
7	Politeknik Pariwisata	549.093.018.000	326.403.060.756	71,55%
8	Badan Pelaksana Otorita	69.306.007.000	62.100.190.401	89,60%
Kemenpar		1.489.600.453.000	1.420.522.803.131	95.36%

Sumber: Laporan Keuangan Kemenpar Tahun 2025 unaudited

3.3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pada Tahun 2025, Kementerian Pariwisata memfokuskan penggunaan sumber daya secara lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis sektor pariwisata. Pengelolaan sumber daya diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan dan peningkatan kinerja sektor pariwisata melalui penguatan destinasi pariwisata prioritas, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, pengembangan produk pariwisata bernilai tambah tinggi, serta penguatan promosi dan pemasaran pariwisata yang efektif dan berbasis data.

Pemanfaatan anggaran dilakukan dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, dengan prioritas pada program-program unggulan. Fokus penggunaan sumber daya tersebut diarahkan untuk menghasilkan dampak ekonomi yang

optimal, mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, memperluas penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, Kementerian Pariwisata juga memperkuat sinergi pendanaan melalui kolaborasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan mitra internasional guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya non-APBN. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga memperluas jangkauan manfaat pembangunan pariwisata yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Pelaksanaan efisiensi penggunaan sumber daya dituangkan kedalam penetapan program unggulan Kemenpar, antara lain:



Gambar 3.74. Penetapan Program Unggulan Kemenpar dalam Pelaksanaan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

3.4. KINERJA LAIN-LAIN

Sektor pariwisata Indonesia berhasil meraih penghargaan di tahun 2025. Penghargaan-penghargaan yang diraih sektor pariwisata Indonesia meliputi:

A. BIDANG BIROKRASI DAN KELEMBAGAAN

Kementerian Pariwisata berhasil meraih penghargaan terbaik di tahun 2025. Penghargaan yang diraih Kementerian Pariwisata meliputi:

- 1) Kementerian Pariwisata meraih penghargaan Tingkat Kematangan Unit Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) dengan Level 3 (Proaktif);
- 2) Kementerian Pariwisata meraih Penghargaan Terbaik III Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 kategori Kementerian, dengan nilai sempurna 100 dan predikat AA / Istimewa;
- 3) Kementerian Pariwisata meraih predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP)/ *Information Transparency Awards* 2025 dengan capaian nilai 94,89 dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik kategori Kementerian.

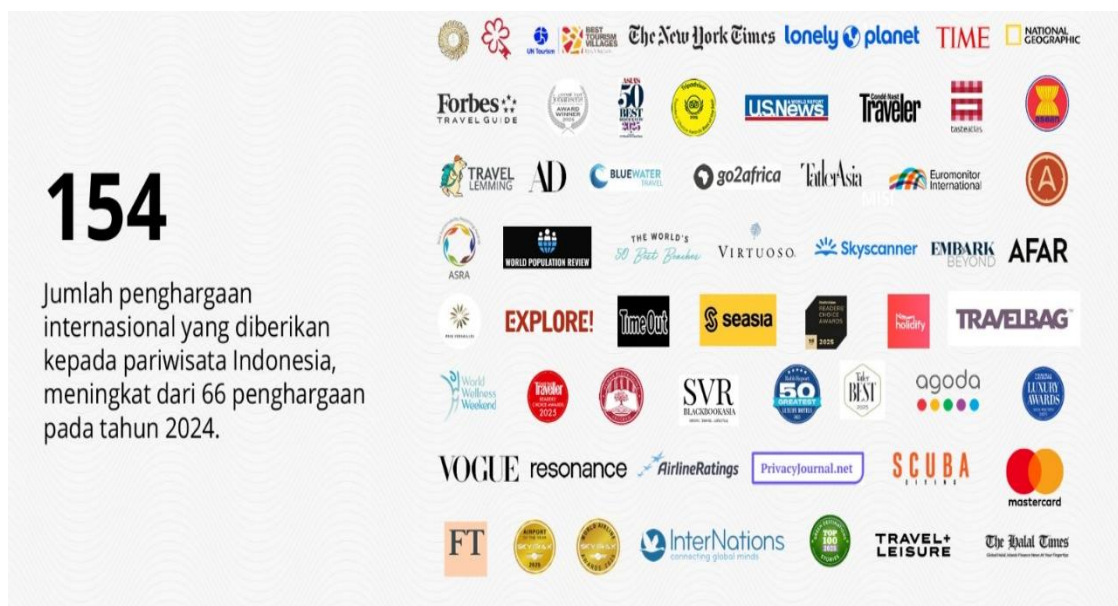
- 4) Kementerian Pariwisata menerima sertifikat apresiasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital atas kolaborasi *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* dalam menemukan kerentangan keamanan siber dan penguatan keamanan siber digital, terutama menghadapi risiko di sektor pariwisata yang semakin terdigitalisasi.



Gambar 3.75. Berbagai Penghargaan yang diraih oleh Kemenpar di Bidang Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

B. BIDANG TEKNIS PENGEMBANGAN PARIWISATA

Sepanjang tahun 2025, Kementerian Pariwisata telah berkinerja baik dalam berkontribusi mendukung pembangunan nasional dan pariwisata Indonesia serta peningkatan tata kelola Kementerian Pariwisata yang berkualitas dalam upaya membangun pondasi yang kuat untuk pariwisata yang berkualitas (*quality tourism*) di tahun 2025.



Gambar 3.76. Penghargaan yang diraih dalam Rangka Pengembangan Pariwisata

Dari 154 Penghargaan yang diraih Pariwisata Indonesia, terdapat beberapa penghargaan yang menjadi indikator kinerja positif dan penguatan citra pariwisata Indonesia secara global diantaranya:

Penghargaan *MICHELIN Keys* dan *World's 50 Best 2025*

Pada 8 Oktober 2025, MICHELIN kembali mengumumkan daftar penerima *MICHELIN Keys* 2025. Dari sekitar 7.000 hotel di seluruh dunia yang terdaftar dalam *The MICHELIN Guide*, sebanyak 2.457 hotel dianugerahi *MICHELIN Keys*, dan 33 diantaranya berasal dari Indonesia. Tiga hotel Indonesia meraih *Three-Keys*, penghargaan tertinggi yang diberikan untuk pengalaman menginap yang luar biasa (*an extraordinary stay*), yaitu Amanjiwo di Jawa Tengah, Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve di Bali, dan NIHI Sumba di Nusa Tenggara Timur. Enam hotel meraih *Two-Keys* untuk kategori pengalaman menginap istimewa (*an exceptional stay*), sementara 24 hotel lainnya mendapatkan *One-Key* untuk kategori pengalaman menginap sangat spesial (*a very special stay*). Penilaian dilakukan oleh para inspektur MICHELIN berdasarkan lima kriteria, yaitu: keunggulan arsitektur dan desain interior, kualitas dan konsistensi layanan, karakter hotel, nilai yang sepadan dengan harga, dan kontribusi terhadap lingkungan.

Selain itu, *World's 50 Best* kembali menganugerahkan penghargaan untuk hotel di Indonesia: Peringkat 18 untuk Desa Potato Head, Bali, yang juga mendapatkan *Eco Hotel Award 2025*, dan Peringkat 50 untuk Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve, Bali. Penghargaan ini menandai babak baru dalam peningkatan kualitas industri perhotelan di Indonesia, yang sejalan dengan program Pariwisata Berkualitas. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia siap bersaing dan menjadi destinasi unggulan berkelas dunia.



Gambar 3.77. Penghargaan *MICHELIN Keys* dan *World's 50 Best 2025*

Prestasi Desa Wisata dalam *Best Tourism Villages (BTV)*

Desa wisata Indonesia juga mencatat prestasi di tingkat global. Melalui *Best Tourism Villages 2025* yang melibatkan 319 desa dari berbagai negara, UN *Tourism* memberikan penghargaan kepada dua desa wisata Indonesia. Desa Wisata Pemuteran di Bali terpilih sebagai salah satu desa wisata terbaik (*Best Tourism Village*), sementara Desa Wisata Osing Kemiren di Banyuwangi masuk dalam *Upgrade Programme* bagi desa berpotensi tinggi.

Program BTV terbukti memberi dampak ekonomi nyata. Berdasarkan perbandingan sebelum dan sesudah menerima penghargaan, empat desa wisata Indonesia yang telah meraih predikat ini mencatat peningkatan kunjungan wisatawan sebesar +13,10% dan kenaikan pendapatan masyarakat sebesar +22,46%. Dengan prestasi Desa Wisata Pemuteran sebagai *Best Tourism Village 2025*, diharapkan dampak positif serupa dapat terwujud.



Gambar 3.78. Desa Wisata Pemuteran dan Desa Wisata Osing Kemiren Peraih Penghargaan *Best Tourism Villages 2025 UN Tourism*

Raja Ampat dinobatkan sebagai Destinasi Wisata Terbaik

Penghargaan ini diberikan oleh 2 media internasional, yaitu *The New York Times* menobatkan Raja Ampat sebagai salah satu dari "52 Places to Go in 2025" karena kekayaan ekosistem lautnya dan **National Geographic** yang menobatkan Raja Ampat masuk dalam daftar "The 25 Best Places in the World to Travel to in 2025" sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan.



Gambar 3.79. Destinasi Wisata Raja Ampat

Penghargaan La Liste

Indonesia meraih penghargaan "*The New Destination Champion Award 2026*" pada Annual La Liste Awards Ceremony atas panduan kuliner global, sebagai destinasi dengan perkembangan gastronomi yang pesat serta dan kekayaan wisata gastronominya yang autentik. Penghargaan ini menjadi pengakuan dunia atas kekayaan

dan keunikan gastronomi Indonesia. Dua restoran Indonesia menjadi representatif: Rumari, Bali dan ESA Restaurant, Jakarta



Gambar 3.80. Menteri Pariwisata Menerima Penghargaan La Liste

ASEAN Tourism Awards 2025

Penyelenggaraan *ASEAN Tourism Awards* merupakan salah satu agenda ASEAN Tourism Forum yang diselenggarakan untuk tujuan memberikan apresiasi kepada pelaku pariwisata atas upaya menghadirkan destinasi wisata yang unggul dan berkualitas. Sebanyak 15 perwakilan desa wisata di Indonesia mendapat penghargaan *ASEAN Tourism Awards* (ATA) 2025 yang berlangsung di Persada Johor International Convention Center, Johor Bahru, Johor, Malaysia, pada 20 Januari 2025. Dari sejumlah kategori penghargaan yang diperebutkan dalam *ASEAN Tourism Awards 2025*, desa wisata Indonesia berhasil memperoleh tiga kategori, yaitu "*5th ASEAN Homestay Award*", "*4th ASEAN Community-Based Tourism (CBT) Award*", dan "*3rd ASEAN Public Toilet Award*".



Gambar 3.81. Desa Wisata Peraih Penghargaan *ASEAN Tourism Awards 2025*

Seiring dengan berbagai penghargaan internasional yang berhasil diraih oleh para pemangku kepentingan pariwisata Indonesia sepanjang tahun 2025, Kementerian Pariwisata menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi dan dedikasi seluruh pihak dalam meningkatkan citra dan daya saing pariwisata nasional di tingkat global. Capaian tersebut mencerminkan hasil sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, pemerintah daerah, komunitas, dan mitra strategis dalam menghadirkan destinasi dan layanan pariwisata yang berkualitas serta berstandar internasional. Sebagai bentuk penghargaan dan penguatan kolaborasi tersebut, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan Wonderful Indonesia Awards (WIA) sebagai wadah apresiasi kepada seluruh *stakeholders* yang telah berkontribusi dalam mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

WIA merupakan ajang apresiasi bagi pelaku, pengelola dan pemangku kepentingan pariwisata yang telah berkontribusi nyata dalam memajukan sektor pariwisata Indonesia, sekaligus memperkuat ekosistem pariwisata yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan, melalui 3 (tiga) prinsip yang diutamakan, yaitu: Kualitas, Keberlanjutan dan Kolaborasi. Melalui *Wonderful Indonesia Awards*, mendorong peningkatan standar pelayanan, kualitas event, dan tata kelola destinasi.

WIA 2025 diselenggarakan sebagai respon terhadap tantangan sektor pariwisata yang semakin kompleks, baik akibat dinamika global, perubahan preferensi wisatawan, maupun meningkatnya tuntutan penerapan prinsip berkelanjutan. Kegiatan ini dirancang sebagai instrumen strategis Kementerian Pariwisata dalam memberikan apresiasi terhadap kontribusi nyata para pelaku dan pemangku kepentingan pariwisata, sekaligus mendorong peningkatan kualitas destinasi, produk, dan layanan pariwisata.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 5 Desember 2025, bertempat di Balai Rung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona. Adapun *outcome* yang diharapkan ada meningkatnya motivasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam menerapkan praktik pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, serta menguatnya citra dan reputasi pariwisata yang kredibel dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. *Wonderful Indonesia Awards* pada tahun 2025 terdapat 10 kategori diberikan penghargaan kepada 47 pemenang, dan 15 Desa Wisata menerima pendampingan.



Gambar 3.82. Dokumentasi Penerima Penghargaan Wonderful Indonesia Awards pada tahun 2025

Selain berbagai prestasi yang telah dicapai oleh Kementerian Pariwisata sepanjang Tahun 2025, Kementerian Pariwisata juga turut mendukung berbagai program prioritas lintas Kementerian/Lembaga yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan melalui berbagai Rencana Aksi Nasional (RAN), sebagai berikut:

1) Rencana Aksi Nasional *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)* tahun 2025 menjadi kerangka strategis bagi Indonesia dalam mencapai tujuan global yang mencakup penghapusan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan penguatan kemitraan. Dalam konteks pembangunan nasional, SDGs telah diintegrasikan melalui Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029. Dengan fokus pada pendekatan holistik, RAN TPB/SDGs memastikan sinergi antara kebijakan, alokasi sumber daya, dan peran pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Pengarusutamaan SDGs mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui: (a) Setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030; (b) Mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam RPJMN; (c) Penyusunan rencana aksi nasional dan penguatan kolaborasi multi pihak; (d) Pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs; dan (e) Inklusi sosial dan keberlanjutan.

RAN SDGs ini merupakan tindak lanjut dari Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDG's adalah untuk memberikan landasan kokoh dan merupakan instrumen utama untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. SDGs ini secara keseluruhan terdapat 17 poin atau disebut 17 *SDGs Goals* yang mana Kementerian Pariwisata pada Tahun 2025 ini memberikan dukungan RAN SDGs pada 4 (empat) TPB/SDGs yaitu: (1) Tujuan 8, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (2) Tujuan 11, Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (3) Tujuan 12, Konsumsi dan Produksi; (4) Tujuan 14, Ekosistem Laut.

SDGs SEKTOR PARIWISATA TAHUN 2025

Kementerian Pariwisata Mendukung Pencapaian 4 (Empat) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kegiatan pendukung:

- Sertifikasi Profesi dan SDM
- Fenyelenggaraan dan Implementasi Kerjasama Nasional dan Internasional
- Pengadaan Prasarana Pendidikan Tinggi
- Penyelenggaraan Pengajaran
- Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Kerjasama
- Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
- Pelatihan Berbasis Kompetensi
- Fasilitasi SDM Pariwisata
- Publikasi dan Promosi Terpadu
- Pameran, Misi Perwakilan dan Kerjasama Terpadu
- Penyelenggaraan Bidding dan Delegate Boosting MICE
- Promosi MICE dan Internasional dan Nasional
- Pendukung Event Daerah
- Pelaksanaan Event Internasional dan Nasional

11 KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Kegiatan pendukung:

- Penerapan Pariwisata Berkelanjutan dan Destinasi Pariwisata
- Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan

12 PERENCANAAN DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Kegiatan pendukung:

- Fasilitasi dan Pelatihan Kapasitas Berbasis Pariwisata Berkelanjutan
- Pendampingan, kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan
- Fasilitasi pengembangan desa wisata
- Penerapan Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Pariwisata

14 LIFE BELOW WATER

Kegiatan pendukung:

- Penerapan Pariwisata Berkelanjutan dan Destinasi Pariwisata



Tujuan	Alokasi	Realisasi	%
8 Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi	Rp 465.755.476.000	Rp 445.433.622.068	95,64%
11 Kota Dan Permukiman Yang Berkelanjutan	Rp 7.361.594.000	Rp 7.343.934.926	99,76%
12 Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab	Rp 14.164.286.000	Rp 14.121.638.195	99,70%
14 Ekosistem Laut	Rp 5.000.000.000	Rp 4.998.263.147	99,97%
Jumlah	Rp 492.281.356.000	Rp 471.897.458.336	95,86%

Gambar 3.83. Dukungan dan Realisasi Kegiatan Pendukung SDGs

2) Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarustamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan kebijakan dan program, agar tercipta kesetaraan dan keadilan bagi perempuan maupun laki-laki di lingkungan masyarakat. Dalam sektor pariwisata, pengarusutamaan gender berperan dalam mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimujudkan melalui pengembangan destinasi wisata yang memberikan peluang kerja secara setara, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pariwisata tanpa adanya diskriminasi gender, serta pemberdayaan perempuan sebagai pelaku utama, khususnya pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pariwisata.

Melalui penerapan perspektif gender dalam berbagai kegiatan, sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, serta pengurangan kesenjangan sosial. Dengan demikian, pengarusutamaan gender menjadi fondasi penting dalam mewujudkan industri pariwisata yang inklusif, berdaya saing, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional telah menginstruksikan kepada Menteri untuk melaksanakan PUG ke dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Mengacu pada arah kebijakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 bahwa PUG masuk kedalam Astacita ke-4 dari 8 Astacita yang merupakan Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan perempuan, pemuda (generasi millennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 di atas serta mendorong optimalisasi dan implementasi PUG di lingkungan Kementerian Pariwisata, telah dibentuk Tim Koordinasi PUG di lingkungan Kemenpar melalui Keputusan Menteri Pariwisata Nomor SK/74/HK.01.02/MP/2025 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Pariwisata.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pariwisata telah melakukan penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) pada 13 (tiga belas) Rincian Output (RO) dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). RO yang ditandai ARG tersebut mencakup kegiatan penyelenggaraan pengajaran pendidikan vokasi pariwisata, implementasi pengajaran dan penguatan kelembagaan Politeknik Pariwisata, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan usaha pariwisata.

Proses penandaan ARG dilandasi oleh analisis gender yang dituangkan dalam dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan Gender Action Budget (GAB), yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) masing-masing kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif kesetaraan gender tetap terintegrasi dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara substantif, pelaksanaan ARG pada Tahun Anggaran 2025 tetap difokuskan pada kegiatan-kegiatan inti yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki, khususnya melalui pendidikan vokasi pariwisata, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. Dengan fokus tersebut, kualitas integrasi prinsip kesetaraan gender dalam program dan kegiatan tetap terjaga.

Kementerian Pariwisata terus mengupayakan penguatan implementasi ARG secara berkelanjutan, baik melalui peningkatan kualitas analisis gender, penguatan kelembagaan, maupun integrasi ARG pada program dan kegiatan prioritas, sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkeadilan.

Adapun 13 Rincian Output yang telah di-tagging ARG T.A 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.21. Rincian Output Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2025

NO	KODE	RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
01	SAD.003	Penyelenggaraan Pengajaran Pariwisata Politeknik Pariwisata Meda	14.628.420.000	14.223.876.002	97,23%
02	SAD.005	Penyelenggaraan Pengajaran Politeknik Pariwisata Palembang	13.767.998.000	13.068.259.864	94,92%
03	SAD.002	Penyelenggaraan Pengajaran Politeknik Pariwisata NHI Bandung	28.386.842.000	26.164.976.426	92,17%
04	SAD.006	Penyelenggaraan Pengajaran Politeknik Pariwisata Lombok	13.967.738.000	13.775.107.478	98,62%
05	SAD.004	Penyelenggaraan Pengajaran Politeknik Pariwisata Makassar	16.946.657.000	16.066.202.047	94,80%
06	SAD.010	Penyelenggaraan Implementasi Pengajaran dan Kelembagaan Politeknik Pariwisata NHI Bandung	8.615.931.000	7.561.665.165	87,76%
07	SAD.014	Penyelenggaraan Implementasi Pengajaran dan Kelembagaan Politeknik Pariwisata Lombok	4.267.993.000	4.066.476.089	95,28%
08	SAD.019	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Medan	6.884.546.000	6.181.184.589	89,78%
09	SAD.021	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Palembang	4.698.544.000	4.512.272.755	96,04%
10	SAD.018	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata NHI Bandung	7.242.281.000	6.915.838.232	95,49%

NO	KODE	RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
11	SAD.022	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Lombok	2.782.044.000	2.638.335.891	94,83%
12	SAD.020	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Makassar	3.692.597.000	3.218.603.787	87,16%
13	QDC.001	SDM dan Usaha Pariwisata yang memperoleh fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Danau Toba	1.448.284.000	1.447.908.695	99,97%
TOTAL			127.329.875.000	119.840.707.020	94,12%

Kementerian Pariwisata meraih Penghargaan Peringkat Terbaik Kedua dari Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia dalam PIMTI Award 2025, untuk kategori Kementerian/Lembaga dengan penerapan kebijakan pengarusutamaan gender melalui penempatan pejabat perempuan pada jabatan pimpinan tinggi.

Penghargaan tersebut diberikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-7 Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia yang dirangkaikan dengan penyelenggaraan PIMTI Award 2025 di Jakarta, pada tanggal 19 Desember 2025.

Penilaian Penganugerahan PIMTI AWARD 2025 dilakukan terhadap K/L dengan tiga kriteria, yaitu:

- Komitmen dalam penempatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya perempuan;
- Penyediaan fasilitas pendukung bagi perempuan dalam bekerja; dan
- Pelaksanaan program peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan.

Dengan penghargaan ini mencerminkan komitmen Kementerian Pariwisata dalam mendorong kesetaraan gender di lingkungan kerja pemerintahan. Capaian tersebut merupakan bentuk pengakuan atas upaya berkelanjutan Kementerian Pariwisata dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif serta memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan.



Gambar 3.84. Dokumentasi Penganugerahan PIMTI AWARD 2025

3) Rencana Aksi Nasional Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE)

Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2025, ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menginstruksikan 47 (empat puluh tujuh) Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar Kementerian/Lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerjasama antar Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Strategi kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Strategi ini diimplementasikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

Selain itu, dalam rangka mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang memerlukan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi guna mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan yang efektif, dengan ini Presiden Republik Indonesia menetapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional yang menginstruksikan 18 (delapan belas) Menteri /Kepala Badan/Direktur Badan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi nasional dengan memastikan

akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data, serta sinergi antai kementerian/lembaga.

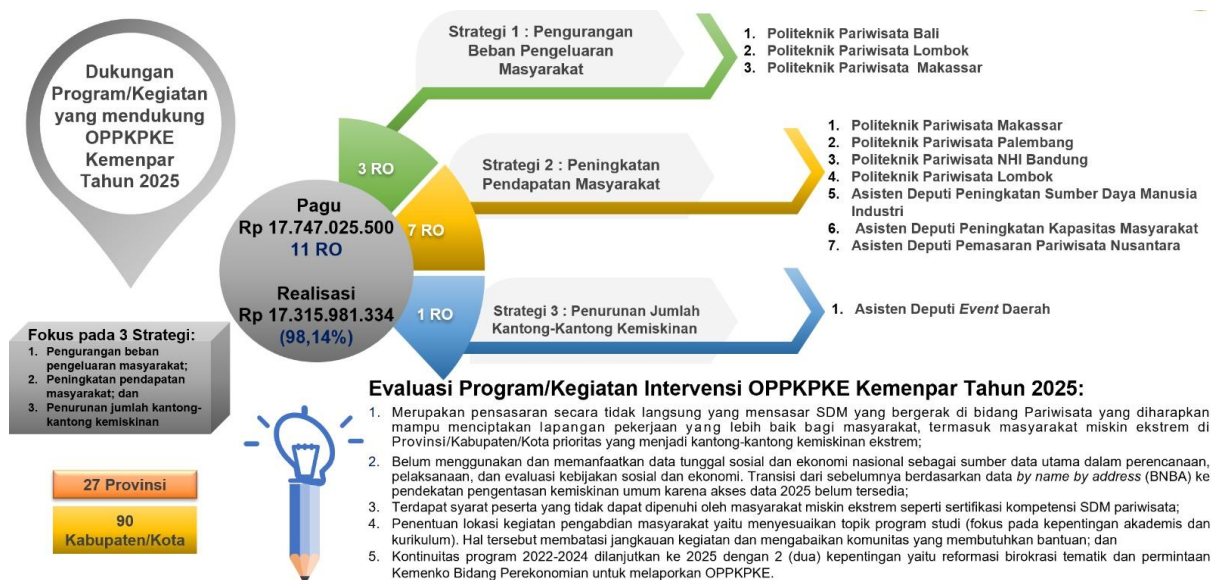
Dalam 2 (dua) Instruksi Presiden tersebut, Menteri Pariwisata tidak ada instruksi untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat dan integrasi data sosial dan ekonomi nasional dengan memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data, serta sinergi antar Kementerian/Lembaga. Meskipun tidak ada instruksi, Kementerian Pariwisata tetap mendukung optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program Kementerian Pariwisata dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Kementerian Pariwisata mendukung OPPKPKE melalui pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025 melalui tiga strategi, yaitu:

- Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat;
- Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan;
- Penurunan jumlah kantong – kantong kemiskinan.

Total anggaran sebesar Rp 17.747.025.500,- (Tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada 11 (sebelas) Rincian Output (RO).

Dukungan tersebar pada 27 (dua puluh tujuh) Provinsi dan 90 (sembilan puluh) Kabupaten/Kota. Total Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Kementerian Pariwisata yang mendukung OPPKPKE Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 17.315.981.334,- (Tujuh belas miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 98,14%.



Gambar 3.85. Dukungan dan Realisasi Kegiatan Pendukung OPPKPKE

4) Upaya Manajemen Krisis dan Kemitigasian Pariwisata

Kementerian Pariwisata secara berkala melakukan monitoring terhadap potensi krisis yang dapat berdampak pada sektor pariwisata. Bergantung pada level krisis (*severity*), langkah mitigasi segera diambil untuk penanganan jangka pendek. Sementara itu, dalam jangka panjang, Kementerian Pariwisata terus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan. Terdapat tujuh krisis yang dikategorikan sebagai menengah di periode Oktober (1) gempa M6,5 di Sumenep, Jawa Timur; (2) gempa M7,6 di Sulawesi Utara, disertai peringatan dini tsunami; (3) erupsi Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur; (4) banjir di Sukabumi, Jawa Barat; (5) banjir di Semarang, Jawa Tengah; (6) kecelakaan bus wisata di Pemalang, Jawa Tengah; dan (7) kebakaran di hotel Samarinda, Kalimantan Tengah.

Adapun atas krisis (1) s.d. (3), Kementerian Pariwisata mengapresiasi langkah BMKG yang mempublikasikan informasinya dengan cepat dan terarah. Kementerian Pariwisata turut mengamplifikasi informasi tersebut lewat owned media Kementerian Pariwisata agar semakin mudah untuk menjangkau wisatawan. Mengingat krisis (4) dan (5) utamanya disebabkan cuaca buruk, Kementerian Pariwisata telah mempublikasikan informasi cuaca secara preventif dengan lebih aktif, agar para wisatawan dapat merencanakan perjalanan mereka dengan baik.

Kementerian Pariwisata menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya 4 (empat) korban dalam kecelakaan bus wisata di Pemalang, Jawa Tengah (krisis (6)). Isu keselamatan angkutan wisata menjadi perhatian serius, dan telah dibahas bersama Menteri Perhubungan pada pertemuan 14 Oktober 2025. Berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah kecelakaan umumnya disebabkan oleh faktor human error dan ketidaklaikan kendaraan. Adapun penyebab krisis (7) kebakaran hotel bintang lima di Samarinda belum dapat diidentifikasi; namun, kejadian tersebut diperparah dengan kegagalan sistem pengamanan (seperti sprinkler dan alarm) di hotel tersebut. Tidak ada korban jiwa akibat insiden tersebut.

Atas krisis (6) dan (7) yang utamanya disebabkan kegagalan sistem, Kementerian Pariwisata akan terus mensosialisasikan dan mendorong penerapan pelaksanaan Peraturan Menteri Pariwisata No. 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, termasuk standar operasinya.

5) Kolaborasi Lintas K/L

Pada tahun 2025, Kementerian Pariwisata telah melakukan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, dengan lebih dari 16 kerja sama strategis yang merefleksikan peran Kementerian Pariwisata sebagai *orchestrator* pembangunan pariwisata nasional. Sinergi dengan K/L seperti Kementerian Desa dan PDT, KemenPPPA, Kementerian Koperasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian P2MI, Kementerian Kebudayaan, Kementerian UMKM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenkumham (Imigrasi), BPS, Badan Sandi & Siber Negara, Badan Gizi Nasional, BASARNAS, hingga pemerintah daerah menegaskan bahwa pembangunan

pariwisata tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pengembangan SDM, UMKM, desa, lingkungan, keamanan, data statistik, dan kebijakan mobilitas. Kerja sama ini memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata, khususnya dalam mendukung peningkatan pergerakan wisatawan, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, serta keberlanjutan destinasi, sekaligus menjadi fondasi penting untuk pencapaian sasaran strategis dan prioritas nasional secara lebih inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 3.86. Kerjasama Strategis Kementerian Pariwisata dengan K/L lainnya Tahun 2025

Program kolaboratif Kementerian Pariwisata dengan K/L terkait yang telah dilaksanakan selama tahun 2025, meliputi:

Tabel 3.22. Daftar Program Strategis Kementerian Pariwisata dengan K/L lainnya Tahun 2025

No	K/L	Program Kolaboratif
1	Kementerian Desa & PDT	Pertukaran data dan pemanfaatan informasi terkait desa wisata
2	Badan Pusat Statistik	Penyediaan data dan informasi statistik bidang pariwisata
3	Kementerian PPPA	Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di bidang pariwisata, termasuk pelatihan kapasitas masyarakat (>86% perempuan) dan sertifikasi kompetensi masyarakat
4	Kemenkumham (Imigrasi)	Pertukaran data dan pemanfaatan informasi terkait data kunjungan wisatawan menurut catatan keimigrasian
5	Kementerian Koperasi	Pendampingan, fasilitasi, penguatan sarana dan prasarana, dan pengembangan model bisnis guna mempercepat pembangunan dan mendorong kemajuan Koperasi Desa Merah Putih sektor pariwisata
6	Badan Sandi & Siber Negara	Pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan sistem elektronik di lingkungan Kementerian Pariwisata

No	K/L	Program Kolaboratif
7	Kementerian Ketenagakerjaan	Pelaksanaan pelatihan bagi tenaga kerja pariwisata di Balai Besar Pelatihan Vokasi (BBPV) di Bekasi, Lombok Timur, Medan, di bidang gastronomi, pastry, barista
8	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Pelaksanaan program untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai destinasi MICE dan <i>event</i> , melalui pelaksanaan forum internasional (SEABEFF), <i>event (Pipilaka Calling Full Immersive Art Exhibition)</i> dan promosi melalui media sosial
9	Kementerian P2MI	Pelatihan tenaga kerja migran bidang pariwisata (<i>wellness therapy</i>) untuk mendukung keberangkatan ke Maldives
10	Kementerian Kebudayaan	Kolaborasi pendanaan kegiatan <i>Event by Indonesia</i> sesuai tusi masing-masing pihak (contoh: Sawahlunto <i>International Music Fest</i> , Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman, Festival Perahu Bidar Tradisional, Seren Taun Kasepuhan Cisungsang, <i>Solo International Performing Arts (SIPA)</i> , Eksotika Bromo)
11	Kementerian UMKM	Pendukung dan pendampingan bagi usaha mikro pada sektor pariwisata di desa wisata
12	Kementerian Lingkungan Hidup	Penyesuaian kriteria penilaian, penyusunan pedoman, petunjuk teknis, dan pembimbingan bagi perusahaan sektor pariwisata dalam pengelolaan lingkungan hidup ("PROPER" untuk pariwisata)
13	Badan Gizi Nasional	Pelatihan dan pendampingan pengelolaan dapur terintegrasi kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)
14	BASARNAS	Pelaksanaan <i>workshop</i> evaluasi dan implementasi protokol keamanan dan keselamatan dan integrasi <i>panic button</i> dan <i>QR SAR</i> Basarnas; Pelatihan 300 pemandu wisata tirta & 300 pemandu wisata gunung dalam aspek keselamatan
15	Kementerian Kesehatan	Penyusunan <i>roadmap</i> wisata kesehatan yang meliputi penguatan rumah sakit dan tenaga kesehatan di destinasi prioritas, penetapan rumah sakit unggulan dan integrasinya dengan sektor pariwisata untuk pengembangan paket wisata kesehatan, serta promosi terarah
16	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pelaksanaan audiensi dengan Asisten Deputi Wisata Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait pengembangan pemasaran pariwisata dan wisata olahraga melalui <i>event</i> skala nasional dan internasional di destinasi pariwisata, untuk dituangkan dalam PKS atau Rencana Aksi

3.5. EVALUASI INTERNAL

Berdasarkan dinamika tantangan dan peluang dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata guna mencapai sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata, maka evaluasi internal terhadap proses pencapaian kinerja Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

1) **Perencanaan dan Penganggaran Program**

Perencanaan program dan penganggaran Tahun 2025 telah diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan sektor pariwisata secara lebih fokus dan berdampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama. Namun demikian, masih diperlukan penguatan sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah agar pelaksanaan program di lapangan semakin terintegrasi dan berkelanjutan.

2) **Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Secara umum, pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja sektor pariwisata. Program unggulan seperti *Event by Indonesia*, Desa Wisata, Pariwisata Berkualitas, dan Gerakan Wisata Bersih terbukti efektif dalam mendorong pergerakan wisatawan, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, pelaksanaan di beberapa daerah masih menghadapi kendala kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia.

3) **Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor**

Koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pariwisata semakin diperkuat sepanjang Tahun 2025. Meski demikian, masih diperlukan peningkatan mekanisme kolaborasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan guna memastikan seluruh program berjalan selaras dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

4) **Pengelolaan Sumber Daya dan Kinerja Organisasi**

Pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana telah dikelola secara lebih efisien dan akuntabel. Namun, penguatan kapasitas SDM pariwisata, terutama di daerah berkembang, masih menjadi kebutuhan utama guna mendukung kualitas layanan dan daya saing destinasi.

5) **Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja**

Sistem pemantauan dan evaluasi kinerja telah berjalan dengan baik, namun perlu terus diperkuat melalui pemanfaatan data yang lebih akurat dan terintegrasi, khususnya melalui implementasi Satu Data Pariwisata sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih presisi.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2025 berada pada jalur yang positif, meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan penguatan dan penyempurnaan agar pencapaian sasaran strategis di masa mendatang dapat lebih optimal, terukur, dan berkelanjutan.

4

PENUTUP

- Kesimpulan
- Rekomendasi/Langkah-Langkah untuk Perbaikan yang akan Datang



4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dalam Tahun 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen institusi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja pemerintahan yang transparan, terukur, dan berorientasi pada hasil. Laporan ini menjadi bagian penting dalam merefleksikan kinerja pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata nasional pada periode awal implementasi arah kebijakan pembangunan nasional pasca restrukturisasi kelembagaan dan dalam kerangka transisi menuju Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan indikator kinerja Kementerian Pariwisata dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan sektor pariwisata mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025–2029, yang disusun sebagai landasan operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata nasional yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja, tantangan, serta langkah-langkah strategis yang telah ditempuh Kementerian Pariwisata sepanjang Tahun 2025. Laporan ini juga mencerminkan komitmen berkelanjutan Kementerian Pariwisata dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional, serta mendorong pembangunan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Tahun 2025 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025–2029. Rangkuman realisasi pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Pariwisata menunjukkan capaian sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		SATUAN	TARGET RPJMN 2025*)	TARGET RKP 2025 **)	TARGET PERJANJIAN KINERJA	REALISASI 2025	CAPAIAN
SS.1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata	IKSS.1.1	Rasio PDB Pariwisata	Persen	4,5 – 4,6	4,2 – 4,3	4,2	3,97 ¹⁾	94,52%
		IKSS.1.2	Devisa Pariwisata	Miliar USD	19,0 – 22,1	17,1 – 18,3	17,1	18,28 ²⁾	106,87%
		IKSS.1.3	Pengeluaran wisatawan mancanegara	USD/kunjungan	1.300 – 1.381,3	1.220	1.220	1.267,07 ⁴⁾	103,20%
		IKSS.1.4	Tenaga Kerja Pariwisata	Juta orang	25,75	25,75	25,75	25,91 ³⁾	100,62%

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		SATUAN	TARGET RPJMN 2025*)	TARGET RKP 2025 **)	TARGET PERJANJIAN KINERJA	REALISASI 2025	CAPAIAN
		IKSS.1.5	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Juta kunjungan	14,6 – 16,0	14 – 15	14	15,39 ⁴⁾	109,93%
		IKSS.1.6	Perjalanan Wisatawan Nusantara	Juta Perjalanan	1.084	1.084	1.084	1.200,33 ⁴⁾	110,73%
SS.2	Meningkatnya Kualitas Governans Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur	IKSS.2.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	86,5	86,67 ⁵⁾	100,19%

Keterangan:

- 1) *Data sangat sementara hanya PDB penyediaan akomomodasi dan angkutan udara TW I-IV 2025*
- 2) *Data sementara NPI Bank Indonesia TW I-IV 2025, Februari 2026*
- 3) *Data sementara, Sakernas Agustus 2025 Badan Pusat Statistik*
- 4) *Data Bahan Tayang Berita Resmi Statistik No. 13/02/Th. XXIX, 2 Februari 2026 terkait Perkembangan Pariwisata Desember 2025*
- 5) *Data sementara berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN-RB prasanggah*

Dalam rangka pencapaian target kinerja Kemenpar, masih beberapa kendala dan tantangan dimasa mendatang, antara lain:

- 1) Terdapat hambatan dalam sinkronisasi data pariwisata antar instansi dan K/L terkait dan belum kuatnya sistem *early projection* dan analisis tren menyebabkan penetapan target dan evaluasi kinerja kurang presisi dan sulit adaptif terhadap perubahan pasar.
- 2) Terdapat kendala dalam mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama (*length of stay*) dan membelanjakan lebih banyak uang (*spending*) akibat minimnya pengembangan produk wisata minat khusus, MICE, dan *event* unggulan belum terintegrasi secara maksimal dengan sektor ekonomi kreatif dan UMKM.
- 3) Adanya hambatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri, terutama dalam aspek konektivitas dan pembangunan destinasi karena pembangunan masih terpusat di destinasi utama, sehingga dampak ekonomi belum merata ke destinasi baru atau desa wisata.
- 4) Strategi pemasaran belum sepenuhnya berbasis segmentasi pasar yang tajam akibat minimnya kolaborasi dengan kreator konten dan pemanfaatan platform digital belum dioptimalkan secara menyeluruh untuk menjaring wisatawan mancanegara maupun nusantara.
- 5) Masih diperlukannya peningkatan kompetensi melalui sertifikasi dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
- 6) Belum terintegrasinya prinsip lingkungan, sosial, dan budaya secara mendalam dalam seluruh program kerja mengakibatkan kurangnya kesiapan sistem dalam menghadapi risiko masa depan dan dinamika global yang tidak menentu.

4.2. REKOMENDASI LANGKAH-LANGKAH UNTUK PERBAIKAN YANG AKAN DATANG

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2025, Kementerian Pariwisata menyusun rekomendasi langkah-langkah perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja pada periode selanjutnya. Rekomendasi ini menjadi dasar penguatan akuntabilitas kinerja serta perbaikan berkelanjutan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian Pariwisata.

- 1) Meningkatkan pemanfaatan data statistik pariwisata yang terintegrasi dengan instansi dan K/L terkait, termasuk penguatan sistem *early projection* dan analisis tren, agar perencanaan program, penetapan target, dan evaluasi kinerja semakin presisi dan adaptif;
- 2) Mengarahkan pengembangan produk dan destinasi pariwisata pada peningkatan kualitas pengalaman, lama tinggal, dan belanja wisatawan melalui penguatan *event* unggulan, MICE, wisata minat khusus, serta integrasi dengan ekonomi kreatif dan UMKM;
- 3) Memperdalam sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku industri dalam pembangunan destinasi, konektivitas, SDM, dan promosi, guna memastikan kebijakan dan program pariwisata selaras dengan kebijakan nasional lainnya;
- 4) Mengoptimalkan strategi pemasaran pariwisata berbasis segmentasi pasar, pemanfaatan platform digital, serta kolaborasi dengan pelaku industri dan kreator konten, baik untuk pasar wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara;
- 5) Mendorong peningkatan kompetensi SDM pariwisata melalui pelatihan, sertifikasi, dan kemitraan dengan industri, sekaligus memperkuat standar, pedoman, dan tata kelola penyelenggaraan program dan event pariwisata;
- 6) Memprioritaskan pengembangan destinasi baru dan desa wisata di luar destinasi utama, dengan pendekatan berkelanjutan dan berbasis masyarakat, untuk memperluas dampak ekonomi dan meningkatkan ketahanan sektor pariwisata nasional;
- 7) Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya dalam seluruh program, serta meningkatkan kesiapan sektor pariwisata dalam menghadapi dinamika global dan risiko ke depan.